



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH T.A 2024

KABUPATEN NAGAN RAYA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga penyusunan Dokumen **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)** Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Shalawat beriring salam kepangkuan alam Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak, Amin YRA

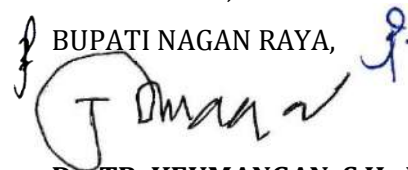
Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh pasal 42 ayat (1) huruf h dan huruf i serta pasal 46 ayat (2), dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 69 ayat (1) bahwa salah satu tugas dan kewenangan Bupati/Walikota adalah memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah melalui Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah. Untuk itu LPPD tahun 2024 ini disusun sebagai kewajiban kami melaporkan berbagai urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Nagan Raya selama tahun 2024 yang lalu.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagan Raya pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) belum memenuhi harapan kita semua, namun Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah berupaya secara optimal. Saran dan masukan dari berbagai pihak sebagai perbaikan kinerja sangat kami harapkan untuk meningkatkan efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nagan Raya pada masa yang akan datang.

Kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyelesaian dokumen laporan ini, semoga Allah SWT selalu memberikan Ridha-Nya kepada kita semua untuk terus berkarya bagi kemajuan Kabupaten Nagan Raya yang kita cintai bersama.

Suka Makmue, Maret 2025

BUPATI NAGAN RAYA,



Dr, TR. KEUMANGAN, S.H., M.H



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN APIP	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	1
a. Undang-undang Pembentukan Daerah.....	1
b. Data Geografis Daerah	1
c. Informasi Umum Data Kependudukan	2
d. Jumlah Kecamatan dan Gampong	3
e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintahan.....	4
f. Rincian ASN berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di setiap Perangkat Daerah.....	5
g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	6
h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja.....	7
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	34
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	34
b. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	45
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	45
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	52
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	125
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	127
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	127
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	127
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	128
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	166
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah.....	168
a. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja.....	168

b.	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya.....	170
c.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (kinerja) yang telah dicapai	170
d.	Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.....	171
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	188
1.	Dasar Hukum.....	188
2.	Gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan.....	190
3.	Capaian pelaksanaan tugas pembantuan.....	190
3.2	Permasalahan dan Kendala	193
3.3	Saran dan Tindak Lanjut.....	193
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	194
4.1	Urusan Pendidikan	194
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar	194
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	194
4.1.3	Realisasi	195
4.1.4	Alokasi Anggaran	203
4.1.5	Dukungan Personil	205
4.1.6	Permasalahan	205
4.2	Urusan Kesehatan.....	207
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	207
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	207
4.2.3	Realisasi	208
4.2.4	Alokasi Anggaran	229
4.2.5	Dukungan Personil	232
4.2.6	Permasalahan	232
4.3	Urusan Pekerjaan Umum.....	233
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	233
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	233
4.3.3	Realisasi	234
4.3.4	Alokasi Anggaran	241
4.3.5	Dukungan Personil	242
4.3.6	Permasalahan	242
4.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	243
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	243
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	243
4.4.3	Realisasi	243
4.4.4	Alokasi Anggaran	249
4.4.5	Dukungan Personil	251
4.4.6	Permasalahan	251
4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	251
4.5.1	Satuan Polisi Pamong Praja/Wilayahul Hisbah.....	252
4.5.1.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	252
4.5.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	252

4.5.1.3	Realisasi.....	252
4.5.1.4	Alokasi Anggaran.....	258
4.5.1.5	Dukungan Personil.....	261
4.5.1.6	Permasalahan dan Solusi	261
4.5.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	262
4.5.2.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	262
4.5.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	262
4.5.2.3	Realisasi.....	263
4.5.2.4	Alokasi Anggaran.....	270
4.5.2.5	Dukungan Personil.....	272
4.5.2.6	Permasalahan dan Solusi	272
4.6	Urusan Sosial	273
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	273
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	273
4.6.3	Realisasi	274
4.6.4	Alokasi Anggaran	289
4.6.5	Dukungan Personil	290
4.6.6	Permasalahan dan Solusi	290
4.7	Program dan Kegiatan.....	291
BAB V	PENUTUP.....	301

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Luas Kabupaten Nagan Raya menurut Wilayah Administratif Pemerintahan Tahun 2024..... 2
Tabel 1.2	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dalam Kecamatan..... 3
Tabel 1.3	Jumlah Kecamatan dan Gampong di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024..... 3
Tabel 1.4	Rincian Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah..... 4
Tabel 1.5	Rincian Aparatur Sipil Negara..... 5
Tabel 1.6	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2024..... 7
Tabel 1.7	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2024 8
Tabel 1.8	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun..... 9
Tabel 1.9	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024..... 10
Tabel 1.10	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024..... 12
Tabel 1.11	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2024 13
Tabel 1.12	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2024..... 14
Tabel 1.13	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 14
Tabel 1.14	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun 2024..... 16
Tabel 1.15	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2024..... 17
Tabel 1.16	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2024..... 17
Tabel 1.17	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024..... 19
Tabel 1.18	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024..... 19
Tabel 1.19	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2024..... 20
Tabel 1.20	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2024..... 21
Tabel 1.21	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2024..... 21
Tabel 1.22	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2024 22
Tabel 1.23	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun 2024..... 23
Tabel 1.24	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024..... 24
Tabel 1.25	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Statistik Tahun 2024 25

Tabel 1.26	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Budaya Tahun 2024.....	25
Tabel 1.27	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun 2024.....	25
Tabel 1.28	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.....	26
Tabel 1.29	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2024.....	27
Tabel 1.30	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2024.....	28
Tabel 1.31	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Perdagangan Tahun 2024.....	28
Tabel 1.32	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Perindustrian Tahun 2024.....	29
Tabel 1.33	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Transmigrasi Tahun 2024.....	30
Tabel 1.34	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2024.....	29
Tabel 1.35	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pengawasan Tahun 2024.....	31
Tabel 1.36	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024.....	32
Tabel 1.37	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Keuangan Tahun 2024.....	33
Tabel 1.38	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kepegawaian Tahun 2024.....	34
Tabel 1.39	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 - 2026.....	48
Tabel 1.40	Dokumen Perencanaan Tahunan (RPJP 2023 - 2026).....	52
Tabel 2.1	Tabel Indikator Kinerja Makro.....	127
Tabel 2.2	Tabel Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome).....	128
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	166
Tabel 2.4	Tujuan, Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	168
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 - 2024.....	170
Tabel 2.6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai.....	172
Tabel 3.1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023.....	192
Tabel 4.1	Target Capaian SPM Urusan Pendidikan.....	194
Tabel 4.2	Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023.....	195
Tabel 4.3	Indikator Kinerja PAUD.....	200
Tabel 4.4	Indikator Kinerja SD.....	201
Tabel 4.5	Indikator Kinerja SMP.....	202
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Pendidikan Kesetaraan.....	202
Tabel 4.7	Rincian Anggaran per Program.....	203
Tabel 4.8	Data Personil Bidang Pendidikan Yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024..	205

Tabel 4.9	Target Capaian SPM Urusan Kesehatan	207
Tabel 4.10	Capaian SPM Urusan Kesehatan.....	209
Tabel 4.11	Rincian Anggaran per Program Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.....	229
Tabel 4.12	Data Personil SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024.....	232
Tabel 4.13	Target Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum.....	234
Tabel 4.14	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024.....	234
Tabel 4.15	Dukungan Personil Bidang Pekerjaan Umum	242
Tabel 4.16	Target Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	243
Tabel 4.17	Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024.....	244
Tabel 4.18	Dukungan Personil Bidang Perumahan Rakyat.....	251
Tabel 4.19	Target Capaian SPM Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.	252
Tabel 4.20	Capaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024.....	252
Tabel 4.21	Rekapitulasi Total Anggaran Satpol PP dan WH Kabupaten Nagan Raya.....	260
Tabel 4.22	Data Personil Satpol PP/WH yang terlibat dalam proses Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024	261
Tabel 4.23	Target Capaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah	262
Tabel 4.24	Capaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024.....	263
Tabel 4.25	Data Jumlah Pegawai Pada BPBD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024	272
Tabel 4.26	Target Capaian SPM Urusan Sosial	273
Tabel 4.27	Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024.....	275
Tabel 4.28	Data Personil Bidang Sosial Yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024	290
Tabel 4.28	Program dan Kegiatan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024.....	291

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Nagan Raya	1



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Nagan Raya dengan ibukota Suka Makmue, merupakan salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta diresmikan pada tanggal 2 Juli 2002 oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Nagan Raya yang terletak di wilayah pantai Barat-Selatan Provinsi Aceh memiliki luas wilayah sebesar 3.544,90 Km² (354.491,05 Ha), atau sekitar 6,25% dari luas wilayah Provinsi Aceh. Dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Nagan Raya



Secara Astronomis Kabupaten Nagan Raya terletak pada lokasi 03° 43"5" - 04°37'55" Lintang Utara dan 96°11'23" - 96°47'58" Bujur Timur (BT). Berdasarkan letak geografis dan potensinya, Kabupaten Nagan Raya memiliki posisi yang strategis dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

- a. Wilayah Kabupaten Nagan Raya berada di pantai Barat yang dilalui oleh jalan arteri primer dan jalan kolektor primer sebagai penghubung antar Provinsi.
- b. Wilayah Kabupaten Nagan Raya dilalui juga oleh jalan arteri primer sebagai penghubung antara pantai Barat dengan pantai Timur Provinsi Aceh melalui lintas Tengah Aceh.
- c. Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya Electric Power (NREP) di Kecamatan Kuala Pesisir yang merupakan salah satu pemasok listrik jalur transmisi Sumatera.

Kabupaten Nagan Raya terdiri atas 10 Kecamatan, 222 Desa/Gampong dan 30 Kemukiman meliputi Darul Makmur, Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Beutong, Seunagan, Suka Makmue, SeunaganTimur, Beutong Ateuh Banggalang dan Tripa Makmur.

Tabel 1.1
Luas Kabupaten Nagan Raya Menurut
Wilayah Administratif Pemerintahan Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Darul Makmur	1.027,93
2	Tripa Makmur	189,41
3	Kuala	120,89
4	Kuala Pesisir	76,34
5	Tadu Raya	347,19
6	Beutong	1.017,32
7	Beutong Ateuh Banggalang	405,92
8	Seunagan	56,73
9	Suka Makmue	51,56
10	Seunagan Timur	251,61
Total		3.544,90

Sumber: Kabupaten Nagan Raya dalam Angka 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 didapatkan bahwa Luas wilayah Kabupaten Nagan Raya sebesar 3.554,90 Km² pada Kecamatan Darul Makmur dengan memiliki luas wilayah paling besar daripada kecamatan lainnya, yaitu sebesar 1.027,93 km².

c. Informasi Umum Data Kependudukan

Penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2024 sebanyak 179.108 jiwa, berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 90.325 jiwa laki-

laki (50,36%) dan 88.783 jiwa perempuan (49,63%). Sementara itu angka seks rasio sebesar 102%, ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk laki-laki terdapat 98 penduduk perempuan Rincian penduduk menurut jenis kelamin dalam kecamatan sebagaimana tertera pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dalam Kecamatan

NO	KECAMATAN	PENDUDUK		
		LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	6	7	8
1	KUALA	11.952	11.661	23.613
2	SEUNAGAN	8.315	8.371	16.686
3	SEUNAGAN TIMUR	7.442	7.482	14.924
4	BEUTONG	7.302	7.290	14.592
5	DARUL MAKMUR	26.701	25.816	52.517
6	SUKA MAKMUE	5.134	5.333	10.467
7	KUALA PESISIR	9.407	9.041	18.448
8	TADU RAYA	8.039	7.838	15.887
9	TRIPA MAKMUR	4.942	4.886	9.828
10	BEUTONG ATEUH BANGGALANG	1.091	1.065	2.156
JUMLAH		90.325	88.783	179.108

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari data tersebut, penduduk yang paling banyak bertempat tinggal di Kecamatan Darul Makmur dengan jumlah penduduknya mencapai 52.517 jiwa, dan Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang dengan jumlah penduduk paling sedikit sebanyak 2.156 jiwa.

d. Jumlah Kecamatan dan Gampong

Jumlah Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 10 Kecamatan, Jumlah Gampong definitif di Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2024 mencapai 222 Gampong dan 30 mukim. Kecamatan yang memiliki jumlah Gampong definitif terbanyak adalah Kecamatan Darul Makmur, Seunagan, dan Seunagan Timur dengan jumlah masing-masing Gampong sebanyak 40 Gampong, 35 Gampong, dan 34 Gampong. Data Jumlah Kecamatan dan Gampong dapat dilihat pada tabel 1.3

Tabel 1.3
Jumlah Kecamatan dan Gampong di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

No	Kecamatan	Kemukiman	Jumlah Gampong
1	Darul Makmur	5	40
2	Kuala	2	17
3	Kuala Pesisir	3	16
4	Tadu Raya	2	22
5	Beutong	4	24

No	Kecamatan	Kemukiman	Jumlah Gampong
6	Seunagan	5	35
7	Suka Makmue	2	19
8	Seunagan Timur	4	34
9	Tripa Makmur	2	11
10	Beutong Ateuh Banggalang	1	4
Total		30	222

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Nagan Raya

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Nagan raya dapat dilihat pada Tabel 1.4

Tabel 1.4
Rincian Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

No	Perangkata Daerah	Peraturan Bupati
1	Sekretariat Daerah	No. 40 Tahun 2022
2	Sekretariat DPRK	No. 15 Tahun 2023
3	Inspektorat	No. 11 Tahun 2022
4	Dinas Pendidikan	No. 46 Tahun 2024
5	Dinas Kesehatan	No. 49 Tahun 2024
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	No. 22 Tahun 2023
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	No. 25 Tahun 2023
8	Satuan Polisi Dan Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah	No. 60 Tahun 2016
9	Dinas Sosial	No. 24 Tahun 2024
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	No. 39 Tahun 2024
11	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	No. 42 Tahun 2024
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	No, 14 Tahun 2023
13	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	No. 47 Tahun 2024
14	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pangan	No. 11 Tahun 2023
15	Dinas Pertanian dan Peternakan	No. 48 Tahun 2024
16	Dinas KependudukandDan Pencatatan Sipil	No. 44 Tahun 2024
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	No. 41 Tahun 2024
18	Dinas Lingkungan Hidup	No. 46 Tahun 2023
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan	No. 21 Tahun 2024
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	No. 45 Tahun 2024
21	Dinas Perhubungan	No. 38 Tahun 2024
22	Dinas Perkebunan	No. 45 Tahun 2023
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	No. 36 Tahun 2024
24	Badan Pengelolaan Keuangan	No. 23 Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Peraturan Bupati
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	No. 43 Tahun 2024
26	Dinas Syariat Islam	No. 37 Tahun 2024
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	No. 40 Tahun 2024
28	Rsud Sultan Iskandar Muda	No. 52 Tahun 2024
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	No. 44 Tahun 2023
30	Kantor Sekretariat Kecamatan Darul Makmur	No. 80 Tahun 2016
31	Kantor Sekretariat Kecamatan Tripa Makmur	No. 80 Tahun 2016
32	Kantor Sekretariat Kecamatan Tadu Raya	No. 80 Tahun 2016
33	Kantor Sekretariat Kecamatan Kuala	No. 80 Tahun 2016
34	Kantor Sekretariat Kecamatan Kuala Pesisir	No. 80 Tahun 2016
35	Kantor Sekretariat Kecamatan Suka Makmue	No. 80 Tahun 2016
36	Kantor Sekretariat Kecamatan Seunagan	No. 80 Tahun 2016
37	Kantor Sekretariat Kecamatan Seunagan Timur	No. 80 Tahun 2016
38	Kantor Sekretariat Kecamatan Beutong	No. 80 Tahun 2016
39	Kantor Sekretariat Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang	No. 80 Tahun 2016
40	Sekretarian Majelis Adat Aceh	No. 79 Tahun 2016
41	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	No. 79 Tahun 2016
42	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	No. 79 Tahun 2016
43	Sekretariat Baitul Mal	No. 18 Tahun 2022
44	Dinas Pertanahan	No. 17 Tahun 2029

Sumber: Bagian Organisasi Setdakab Nagan Raya

- f. **Rincian ASN Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah**

Tabel 1.5
Rincian Aparatur Sipil Negara

No	Perangkat Daerah	RINCIAN ASN			Total
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5	5	11	21
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10		9	19
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5	20	9	34
4	Badan Pengelola Keuangan Daerah	7	13	37	57
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11	12	21	44
6	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	7	5	9	21
7	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pangan	6	8	13	27
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	7	10	22
9	Dinas Kesehatan	21	1	74	96
10	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	5	6	7	18
11	Dinas Lingkungan Hidup	5	7	12	24
12	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	8	12	47	67

13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan	6	7	14	27
14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	9	5	17
15	Dinas Pendidikan	7	7	90	104
16	Dinas Perhubungan	4	7	10	21
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	8	9	10	27
18	Dinas Perkebunan	5	5	15	25
19	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5	7	10	22
20	Dinas Pertanahan	8		5	13
21	Dinas Pertanian Dan Peternakan	10	83	22	115
22	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	6	4	15	25
23	Dinas Sosial	7	6	5	18
24	Dinas Syari'at Islam	12		9	21
25	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6	9	7	22
26	Inspektorat	4	22	16	42
27	Kecamatan Beutong	8		25	33
28	Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang	7		6	13
29	Kecamatan Darul Makmur	9		21	30
30	Kecamatan Kuala	8		15	23
31	Kecamatan Kuala Pesisir	5		18	23
32	Kecamatan Seunagan	7		14	21
33	Kecamatan Seunagan Timur	8		14	22
34	Kecamatan Suka Makmue	5		13	18
35	Kecamatan Tadu Raya	7		10	17
36	Kecamatan Tripa Makmur	5		5	10
37	Rsud Sultan Iskandar Muda	6	4	21	31
38	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wh	8		14	22
39	Sekretariat Baitul Mal	4		4	8
40	Sekretariat Daerah	15	32	35	82
41	Sekretariat Dprk Kabupaten	5	5	21	31
42	Sekretariat Majelis Adat Aceh	3		2	5
43	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	2		6	8
44	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	3		4	7
Total		301	312	740	1353

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Nagan Raya

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.285.445.081.865,85 dengan realisasi sebesar Rp 1.183.399.831.398,43 atau sebesar 92,06% adapun Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 1.299.793.400.077,00 sampai dengan akhir Desember 2024 target itu dapat direalisasikan sebesar 1.177.281.862.805,12 atau sebesar 90,57%.

Tabel 1.6
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pendapatan Daerah	1.285.445.081.865,85	1.183.399.831.398,43	92,06
2.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	108.884.846.318,38	98.949.167.333,43	90,88
3.	Pendapatan Transfer	1.168.595.819.348,00	1.077.231.578.702,00	92,18
4.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.964.416.199,00	7.219.085.363,00	90,64
5.	Belanja Daerah	1.299.793.400.077,00	1.177.281.862.805,12	90,57
6.	Belanja Operasi	888.512.506.444,00	814.383.574.823,55	91,66
7.	Belanja Modal	149.567.538.690,00	125.640.000.722,57	84,00
8.	Belanja Tidak Terduga	9.283.424.513,00	3.821.570.584,00	41,17
9.	Belanja Transfer	252.429.930.430,00	233.436.716.675,00	92,48

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Nagan Raya

h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib Pelayanan Dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Urusan wajib Pelayanan Dasar tersebut meliputi 6 urusan meliputi; pertama urusan Pendidikan, yang kedua Kesehatan, ketiga adalah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, selanjutnya keempat urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan yang kelima urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat serta yang terakhir adalah urusan Sosial dengan rincian sebagai berikut:

A. Pendidikan

Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan bidang pendidikan adalah tercapainya struktur jumlah sekolah SD dan SLTP yang ideal, tercapainya rasio siswa antar tingkat pendidikan yang ideal, meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatkan relevansi pendidikan dengan dunia kerja, dan meningkatnya kenyamanan dalam proses belajar mengajar serta meningkatnya pengawasan dan manajemen sekolah.

Lebih lanjut, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.7
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
A. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		64.495.164.655	50.691.231.122,21
	Belanja Operasi	38.542.184.671	28.336.663.121,00
	Belanja Modal	25.952.979.984	22.354.568.001,21
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	33.333.359.599	30.114.165.336,36
	Belanja Operasi	18.876.182.265	16.484.009.248,00
	Belanja Modal	14.457.177.334	13.630.156.088,36
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	21.253.554.833	16.879.914.458,85
	Belanja Operasi	12.944.154.441	9.519.715.113,00
	Belanja Modal	8.309.400.392	7.360.199.345,85
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.721.847.965	2.332.938.760
	Belanja Operasi	5.010.876.272	1.755.719.490,00
	Belanja Modal	3.181.796.258	1.360.212.567,00
4	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	1.715.577.693	581.219.270
	Belanja Operasi	1.710.971.693	577.219.270,00
	Belanja Modal	4.606.000	4.000.000,00
B. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		9.083.629.360	7.253.382.000,00
	Belanja Operasi	9.083.629.360	7.253.382.000,00
	Belanja Modal	0	0
1.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.083.629.360	7.253.382.000,00
	Belanja Operasi	9.083.629.360	7.253.382.000,00
	Belanja Modal	0	0
C. PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH		2.753.541.984	2.175.433.468,00
	Belanja Operasi	2.753.541.984	2.175.433.468,00
	Belanja Modal	0	0
1.	Pengelolaan Pendidikan Dayah	2.753.541.984	2.175.433.468,00
	Belanja Operasi	2.753.541.984	2.175.433.468,00
	Belanja Modal	0	0

B. Kesehatan

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah diselenggarakan, yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular, meningkatkan kesadaran diri keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi, balita serta usia produktif, serta meningkatkan peran serta masyarakat dan tokoh agama dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut perlu dilaksanakan program-program pembangunan kesehatan secara sistematis dan berkesinambungan. Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Kabupaten Nagan Raya. Program dan kegiatan selama tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.8
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	73.430.930.098	70.533.516.945
	Belanja Operasi	72.980.930.098	70.210.086.945,00
	Belanja Modal	450.000.000	323.430.000,00
B.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	48.412.086.094	39.926.136.831,48
	Belanja Operasi	37.495.167.189	32.586.628.181,48
	Belanja Modal	10.916.918.905	7.339.508.650,00
C.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4.757.152.750	2.020.619.423
	Belanja Operasi	4.718.552.750	2.020.619.423
	Belanja Modal	38.600.000	0,00
D.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	301.033.000	286.754.500,00
	Belanja Operasi	301.033.000	286.754.500,00
	Belanja Modal	0	0
E.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.829.659.600	708.443.260,00

	Belanja Operasi	2.829.659.600	708.443.260,00
	Belanja Modal	0	0
F.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	90.372.694.444	81.953.294.640
	Belanja Operasi	89.152.606.574	81.191.204.131,00
	Belanja Modal	1.220.087.870	762.090.509,00
G.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	28.013.062.344	22.351.780.432,00
	Belanja Operasi	1.572.782.249	1.570.547.679,00
	Belanja Modal	26.440.280.095	20.781.232.753,00
H.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.439.012.872	1.153.447.217,00
	Belanja Operasi	1.439.012.872	1.153.447.217,00
	Belanja Modal	0	0

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Program dan kegiatan pada urusan pekerjaan umum lebih dititik beratkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Tabel 1.9
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.954.198.789	8.232.143.862
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.898.244	4.898.222,00
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.790.045.959	5.597.179.332,00
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	166.861.420	162.361.314,00
	d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	958.478.870	956.278.155,00
	e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	213.120.000	0,00
	f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	801.315.740	684.429.841,00
	g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.019.479.556	826.996.998,00
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	36.236.205.204	30.661.159.580

No	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
	a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.245.723.521	26.163.704.843
	b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.990.481.683	4.497.454.737

3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	71.161.922.563	62.423.273.708,55
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	71.161.922.563	62.423.273.708,55
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.218.423.041	2.053.748.065,00
	a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.080.274.330	1.078.804.301,00
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	221.149.950	71.100.000,00
	c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	345.598.761	345.597.764,00
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.126.251.542	4.011.859.151,02
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.126.251.542	4.011.859.151,02
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.070.069.675	7.019.927.490,00
	a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.070.069.675	7.019.927.490,00
7.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	700.000.000	645.983.661,00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000	645.983.661,00
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	30.000.000	30.000.000,00

	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	30.000.000,00
9.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYADRAINASE	5.440314.012	3.727.637.423
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	5.440314.012	3.727.637.423

D. Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satpol PP dan WH. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.10
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.211.101.846	1.071.872.484,00
	a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	495.221.846	475.022.046,00
	b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	215.180.000	213.970.438,00
	c. Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Aceh	500.700.000	382.880.000,00

E. Sosial

Program Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Adapun Program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.11
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2024

No	Program /Kegiatan	Anggaran	Realiasi
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	6.337.277.159	4.893.779.958,00
	a Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	5.894.927.859	4.516.342.246,00
	b Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	442.349.300	377.437.712,00
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	387.409.800	383.346.450,00
	a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	387.409.800	383.346.450,00

2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan wajib Pelayanan Dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Urusan wajib tersebut meliputi 17 urusan meliputi Urusan Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olahraga, Statistik, Persandian, Kebudayaan dan Perpustakaan dengan rincian sebagai berikut:

A. Tenaga Kerja

Kebijakan pembangunan ketenagakerjaan adalah mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh melalui peningkatan lapangan usaha produktif dan terpadu untuk mengurangi tingkat pengangguran, serta diarahkan pada kompetensi, kemandirian, peningkatan produktivitas, peningkatan upah, penjaminan kesejahteraan, perlindungan pekerja dan kebebasan berserikat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan ini adalah:

Tabel 1.12
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	705.500.160	696.498.600
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	705.500.160	696.498.600

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Arah kebijakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, peningkatan kualitas anak dan perlindungan perempuan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyediaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), dan peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan produksi.

Tabel 1.13
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	442.893.007	441.618.828,00
	a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	14.609.330	14.247.330,00
	b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	128.059.470	128.035.237,00
	c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	300.224.207	299.336.261,00
2.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	320.880.916	216.533.784,00
	a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	204.286.916	156.717.784,00
	b. Penyediaan Layanan Rujukan	90.844.000	34.066.000,00

	Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota		
	c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.750.000	25.750.000,00
3.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	379.696.660	337.941.900,00
	a. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	277.702.064	236.829.505,00
	b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	101.994.596	101.112.395,00
4.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	83.698.000	80.291.000,00
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	83.698.000	80.291.000,00
5.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	299.690.871	199.840.471,00
	a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	111.724.871	99.152.071,00
	b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	144.636.000	57.418.400,00
	c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.330.000	43.270.000,00

C. Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Nagan Raya melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.14
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1.	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	13.704.623	10.904.623,00
	Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi	13.704.623	10.904.623,00
2.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	78.152.046	78.150.381,00
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	78.152.046	78.150.381,00
3.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	79.987.267	74.737.267,00
	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	79.987.267	74.737.267,00
4.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	30.589.900	10.435.900,00
	Penerbitan Izin Membuka Tanah	30.589.900	10.435.900,00
5.	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	209.605.506	209.605.506,00
	Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah	209.605.506	209.605.506,00

D. Pangan

Sasaran pembangunan bidang ketahanan pangan adalah meningkatnya ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan, yang dipresentasikan oleh konsumsi energi Penduduk Nagran Raya dengan kontribusi untuk masing-masing bahan kelompok pangan, terwujudnya stabilitas harga pangan antar wilayah dan antar waktu, meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan, mengeleminir kondisi rawan pangan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan ketahanan pangan 2024 dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan serta Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagran Raya sebagai berikut:

Tabel 1.15
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2024

No	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi Anggaran
1.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	886.703.700	884.984.893,00
	a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	829.671.593	828.658.993,00
	b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	57.032.107	56.325.900,00
2.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	11.630.877	11.579.015,00
	a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	8.270.877	8.219.015,00
	b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	3.360.000	3.360.000,00
3.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	8.018.618	8.018.618,00
	a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	8.018.618	8.018.618,00

E. Lingkungan Hidup

Kebijakan pembangunan bidang Lingkungan Hidup tahun 2024 di kabupaten Nagan Raya, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan dan keanekaragaman hayati, Penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (aparatur pemerintah dan masyarakat) dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Untuk mencapai kebijakan pembangunan tersebut, telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.16
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.516.923.501	2.225.890.777

No	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
	a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.097.800.741	1.078.026.640
	b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.245.597.380	974.814.318
	c. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	173.525.380	173.049.819,00
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	100.000.000	98.514.110,00
	a. Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100.000.000	98.514.110,00
3.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	253.106.513	218.336.720
	a. Penyimpanan sementara Limbah B3	237.778.913	203.045.000
	b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.327.600	15.291.720,00
4.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	506.974.035	497.430.488
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	506.974.035	497.430.488
5.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	53.200.000	53.187.800,00
	Pengelolaan Sampah	53.200.000	53.187.800,00

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2024 dilaksanakan program penataan administrasi kependudukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.17
Realisasi Program dan Kegiatan
Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	21.369.000	21.368.300,00
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	21.369.000	21.368.300,00
2.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	31.704.250	31.704.250,00
	Pelayanan Pencatatan Sipil	31.704.250	31.704.250,00
3.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	135.453.345	135.336.615,00
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	11.410.931	11.299.770,00
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	124.042.414	124.036.845,00
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	39.999.833	39.667.440,00
	Penyusunan Profil Kependudukan	39.999.833	39.667.440,00

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan. Adapun Program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.18
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	737.017.000	718.531.170,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	737.017.000	718.531.170,00

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 1.19
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.092.389.598	6.055.008.498
a.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	3.108.625	2.229.793.594
b.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.686.639.959	2.542.766.591,00
c.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	849.875.400	839.019.635
d.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	447.248.719	444.248.678,00

I. Perhubungan

Kebijakan sektor perhubungan diarahkan pada terciptanya transportasi yang handal, aman, nyaman, manusiawi dan ramah lingkungan dengan mengarahkan kebijakan dan program pembangunan bidang perhubungan antara lain pada penciptaan pelayanan transportasi yang sesuai dengan standar nasional, peningkatan kesadaran pengguna (masyarakat) tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas serta penggunaan moda transportasi, meningkatkan kualitas pelayanan angkutan dan keterpaduan antar moda dan efisiensi dalam mendukung aksesibilitas dan mobilitas, serta meningkatkan SDM yang profesional dalam pengelolaan perhubungan. Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perhubungan adalah:

Tabel 1.20
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	652.138.000	502.124.000,00
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	652.138.000	502.124.000,00
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	33.417.053	33.416.859,00
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota	33.417.053	33.416.859,00

J. Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah:

Tabel 1.21
Realisasi Program dan Kegiatan
Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.196.292.509	1.116.279.045
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.196.292.509	1.116.279.045
2.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	86.932.500	81.882.500
a.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	53.779.500	48.749.500
b.	Pengelolaan E government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	33.153.000	33.133.000

K. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kebijakan pembangunan Koperasi dan UKM sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah meningkatkan pembinaan SDM pengusaha melalui pendidikan dan pelatihan agar kelompok usaha mikro dan kecil ini dapat meningkatkan daya saing di pasar lokal, nasional maupun internasional; meningkatkan akses terhadap dana murah oleh usaha mikro dan kecil, menengah dan koperasi; meningkatkan jumlah dan kualitas pengusaha menengah yang tangguh yang berasal dari peningkatan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah, yang berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah; fasilitasi kemitraan usaha antara pengusaha besar, menengah dan kecil serta koperasi yang saling mendukung dan saling menguntungkan; menyediakan bantuan asuransi kredit bagi Koperasi dan UKM yang sudah mendapatkan akses ke perbankan; pembangunan meningkatkan peran lembaga pemasaran (*trading house*) untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan mikro; mengembangkan produksi bersama (*common service facilities*) di sentra-sentra produksi kerajinan rakyat yang dilaksanakan dalam skala mikro dan rumah tangga; dan pemberdayaan lembaga keuangan mikro non bank sebagai wujud pengembangan ekonomi kerakyatan.

Tabel 1.22
Realisasi Program dan Kegiatan
Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	11.746.900	11.746.900,00
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	11.746.900	11.746.900,00
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	603.280.000	570.000.000,00
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	603.280.000	570.000.000,00
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	281.037.724	279.040.250,00
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	281.037.724	279.040.250,00

4.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	500.590.066	490.100.050,00
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	500.590.066	490.100.050,00
5.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	914.954.685	906.294.534,00
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	914.954.685	906.294.534,00
6.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	50.000.000	49.981.050,00
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	49.981.050,00

L. Penanaman Modal

Sasaran yang hendak dicapai dalam pengembangan penanaman modal adalah harmonisasi, sinkronisasi, dan simplifikasi berbagai kebijakan, penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur penyederhanaan proses perizinan investasi sehingga dapat memperlancar proses penanaman modal, tercukupinya pasokan energi yang dibutuhkan untuk kegiatan investasi, serta mendorong pelaksanaan alih teknologi dalam setiap kegiatan investasi. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan penanaman modal sebagai berikut:

Tabel 1.23
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun 2024

No	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	59.131.415	57.275.295,00
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	59.131.415	57.275.295,00
2.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	575.036.000	573.246.000
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	575.036.000	573.246.000
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	3.431.200	0,00

	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.431.200	0,00
--	---	-----------	------

M. **Kepemudaan dan Olah Raga**

Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2024 dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga. Sasaran dan arah kebijakan kepemudaan dan olahraga adalah peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan serta peningkatan budaya dan prestasi olahraga. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut

Tabel 1.24
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.681.281.639	1.619.834.185
	a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.090.000.000	1.031.696.440
	b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	591.281.693	588.137.745,00
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.493.451.771	3.952.411.671
	a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.981.250.360	1.925.614.331
	b. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	148.858.507	141.672.717,00
	c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.363.342.904	1.885.124.623,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	47.844.919	47.837.700,00
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	716.220.802,00	709.514.241,00

N. **Statistik**

Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Adapun Program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.25
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Statistik Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	113.988.815	113.946.130,00
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	113.988.815	113.946.130,00

O. Kebudayaan

Program Budaya dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Adapun Program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.26
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Budaya Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	154.135.000	153.690.900,00
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	154.135.000	153.690.900,00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	94.970.687	94.893.687
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	94.970.687	94.893.687
3	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	618.000.000	0
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	618.000.000	0

P. Perpustakaan

Program Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Nagan Raya. Adapun Program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.27
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.328.995.200	1.288.132.623
	a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	924.829.200	890.541.708
	b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	404.166.000	397.590.915
2	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	62.318.000	54.660.000,00
	a. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	27.411.800	21.417.800,00
	b. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh	34.906.200	33.242.200,00

No.	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		

3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

Urusan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan pilihan yang diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Urusan pilihan terdiri dari urusan kelautan dan perikanan, urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan energi dan sumberdaya mineral, urusan pariwisata, urusan industri, urusan perdagangan, dan urusan ketransmigrasian.

1. Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan, Adapun Anggaran dan Realisasi Program dan kegiatan yang Kelautan dan Perikanan selama tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 1.28
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan 2024

No.	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	18.480.000	18.480.000
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	18.480.000	18.480.000
2.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	440.355.439	423.517.363,00
	a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	368.784.046	352.407.970,00
	b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	22.123.551	21.700.851,00
	c. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	42.743.600	42.704.300,00
	d. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.704.242	6.704.242,00
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.061.719.605	3.015.342.727

	a. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	17.723.648	10.686.648,00
	b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	4.043.995.957	3.004.656.079

2. Pariwisata

Kebijakan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Untuk mencapai hal tersebut, pada tahun 2024 telah dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.29
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	535.000.000	516.049.669,00
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	535.000.000	516.049.669,00
2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	400.000.000	400.000.000
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	400.000.000	400.000.000

3. Pertanian

Urusan pertanian dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan Dan Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya. Secara spesifik sasaran pembangunan pertanian yang ingin dicapai pada 2024 pada masing-masing sub sektor adalah :

- a. Pembangunan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura
 - Meningkatnya pengembangan komoditi melalui revitalisasi perbenihan komoditi pangan.
 - Peningkatan produksi berbagai komoditi utama dibanding periode sebelumnya dengan memperhatikan kenaikan pertahunnya.
- b. Pembangunan perkebunan
 - Peningkatan jumlah areal perkebunan dari masing-masing komoditi, terutama komoditi terbesar yaitu kelapa sawit dan karet. Peningkatan jumlah produksi dan produktivitas komoditas perkebunan.
 - Peningkatan pendapatan petani perkebunan.
- c. Pembangunan peternakan. Sasaran pembangunan peternakan adalah peningkatan produktivitas peternakan yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah populasi dan produksi komoditas peternakan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.30
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Pertanian Tahun 2024

No	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	21.872.674.676	19.089.862.706
	a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	7.059.499	7.056.270,00
	b. Pengembangan Prasarana Pertanian	769.348.500	769.348.500,00
	c. Pembangunan Prasarana Pertanian	9.981.218.909	9.549.317.758,07
	d. Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	2.599.790.000	2.525.057.990,00
	e. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	144.999.000	144.999.000,00
	f. Pengembangan Prasarana Pertanian	159.038.118	127.496.518,00
	g. Pembangunan Prasarana Pertanian	4.026.091.266	2.919.545.076,00
2.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	54.800.000	54.800.000,00
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	54.800.000	54.800.000,00
3.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	525.640.000	443.872.632,00
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	525.640.000	443.872.632,00
3.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.974.285.206	767.197.289
	a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	175.880.975	175.854.131,00
	b. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.798.404.231	591.343.158,00

4. Perdagangan

Urusan Perdagangan dilaksanakan Oleh OPD Dinas Perindustrian Perdagangan, Perkoperasian dan UKM, adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2024 adalah:

Tabel 1.31
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Perdagangan Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.541.550.863	1.528.997.063,00
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.541.550.863	1.528.997.063,00
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN	1.264.400.000	1.262.738.300,00

	BARANG PENTING		
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1.264.400.000	1.262.738.300,00
3	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	189.636.711	187.293.162,00
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	189.636.711	187.293.162,00

5. Industri

Urusan Industri dilaksanakan Oleh OPD Dinas Perindustrian Perdagangan, Perkoperasian dan UKM, adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2024 adalah:

Tabel 1.32
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Perindustrian Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	914.954.685	906.294.534,00
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	914.954.685	906.294.534,00
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	50.000.000	49.981.050,00
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	49.981.050,00

6. Transmigrasi

Urusan Transmigrasi dilaksanakan Oleh OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun 2024 adalah:

Tabel 1.33
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pilihan Transmigrasi Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	328.600.911	280.879.611,00
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	328.600.911	280.879.611,00
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	13.523.212	13.523.212,00
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	13.523.212	13.523.212,00

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Usuran Pemerintahan Fungsi Penunjang adalah urusan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam rangka menunjang pelayanan urusan wajib dan urusan pilihan, Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang meliputi 5 urusan meliputi Urusan Administrasi Pemerintahan, Pengawasan, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian dengan rincian sebagai berikut:

a. Administrasi Pemerintahan

Kebijakan yang ditetapkan pada urusan Admnistrasi Pemerintahan antara lain pembinaan kompetensi PNS berdasarkan mekanisme merit system, yaitu menerapkan azas profesionalitas, transparan, tanpa mekanisme KKN, dan tidak diskriminatif, penerapan prinsip good governance, peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya, peningkatan sarana dan prasarana pendukung aparatur pemerintahan Kabupaten Nagan Raya, pengembangan situasi yang kondusif wilayah (penyelesaian tapal batas), penyusunan Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, serta peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah. Program dan kegiatan pada urusan ini dilaksanakan oleh OPD Sekretariat Daerah Kabupaten, dengan rincian program, dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.34
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Administrasi Pemerintahan Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.909.664.214	1.836.550.247
	a. Administrasi Tata Pemerintahan	827.604.981	799.902.472
	b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	500.604.550	463.455.366
	c. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	666.021.483	657.349.175
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	25.042.989.902	22.379.239.735
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.568.635	28.822.154,00
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.503.508.553	9.749.858.329,00
	c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.503.508.553	9.749.858.329,00
	d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	267.059.077	231.294.200,00
	e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.089.480.129	4.868.852.530
	f. Pengadaan Barang Milik Daerah	449.350.595	397.247.075.

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.504.865.480	2.827.937.122,00
	h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.365.936.400	2.491.145.781
	i. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	129.158.000	129.126.532,00
	j. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	881.617.166	846.129.240
	k. Penataan Organisasi	289.591.053	277.539.700,00
	l. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	532.854.814	531.287.072,00

b. Pengawasan

Urusan Pengawasan dilaksanakan oleh OPD Inspektorat, dengan rincian program, dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.35
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pengawasan Tahun 2024

No.	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.730.466.990	1.617.024.314,00
	a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.455.741.165	1.369.527.289,00
	b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	274.725.825	247.497.025,00

c. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Perencanaan pembangunan daerah yang disusun akan menjadi referensi dalam melaksanakan aktivitas. Dengan demikian keberhasilan pencapaian suatu tujuan akan sangat tergantung pada baik buruknya perencanaan yang disusun dan sejauh mana perencanaan tersebut dapat diimplementasikan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan urusan pembangunan adalah:

Tabel 1.36
Realisasi Program dan Kegiatan
Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.013.726.554	2.669.941.590
	a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.794.598.825	1.738.733.438
	b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	319.325.600	319.325.600,00
	c. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	899.802.129	611.882.552.
2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.367.629.731	1.257.045.814,00
	a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	776.298.618	744.217.805,00
	b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	218.730.386	205.534.730,00
	c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	372.600.727	307.293.279,00
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.575.222.917	1.531.319.497
	a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	714.706.535	702.368.310,00
	b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	307.331.823	287.453.485
	c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	553.184.559	541.497.702,00
4.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.367.629.731	1.257.045.814,00
	a. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	776.298.618	744.217.805,00
	b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	218.730.386	205.534.730,00

No	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
	c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	372.600.727	307.293.279,00

d. Keuangan

Urusan Keuangan pada tahun 2024 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.37
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Keuangan Tahun 2024

No	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.134.432.898	4.722.933.796,00
	a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.358.350.489	2.151.400.652,00
	b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.692.360.562	1.498.852.504,00
	c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.041.557.303	1.032.583.997,00
	d. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	42.164.544	40.096.643,00
	e. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0
2	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.478.587.730	1.145.131.696
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.478.587.730	1.145.131.696
3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.332.007.791	1.164.034.512,00
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.332.007.791	1.164.034.512,00

e. Kepegawaian

Urusan Kepegawian pada tahun 2024 dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia (BKPSDM), adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.38
Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kepegawaian Tahun 2024

No	Program Kegiatan	Anggaran 2024	Realisasi
1.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.038.709.022	882.137.027,00
	a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	324.822.530	288.626.770,00
	b. Mutasi dan Promosi ASN	310.643.275	287.606.915,00
	c. Pengembangan Kompetensi ASN	156.567.068	154.567.068,00
	d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	246.676.149	151.336.274,00

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Nagan Raya dalam 5 tahun terakhir menunjukkan arah yang positif. Namun demikian, masih diperlukan upaya perbaikan dan penyempurnaan melalui akselerasi atau percepatan proses pembangunan daerah yang lebih terarah. Sasaran pembangunan yang ingin dicapai selama ini telah diupayakan secara optimal, namun demikian belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan yang ada. Berbagai kendala masih dihadapi oleh pemerintah daerah baik dikarenakan kompleksitas permasalahan dan isu-isu strategis yang mengemuka, juga disebabkan oleh terbatasnya anggaran pembangunan yang tersedia.

Salah satu permasalahan yang paling penting yaitu pelaksanaan kehidupan berdemokrasi diantaranya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu dan pilkada. Jumlah pemilih Nagan Raya yang memiliki hak suara pada pemilu 2019 adalah 120.805 pemilih, dan pengguna hak pilih 102.983 pemilih dengan persentase sebesar 85,23 persen. Jumlah ini lebih tinggi dari Provinsi Aceh sebesar 79,7 persen dan partisipasi nasional sebesar 81,69 persen. Untuk itu perlu adanya upaya dalam peningkatan penggunaan hak pilih di Kabupaten Nagan Raya agar lebih maksimal.

Dilandasi oleh pertimbangan di atas, maka program yang dirancang didalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya untuk periode tahun 2023-2026 hendaknya mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

1) Peningkatan Kualitas Demokrasi

Kabupaten Nagan Raya salah satu juga Kabupaten berada dibawah Pemerintah Aceh sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, akan menghadapi Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu menyiapkan pendanaan yang mencukup dan fasilitas yang memadai. Di samping itu Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga perlu mendorong pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang adil, transparan dan bebas money politic dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan keterwakilan perempuan dalam pesta demorasi tersebut.

2) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Masih terdapat hal-hal yang berkaitan dengan masih kurangnya kemampuan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membangun profesionalisme, kompetensi, dan integritas aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dengan meningkatkan moral, kejujuran, dan ketulusan dalam bekerja;
- b. Meningkatkan pelayanan publik atau pelayanan umum yang bersifat responsif/aktif;
- c. Penguatan penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan praktik goodand clean governance mencakup penguatan gerakan anti korupsi, transparansi, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), penguatan audit internal, dan partisipasi masyarakat madani dalam membangun rasa memiliki dan bertanggung jawab;
- d. Penguatan azas akuntabilitas berupa pertanggung jawaban pejabat publik terhadap masyarakat dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan Penguatan manajemen sistem informasi yang meliputi: pengelolaan database dan monitoring dan pengendalian

3) Pelaksanaan Syariat Islam dan Keistimewaan Aceh

Dalam hal pelaksanaan penerapan syariat Islam, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan membaca Al-Quran di kalangan anak anak, orang dewasa dan lanjut usia diupayakan melalui kegiatan berupa kelompok pengajian membaca Al Quran

dengan memberdayakan balai-balai dan meunasah pada setiap gampong. Mengoptimalkan peran ulama dalam pembangunan dan peningkatan SDM tentang syariat Islam juga penting dalam mempengaruhi minat belajar Al quran dan ilmu agama di kalangan masyarakat. Upaya ini dilakukan bersamaan dengan peningkatan pelatihan dan pemberian beasiswa dalam ikhtiar mencetak ulama di lembaga pendidikan yang ada. Selanjutnya, kegiatan dan event-event islami yang masih kurang pembinaannya selama ini perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, ketersediaan pendanaan yang memadai perlu disediakan oleh pemerintah daerah, baik melalui APBK maupun sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Disamping itu, perhatian terhadap peningkatan minat pemuda dalam pemahaman syariat Islam penting diberikan. Untuk hal tersebut, peran pemuda dalam pelaksanaan syariat Islam perlu dibina dengan baik terutama melalui pemberdayaan karang taruna yang ada serta sosialisasi dan pembinaan pemuda tentang bahaya aliran sesat. Secara bersamaan, penting juga diberikan perhatian terhadap keberadaan regulasi yang berkaitan dengan kelengkapan instrumen hukum/pembinaan tentang penguatan syariat Islam (narkoba, hari besar Islam, waktu shalat, waktu adzan, pakaian, olahraga, pertunjukan kesenian dan rekreasi). Pembentukan instrumen hukum ini dinilai sangat penting dalam rangka penguatan implementasi syariat Islam di daerah Nagan Raya.

Penanganan perdamaian yang masih menyisakan pekerjaan rumah adalah pemberdayaan ekonomi, terutama janji penyediaan lahan. Umumnya penyediaan lahan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada mantan kombatan/tapol napol dan korban konflik hanya berupa pembagian lahan tanpa adanya legalitas (pengurusan sertifikat tanah) dan tidak diikuti dengan program pengembangan ekonomi yang konkrit. Sebahagian dari tanah yang dibagi tersebut masih berupa kawasan hutan produksi atau hutan produksi terbatas yang masih membutuhkan proses yang panjang sehingga dapat dimanfaatkan. Begitu halnya mengenai Bidang Keistimewaan, Syariat Islam dan Perdamaian Aceh, dengan tujuan untuk memantapkan sistem pendidikan dayah, Kelanjutan program reintegrasi serta Kelanjutan program kelembagaan asimetris.

4) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Isu pelayanan pendidikan yang berkualitas di tujukan untuk meningkatkan aksesibilitas sektor pendidikan dasar dan menengah keseluruh lapisan masyarakat. Dengan meningkatnya aksesibilitas sektor pendidikan diharapkan dapat menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni, dan angka melek huruf. Disamping itu dalam rangka mencapai pelayanan pendidikan yang

berkualitas juga dapat dilakukan dengan pemerataan guru, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan termasuk peningkatan kompetensi, sertifikasi, dan kualifikasi tenaga pendidikan. Isu ini juga diarahkan kepada upaya untuk mewujudkan pendidikan vokasional yang unggul dan berdaya saing.

Berkaitan dengan upaya peningkatan literasi masyarakat, dapat dilakukan dengan optimalisasi fasilitas dan pelayanan pustaka daerah maupun gampong. Selain itu juga dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan promosi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu kunci penting untuk meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Nagan Raya. Layanan pendidikan yang baik dan layak akan memotivasi dan memudahkan masyarakat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga berdampak pada perbaikan kualitas SDM. Dengan modal keterampilan yang tinggi akan memperbesar peluang mereka meraih kesempatan kerja dalam dunia kerja. Peningkatan peran skill development center (SDC) perlu terus didorong untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan dapat diterima di pasar tenaga kerja. Selain itu, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu menjadi fokus dalam peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia.

5) Penanggulangan Kemiskinan/Kemiskinan Ekstrem

Kabupaten Nagan Raya masih mengalami masalah tingginya angka kemiskinan. Angka kemiskinan di kabupaten ini berada di atas rata-rata angka nasional dan rata-rata Aceh. Selain persentase kemiskinan yang tinggi, Kabupaten Nagan Raya juga harus memastikan terpenuhinya layanan dasar, jaminan dan perlindungan sosial, serta meningkatkan pendapatan masyarakat minimal di atas garis kemiskinan ekstrem (setara 1,9 USD) per hari.

Sarana dan prasarana pertanian dan perikanan termasuk pasar rakyat dan pasar induk perlu dioptimalkan serta dikembangkan. Hal ini penting untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

Pendekatan untuk menangani persoalan dan sasaran di atas bersifat menyeluruh dan multi sektoral. Dalam hal ini beberapa kebijakan dapat ditempuh antara lain seperti penciptaan iklim usaha yang kondusif dan prospektif, sehingga kegiatan pembangunan dapat berlangsung dan diarahkan lebih bersifat intensif tenaga kerja (labor intensive) di masing-masing sektor baik langsung maupun tidak langsung. Disamping itu, kebijakan sektoral juga ditempuh untuk meningkatkan nilai tukar petani. Dalam konteks ini, proses perencanaan dan pelaksanaan usaha yang berorientasi perluasan kesempatan kerja terus diupayakan, khususnya di daerah-daerah padat penduduk, miskin, dan juga di daerah-

daerah pemukiman baru.

Upaya penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan keahlian dan pengembangan sarana pendukung usaha serta akses permodalan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Dengan upaya ini diharapkan dapat mendorong masyarakat miskin keluar dari kemiskinan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

6) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Dalam bidang kesehatan difokuskan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan fasilitas kesehatan, kualitas, dan kuantitas tenaga kesehatan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung sarana dan prasarana yang ada termasuk lingkungan serta mempertimbangkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Melalui penanganan isu strategis ini, maka pelayanan kesehatan diharapkan mampu menjangkau semua lapisan masyarakat secara berkualitas, terukur, dan akuntabel. Pemasalahan yang masih ditemui antara lain adalah masih adanya angka kematian bayi sekitar 12/1000 kelahiran dan terjadinya kematian balita 13/1000 bayi yang hidup. Disamping itu, masih ada jumlah bayi ber gizi buruk sekitar 16/1000 bayi. Untuk itu, permasalahan ini harus mampu ditekan sekecil mungkin dan seoptimal mungkin dapat diiadakan. Isu stunting juga mesti diberikan perhatian mengingat angka stunting di Nagan Raya masih 27,17 persen, atau melebihi angka nasional yang hanya 20,0 persen. Sementara itu, jumlah puskesmas dan posyandu sudah memadai dengan ratio 1 : 78. Namun, yang harus dioptimalkan adalah peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan dan obat-obatan.

Masih tingginya kasus stunting memberikan implikasi buruk terhadap pembangunan dan kemajuan di Kabupaten Nagan Raya. Stunting mengancam kualitas dan produktivitas sumber daya manusia (SDM). Anak-anak yang stunting rentan diserang oleh berbagai penyakit, sehingga akhirnya dapat menurunkan perkembangan daya saing SDM. Intervensi untuk menurunkan angka Stunting dilakukan secara terintegrasi dengan fokus pada upaya percepatan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi stunting terintegrasi. Ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat pencapaian penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Nagan Raya. Pelaksanaan intervensi penurunan stunting juga merupakan bagian dari isu strategis nasional yang intinya untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, kreatif dan produktif.

7) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Produksi Pertanian, Perkebunan dan Perikanan serta Pengelolaan UMKM, Pengembangan Agrobisnis dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Kabupaten Nagan Raya

Perkembangan perekonomian di Nagan Raya dapat dilihat melalui laju pertumbuhan PDRB. dalam kurun waktu 2017-2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, meskipun sedikit berfluktuasi. Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Nagan Raya dengan kontribusi mencapai 44,99% dari total PDRB, meskipun perannya terus cenderung menurun. Hal ini terlihat dari tren pertumbuhan PDRB sector pertanian yang menurun dari 6,1% pada tahun 2017 menjadi 1,99% di tahun 2021. Kebijakan- kebijakan pemerintah kabupaten, terkait penetapan dan pengembangan sektor unggulan yang selalu mampu memacu pertumbuhan ekonomi pada trend yang positif sangat diperlukan. Dalam menciptakan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peran pemerintah sangat besar dalam memberikan kontribusi dengan suatu kebijakan untuk mengalokasikan pengeluaran pemerintah dengan memprioritaskan sektor pertanian sebagai sektor unggulan, dimana peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembiayaan pembangunan pada sektor pertanian memungkinkan pertumbuhan ekonomi daerah meningkat dan secara tidak langsung akan mempengaruhi pendapatan penduduk kabupaten. Dalam hal ini, pengembangan difokuskan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan diikuti dengan meningkatkan diversifikasi pangan.

Kendatipun nilai kontribusi pertanian jauh lebih tinggi dibanding sektor lainnya, namun pertumbuhan sector ini relatif lambat. Di sisi lain, sektor non pertanian terus berkembang dengan memanfaatkan lahan pertanian. Hal ini berpengaruh pada terjadinya pergeseran strata sosial dimana dari sebelumnya keluarga petani menjadi keluarga yang tidak lagi bertumpu mata pencahariannya pada sektor pertanian. Dalam kaitan ini, perlu dibentuk qanun/regulasi yang mengatur pemanfaatan dan penggantian lahan, khususnya lahan yang beralih fungsi dengan cara memperluas lahan pertanian. Upaya ini dapat dilakukan melalui pencetakan sawah baru dan mengoptimalkan sawah-sawah yang tidak produktif, dengan tetap memperhatikan RTRW Kabupaten Nagan Raya. Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana untuk ketahanan pangan yang memadai untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan juga penting diberikan perhatian. Hal ini diikuti dengan penyediaan bibit unggul, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, sarana irigasi yang memadai, penyediaan alat-alat produksi pertanian,

dan pengaturan musim tanam (serentak). Namun demikian, sektor pertanian tetap harus dipacu pada aspek off farm-nya dengan mendorong berkembangnya proses hilirisasi yang berbasis pertanian, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi petani dan memperbaiki nilai tukar petani. Jika ini dapat diwujudkan, maka harapan disparitas pendapatan di sektor pertanian tidak terpaut jauh dengan sektor non pertanian yang diperkirakan pertumbuhannya terus akan meningkat

Berdasarkan sebaran penggunaan lahan, di Kabupaten Nagan Raya penggunaannya terbagi atas tiga wilayah yaitu wilayah pantai, wilayah tengah, dan wilayah pedalaman. Wilayah pantai didominasi kegiatan sawah, wilayah tengah kegiatan perdagangan dan jasa serta sawah, dan wilayah pedalaman kegiatannya lebih dominan perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan kehutanan. Sesuai kondisi geografis dan topografi wilayahnya, terdapat lahan budidaya yang dinilai berpotensi untuk diarahkan peruntukannya bagi pengembangan sektor perkebunan dan hutan produksi. Ini tentunya juga membutuhkan perhatian dan fokus dengan menyusun dokumen konsep perencanaan pembangunan dimasa mendatang. Dengan demikian terdapat sinergi dan kesesuaian program-program yang diusulkan dalam perencanaan dengan konsep rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang ada.

Potensi sektor perikanan terutama subsektor kelautan di Nagan Raya selama ini didukung dengan keberadaan fasilitas tempat pendaratan ikan (TPI) yang tersebar di sejumlah kecamatan pesisir, di samping juga adanya pelabuhan pendaratan ikan (PPI), beserta infrastruktur penunjang operasional lainnya. Namun demikian, upaya mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di sektor perikanan tersebut memerlukan keseriusan dan komitmen dari semua pihak. Dengan demikian, potensi sektor kelautan yang melimpah ini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Semua ini dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan nilai kearifan lokal (local wisdom), terutama menyangkut dengan konsep pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (sustainable development).

Kebijakan lain yang harus diambil oleh pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah menyiapkan skema hulu-hilir yang berbasis kawasan. Kontribusi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan mencapai 44,94 persen (2021), sementara kontribusi sektor perdagangan sebesar 11 persen dan sektor industri pengolahan sebesar 6,72% terhadap PDRB ADHB Tanpa Migas (2021). Ke depan, para pelaku ekonomi diharapkan tidak lagi menjual bahan mentah, tetapi harus diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Kabupaten Nagan Raya harus merubah orientasi pasar produknya dari pasar lokal ke pasar regional, provinsi, dan nasional. Untuk itu, harus

disiapkan infrastruktur dan suprastruktur agar kegiatan ekspor dapat dilakukan melalui kepabeanaan dalam wilayah Aceh dan tidak lagi melalui provinsi lain. Dalam hal ini Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi yang cukup baik dalam pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT), berbasis ketersediaan bahan baku yang tersedia di daerah, seperti dari sektor perkebunan yang relatif besar sehingga menghasilkan produk turunan misalnya, proses penciptaan added value dengan merubah Tandan Buah Segar (TBS) menjadi Crude Palm Oil (CPO) yang sudah dimulai oleh 11 unit Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Nagan Raya serta kawasan peternakan terpadu.

Selain itu, optimalisasi peran koperasi, usaha/kelompok usaha kecil dan menengah perlu juga dilakukan dengan dukungan pendampingan dan dana yang memadai. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat mengundang investor dengan melakukan promosi dan memberikan kemudahan dalam berinvestasi serta mengusahakan agar keamanan daerah tetap kondusif.

8) Ketenagakerjaan, Penurunan Angka Pengangguran dan Perluasan Lapangan Kerja

Semakin tinggi dan beragamnya lulusan pendidikan, baik pendidikan menengah, kejuruan maupun pendidikan tinggi (universitas, politeknik, poltekkes dan lainnya) membutuhkan penyediaan lapangan kerja yang memadai. Untuk itu, diperlukan peningkatan kompetensi keahlian lulusan melalui magang industri dan pelatihan/training pada lembaga asosiasi profesi yang sesuai dengan pasar kerja. Pemerintah dan pengusaha menciptakan dan memperluas lapangan kerja/usaha baru, serta mengoptimalkan keberadaan Balai latihan kerja (BLK) yang sebelumnya kurang berfungsi. Pengiriman tenaga kerja profesional ke luar negeri, mengundang investor untuk berinvestasi, mengusahakan keamanan yang kondusif, dan melaksanakan kerja sama investasi baik dengan investor lokal maupun investor asing juga perlu diupayakan ke depan. Selain itu, perlu mengaktifkan dan mengoptimalkan sentra sentra industri yang telah ada dan mempromosikan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Kabupaten Nagan Raya. Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunkan angka kemiskinan dari 17,70 persen tahun 2021 menjadi minimal 13%-14% pada tahun 2023-2026.

9) Pembangunan Infrastruktur Strategis

Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana ikut mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi Nagan Raya. Adanya wabah pandemi Covid-19 dalam dua terakhir ini juga ikut memperlemah kinerja ekonomi daerah ini. Meskipun saat ini

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya mulai pulih dan bergerak naik, namun masih relatif rendah dibanding dengan kabupaten/kota di seluruh di Aceh. Pada triwulan III 2021, pertumbuhan ekonomi Nagan Raya hanya tumbuh 3,02 persen.

Isu strategis untuk kegiatan pekerjaan umum untuk menunjang pertumbuhan ekonomi didominasi oleh pembangunan jalan kabupaten, jalan kecamatan, dan jalan desa, serta pengairan, air minum, dan drainase. Data terakhir (2021) menunjukkan bahwa, panjang jalan kabupaten yang telah dibangun seluruhnya 924,421 km, terdiri dari jalan kondisi baik 272,270 km, kondisi sedang 191,429 km, rusak ringan 189,171 km, dan rusak berat 271, 448 km. Perbaikan jalan yang ada selama ini belum optimal. Jalan aspal baru hanya mencapai 72 persen, akan direncanakan akan ditingkatkan menjadi 90 persen. Pembangunan jembatan yang menghubungkan kecamatan dan desa perlu ditingkatkan menjadi jembatan permanen dan mengikuti lebar jalan baru.

Areal persawahan di kabupaten ini mulai berkurang. Banyak lahan produktif yang telah berubah fungsi untuk peruntukan perumahan dan sarana industri/perdagangan. Kesemua ini menyebabkan terjadinya penyusutan produksi padi. Diperlukan regulasi tentang pencegahan alih fungsi lahan. Disamping itu perlu mempertahankan lahan irigasi yang telah ada dan diikuti dengan usaha mencetak sawah baru. Selain itu, ada irigasi yang kekurangan air, sehingga harus dibangun jaringan irigasi untuk mengairi air yang dapat digunakan pada saat kekurangan air danantisipasi kekurangannya pada musim kemarau. Permasalahan drainase lahan dan drainase irigasi yang belum optimal dibangun memerlukan perencanaan dan pembangunannya ke depan.

Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak merupakan bagian dari pelayanan dasar masyarakat yang sangat dibutuhkan. Dengan pengembangan infrastruktur dasar dan juga konektivitas antarwilayah, maka diharapkan dapat menurunkan kesenjangan antarwilayah pembangunan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam hal ini, peningkatan kualitas infrastruktur dasar yaitu irigasi, air baku, dan infrastruktur pemukiman seperti sarana air minum, persampahan, drainase lingkungan, jalan lingkungan diharapkan dapat memberi manfaat tidak hanya pada peningkatan aktivitas perekonomian, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Infrastruktur dasar merupakan bahagian pelayanan dasar masyarakat yang sangat dibutuhkan seperti air minum dan sanitasi layak. Pengembangan infrastruktur dasar dan juga konektivitas antarwilayah diharapkan dapat menurunkan kesenjangan wilayah pembangunan dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang meliputi irigasi, air baku, infrastruktur

pemukiman meliputi sarana air minum, persampahan, drainase lingkungan, jalan lingkungan diharapkan akan memberi manfaat tidak hanya pada peningkatan aktivitas perekonomian, namun juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Nagan Raya.

10) Peningkatan Prasarana dan Sarana Budaya, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

Wilayah Kabupaten Nagan Raya mempunyai topografi yang umumnya wilayah pegunungan dan pantai. Hal ini dapat dijadikan sebagai promosi wisata lokal berupa wisata sejarah, wisata alam, wisata pantai, wisata buatan, dan wisata minat khusus.

Kekayaan adat dan budaya serta adat istiadat yang beragam ini menarik untuk dikembangkan sebagai bagian dari promosi pariwisata. Banyaknya area pantai dan sungai serta daerah irigasi yang luas pun menarik dimanfaatkan sebagai objek wisata daerah. Wisata kuliner dengan beragam macam makanan dan minuman dapat dijadikan sebagai komoditas objek wisata. Semua potensi wisata ini perlu didata untuk selanjutnya direncanakan dengan baik dan dibangun atau dikembangkan dan dilestarikan sehingga dapat meningkatkan sumber PAD Nagan Raya. Pengelolaan sarana penunjang wisata seperti hotel dan penginapan lainnya perlu dioptimalkan. Untuk itu, penguatan profesionalisme tenaga kepariwisataan perlu ditingkatkan sehingga memenuhi standar pelayanan sebagai objek wisata.

Peran pemuda dan pemudi dalam pembangunan di Kabupaten Nagan Raya selama ini belum optimal. Perkumpulan pemuda dalam bentuk karang taruna pada umumnya berada dalam kondisi yang relatif pasif. Ke depan, diperlukan pembinaan yang terkait dengan pembinaan manajemen dan penyediaan sarana dan prasarana dengan menyediakan alokasi pendanaan yang memadai.

Kegiatan keolah-ragaan selama ini belum berkembang dengan baik. Prestasi para atlet/pemain yang ada di daerah ini belum mempunyai mencuat ditingkat nasional maupun propinsi. Hal ini disebabkan minimnya SDM pelatih, wasit dan juri. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dioptimalkan kualitas SDM pelatih, wasit, dan juri. Hal ini dapat dilakukan melalui pengiriman mengikuti kegiatan training baik di tingkat propinsi maupun tingkat nasional. Sarana dan prasarana olah raga yang berstandar nasional di kabupaten ini juga masih terbatas. Karenanya diperlukan peningkatan sarana dan prasarana tersebut. Di sisi lain, pembinaan para olahragawan yang prestasi juga masih minim dan kurang terarah. Pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga yang telah ada juga kurang terawat dan terpelihara disebabkan

kurangnya pendanaan dan promosi. Untuk itu perlu dioptimalkan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga yang telah ada. Perhatian untuk pembina, pelatih, dan pelaku olahraga di Nagan Raya perlu ditingkatkan pada masa mendatang.

Selain upaya strategis diatas, diperlukan kebijakan pengembangan kemampuan pemuda disertai pemberian ruang yang optimal bagi pemuda untuk turut serta dalam proses pembangunan daerah. Beberapa kebijakannya antara lain: (i). Meningkatkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam hal wawasan dan karakter kebangsaan agar mampu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan; dan (ii). Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas. Upaya ini dilakukan dengan pendekatan: 1) Menggiatkan organisasi kepemudaan (karang taruna) di tingkat RW/Kelurahan/Gampong; dan 2) Melakukan pendampingan pemuda menjadi agen perubahan bagi generasi muda di tingkat kota (pemuda pelopor).

11) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kebencanaan difokuskan pada perwujudan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Selain itu, peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas terutama industri perkebunan dan pertambangan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Persoalan persampahan selalu menjadi hal rumit dalam masyarakat yang masih kurang memiliki kepekaan terhadap kebersihan lingkungan. Ketidaksiplinan dalam memelihara kebersihan dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan akibat adanya timbunan sampah. Kondisi ini memunculkan bau tidak sedap, lalat berterbangan, dan gangguan berbagai penyakit, serta berpeluang terjadinya pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas estetika. Perilaku membuang sampah sembarangan ini tidak mengenal tingkat pendidikan maupun status sosial. Kurangnya kesadaran akan pentingnya kebersihan menjadi faktor yang paling dominan. Masyarakat masih tidak mengetahui ataupun tidak mau tahu akan bahaya yang terjadi akibat tidak menjaga lingkungan sekitar. Salah satu bentuk perilaku masyarakat adalah membuang sampah di sungai. Kondisi ini menyebabkan lingkungan di sekitar tepi sungai terlihat sangat kotor akibat tumpukan sampah, dan menyebarkan aroma yang tidak sedap, bahkan menyebabkan pemandangan estetika yang sangat buruk.

Untuk saat ini, pengelolaan masalah sampah di Nagan Raya secara umum baru teratasi sebesar 60 persen. Untuk itu, diperlukan kebijakan khusus dalam meningkatkan kinerja pengelolaan sampah agar persoalan sampah bisa terselesaikan secara tuntas. Pertumbuhan rata-rata sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang

mengalami pertumbuhan yang positif. Namun demikian, berkenaan dengan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan, maka diperlukan sosialisasi dan regulasi hal kebersihan lingkungan dan termasuk pembuatan regulasi persampahan di seluruh kabupaten ini.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Mengacu pada pencapaian visi dan misi daerah yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005- 2025. Hasil evaluasi terhadap RPJM Nagan Raya Tahun 2017-2022 menunjukkan bahwa sejumlah indikator tujuan dan sasaran telah dilaksanakan dan dicapai. Meskipun demikian, terdapat juga program dan kegiatan yang tetap direncanakan untuk dilanjutkan kembali pelaksanaannya dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya periode 2023-2026.

Tahapan perencanaan pembangunan Nagan Raya telah memasuki tahap yang keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya. Tahapan pembangunan keempat ini merupakan rangkaian akhir dari tahapan pembangunan jangka panjang Kabupaten ini. Pada akhir periode ini diharapkan dapat dicapai,

“TERWUJUDNYA KABUPATEN NAGAN RAYA YANG
ISLAMI, MAJU, SEJAHTERA, DAN DAMAI PADA TAHUN
2025”

sebagai sebuah kondisi ideal yang ingin dicapai oleh masyarakat Nagan Raya. Kondisi ideal ini dinilai sangat relevan jika dikaitkan dengan amanah yang tertuang didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Dalam dokumen RPJP Kabupaten Nagan Raya 2005-2025 telah ditentukan 7 (tujuh) sasaran pokok dari prioritas pembangunan pada periode keempat tersebut, yakni:

- 1) Terwujudnya pembangunan masyarakat yang berkualitas dan islami;
- 2) Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang produktif;
- 3) Terciptanya tata pemerintahan yang baik;
- 4) Terwujudnya pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
- 5) Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah;

- 6) Terwujudnya Pengembangan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan; dan
- 7) Terwujudnya penanggulangan dan pengurangan masyarakat miskin.

Tahapan dan prioritas pembangunan Kabupaten Nagan Raya pada tahap keempat (periode tahun 2020 - 2025) diarahkan pada optimalisasi pembangunan di seluruh sektor/bidang. Penekanannya adalah terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dengan fokus pembangunan pada peletakan dasar-dasar pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Pada tahap terakhir ini, diharapkan seluruh sasaran pembangunan jangka panjang untuk setiap periode beserta targetnya akan dapat tercapai.

Adapun tahapan dan prioritas pembangunan dalam RPJP Kabupaten Nagan Raya pada periode keempat (2020-2025) adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi pembangunan di seluruh sektor/bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif dan pembangunan fokus peletakan dasar-dasar pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan;
- 2) Pertumbuhan PDRB diharapkan setara dengan Provinsi Aceh;
- 3) Tingkat kemiskinan menjadi di bawah 10 persen;
- 4) Tingkat pengangguran terbuka menjadi 2-3 persen;
- 5) Pemantapan industrilisasi berbasis pertanian melalui pengembangan pusat informasi dan pemasaran komoditas unggulan yang telah menjadi nilai tambah yang berbasis teknologi dan informasi, serta mendukung kemitraan UKM dan swasta nasional dan asing dalam pemasaran produk unggulan di level nasional dan internasional serta mengembangkan cluster agroindustri;
- 6) Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan DPRK Nagan Raya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan kualitas pelayanan dasar, perizinan dan pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat, dan berbiaya wajar menurut aturan berlaku, serta optimalisasi reformasi birokrasi kearah pelayanan publik dengan dukungan teknologi e-government dan teknologi informasi yang terkini untuk aspek pelayanan perizinan investasi dan perizinan lainnya;
- 7) Peningkatan kualitas pendidikan melalui penambahan jumlah dan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, kemampuan berinovasi dan kreativitas;

- 8) Pembangunan SDM yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembinaan akhlak mulia, cerdas, dan mampu bersaing di dunia Internasional;
- 9) Pelayanan kesehatan yang mampu menurunkan angka Stunting, Wasting dan obesitas, meningkatkan angka harapan hidup, angka kematian bayi (AKB), dan angka kematian Ibu (AKI), yang pada akhirnya mampu meningkatkan angka IPM;
- 10) Pembangunan infrastruktur melalui pemantapan sarana dan prasarana publik seperti jalan, jembatan, perumahan dan permukiman, serta tersedianya air bersih dan sanitasi yang pada akhirnya dapat mencapai indikator SDG's terkait dengan pembangunan infrastruktur mendekati 75% dari target SDG's;
- 11) Pembangunan sistem transportasi darat, laut, dan udara yang menjamin arus pergerakan orang, barang, dan jasa serta difokuskan pula pada lancarnya aktivitas pabrikasi dan kegiatan ekspor;
- 12) Penguatan sistem teknologi komunikasi, informasi dan telematika;
- 13) Pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pemberdayaan perempuan berbasis kemandirian ekonomi, pendidikan dan kesehatan, peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, serta pengembangan partisipasi lembaga sosial masyarakat dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak;
- 14) Pemantapan pemerintahan dan pelayanan umum melalui pemantapan kapasitas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan DPRK Kabupaten Nagan Raya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mantapnya kualitas pelayanan dasar pelayanan dasar, perizinan dan pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat dengan biaya wajar menurut aturan berlaku, dan pemantapan reformasi birokrasi kearah pelayanan publik dengan dukungan teknologi e-goverment dan teknologi informasi yang terkini;
- 15) Pembangunan kebudayaan melalui pengembangan kembali khazanah budaya, adatistiadat, kearifan lokal dan nilai-nilai tradisional yang berkembang di kabupaten Nagan Raya, menanamkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat terutama pada kalangan generasi muda dalam peran sertanya untuk pembangunan;
- 16) Pembangunan kepemudaan dan olahraga melalui peningkatan kualitas pemuda sebagai individu dan dalam organisasi kepemudaan, pemenuhan sarana olahraga dan peningkatan prestasi atlit Kabupaten Nagan Raya ditingkat Provinsi dan Nasional.

Tabel 1.39
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 -2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi	1.1 Meningkatkan hak-hak politik masyarakat Nagan Raya, serta peran lembaga demokrasi	1.1.1 Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.1.1.1 Peningkatan peran lembaga pendidikan melalui pendidikan dan pengembangan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
		1.1.2 Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.1.2.1 Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	2.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	2.1.1 Peningkatan efektifitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan dan akuntabel	2.1.1.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang baik
	2.2 Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	2.2.1 Peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi pengelolaan aset daerah	2.2.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah
	2.3 Meningkatkan tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik	2.3.1 Peningkatan layanan sistem pengadaan berbasis elektronik	2.3.1.1 Penyediaan layanan berbasis digital
	2.4 Meningkatkan Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	2.4.1 Pemantapan Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	2.4.1.1 Pelayanan Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat yang optimal
	2.5 Meningkatkan profesionalitas ASN	2.5.1 Peningkatan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah	2.5.1.1 Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur
Menegakkan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat	3.1 Meningkatkan peran ulama dalam pembangunan	3.1.1 Penguatan Peran Ulama dalam Pembangunan	3.1.1.1 Peningkatan kapasitas ulama
	3.2 Tersalurkannya ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah)	3.2.1 Optimalisasi Ziswaf melalui tersedianya data Muzakki dan Mustahik	3.2.1.1 Penyediaan Database Ziswaf
	3.3 Tegaknya Syariah dalam bermasyarakat	3.3.1 Peningkatan Pelaksanaan Dan Pengawasan Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya	3.3.1.1 Penguatan pelaksanaan dan pengawasan syariat islam
	3.4 Meningkatkan kualitas Pendidikan dayah	3.4.1 Peningkatan kapasitas guru dayah serta sarana dan prasarana dayah	3.4.1.1 Penguatan kelembagaan dayah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menaikkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia	4.1 Meningkatkan akses pendidikan	4.1.1 Peningkatan profesionalisme dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	4.1.1.1 Ketersediaan SDM pendidik dan tenaga kependidikan
	4.2 Meningkatkan kualitas pendidikan	4.2.1 Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	4.2.1.1 Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
	4.3 Meningkatkan kualitas Penduduk	4.3.1 Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan	4.3.1.1 Optimalisasi Balai Latihan Kerja
	4.4 Meningkatkan Kualitas Kepemudaan dan Olah Raga	4.4.1 Peningkatan Kualitas Kepemudaan dan Olah Raga	4.4.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga
	4.5 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	4.5.1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang merata, terjangkau dan berkeadilan, serta upaya promotif-preventif	4.5.1.1 Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
	4.6 Menurunnya angka stunting	4.6.1 Penanganan stunting yang terintegrasi	4.6.1.1 Integrasi penanganan Stunting
	4.7 Meningkatkan Peran Perempuan dalam pembangunan	4.7.1 Peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam pembangunan	4.7.1.1 Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan
	4.8 Tercapainya status Kabupaten Layak Anak	4.8.1 Perwujudan Kabupaten Layak Anak	4.8.1.1 Ketersediaan Pemenuhan hak anak
	4.9 Tertanganinya Covid-19	4.9.1 Peningkatan ketahanan kesehatan menghadapi pandemi	4.9.1.1 Optimalisasi daya tahan kesehatan masyarakat terhadap penyakit menular
	4.10 Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan	4.10.1 Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	4.10.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
	4.11 Meningkatkan life Skill masyarakat	4.11.1 Peningkatan pelatihan keterampilan masyarakat dalam memiliki kompetensi keahlian	4.11.1.1 Ketersediaan pelatihan ketrampilan yang sesuai kompetensi
	4.12 Meningkatkan Pelestarian Kebudayaan	4.12.1 Peningkatan Kelestarian Kebudayaan	4.12.1.1 Pemeliharaan pelestarian budaya lokal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penyediaan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Strategis untuk Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan serta Pengembangan UMKM Terpadu (Hulu-Hilir), Agroindustri dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	5.1 Menurunnya beban penduduk miskin	5.1.1 Peningkatan kesadaran penduduk miskin tentang pentingnya meningkatkan taraf hidup melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan	5.1.1.1 Pemberdayaa sosial dan perlindungan serta jaminan sosial
	5.2 Meningkatnya kemandirian desa	5.2.1 Peningkatan Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan Ketahanan Ekologi Desa	5.2.1.1 Pemberdayaan dan peningkatan ketahanan sosial dan kemasyarakatan
		5.2.2 Peningkatan kapasitas aparatur gampong	5.2.2.1 Pemberdayaan aparatur dan masyarakat gampong
	5.3 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	5.3.1 Pemberdayaan ekonomi masyarakat	5.3.1.1 Peningkatan pemberdayaan kesejahteraan rakyat
	5.4 Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	5.4.1 Perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha	5.4.1.1 Penyediaan Lapangan kerja
	5.5 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	5.5.1 Optimalisasi potensi ZIS untuk peningkatan pendapatan masyarakat	5.5.1.1 Intensifikasi penerimaan ZIS
	5.6 Meningkatnya ketahanan pangan	5.6.1 Peningkatan ketersediaan dan akses pangan	5.6.1.1 Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan
	5.7 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	5.7.1 Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perikanan	5.7.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan
		5.7.2 Perbaikan iklim investasi	5.7.2.1 Peningkatan kemudahan berinvestasi
		5.7.3 Peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional	5.7.3.1 Penyediaan sarana dan prasarana pasar tradisional
	5.8 Terkendalinya tingkat inflasi daerah	5.8.1 Penguatan peran pemerintah daerah dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	5.8.1.1 Stabilisasi harga pasar
	5.9 Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	5.9.1 Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	5.9.1.1 Penyediaan jalan dan jembatan yang baik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	5.10 Meningkatkan kinerja sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tani	5.10.1 Peningkatan kelembagaan pengelola irigasi, komisi irigasi,	5.10.1.1 Optimalisasi bidang irigasi
	5.11 Meningkatkan kualitas dan akses air bersih	5.11.1 Pemenuhan infrastruktur penyediaan air bersih	5.11.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana air bersih
	5.12 Meningkatkan kualitas dan akses sanitasi	5.12.1 Peningkatan infrastruktur penyediaan sanitasi dan air limbah	5.12.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi dan air limbah
	5.13 Meningkatnya dan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	5.13.1 Pemanfaatan dana desa dan ZIS untuk pembangunan dan	5.13.1.1 Optimalisasi penyaluran ZIS
	5.14 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	5.14.1 Pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	5.14.1.1 Pencegahan kerusakan lingkungan
	5.15 Meningkatnya ketahanan terhadap Kebencanaan	5.1.15 Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	5.1.15.1 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan (RPJP 2023-2026) dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.40
Dokumen Perencanaan Tahunan (RPJP 2023-2026)

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X X 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	Nilai	36,63 C	50 CC	408.175.120.306	60 CC	418.101.618.315	65 B	419.875.999.757	70 B	415.752.791.251	70 B	415.752.791.251	Semua SKPK
						141.541.539.607		144.301.599.630		144.878.806.028		143.953.146.361		143.953.146.361	DINAS PENDIDIKAN
						756.485.091		771.236.550		774.321.496		769.374.201		769.374.201	Sekretariat MPD
						40.186.417.489		40.970.052.630		41.133.932.840		40.871.119.916		40.871.119.916	DINAS KESEHATAN
						63.028.352.788		64.257.405.667		64.514.435.290		62.136.639.660		62.136.639.660	BLUD RSU - SIM
						6.674.773.427		6.804.931.509		6.832.151.235		6.788.499.254		6.788.499.254	PUPR
						3.065.438.183		3.125.214.228		3.137.715.085		3.117.667.596		3.117.667.596	PERKIM
						1.379.511.807		1.406.412.287		1.412.037.936		1.403.016.143		1.403.016.143	Kesbangpol
						2.367.247.270		2.413.408.591		2.423.062.226		2.407.580.797		2.407.580.797	Satpol PP dan WH
						3.862.798.869		3.938.123.447		3.953.875.941		3.928.613.836		3.928.613.836	BPBD
						2.957.280.057		3.014.947.018		3.027.006.806		3.007.666.654		3.007.666.654	DINAS SYARIAT ISLAM
						2.492.710.641		2.541.318.498		2.551.483.772		2.535.181.832		2.535.181.832	DINAS SOSIAL

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026	OPD	
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
						1.211.249.366		1.234.868.729		1.239.808.204		1.231.886.821		1.231.886.821	Sekretariat Baitul Mal
						1.105.859.810		1.127.424.076		1.131.933.772		1.124.701.621		1.124.701.621	Sekretariat MPU
						1.229.345.402		1.253.317.638		1.258.330.908		1.250.291.180		1.250.291.180	Sekretariat MAA
						2.586.415.402		2.506.600.402		2.554.266.728		2.634.351.728		2.634.351.728	Disnakertrans
						4.235.770.068		4.318.367.585		4.335.641.055		4.307.939.777		4.307.939.777	DPMGP4
						1.168.014.919		1.190.791.209		1.195.554.374		1.187.915.738		1.187.915.738	DINAS PERTANAHAN
						6.145.858.133		6.265.702.367		6.290.765.176		6.250.572.219		6.250.572.219	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						2.647.427.769		2.699.052.611		2.709.848.821		2.692.535.055		2.692.535.055	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
						3.463.597.709		3.531.137.864		3.545.262.415		3.522.611.025		3.522.611.025	DINAS PERHUBUNGAN
						2.225.692.238		2.269.093.237		2.278.169.610		2.263.613.928		2.263.613.928	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
						9.252.608.444		9.437.660.613		9.626.413.825		9.818.942.102		9.818.942.102	Disperindagkop

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026	OPD	
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
						4.193.928.891		6.205.159.891		6.122.443.891		6.122.443.891		6.122.443.891	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						2.962.226.233		3.019.989.644		3.032.069.603		3.012.697.104		3.012.697.104	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
						2.130.975.652		2.172.529.677		2.181.219.795		2.167.283.546		2.167.283.546	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
						3.456.718.873		3.524.124.891		3.538.221.391		3.515.614.987		3.515.614.987	DKPP
						7.607.760.828		7.756.112.165		7.787.136.613		7.737.383.040		7.737.383.040	Distannak
						2.536.053.286		2.585.506.325		2.595.848.350		2.579.262.956		2.579.262.956	DINAS PERKEBUNAN
						17.123.276.111		17.617.179.995		17.687.648.715		17.574.638.790		17.574.638.790	SETDAKAB
						448.971.215		457.726.154		459.557.058		456.620.856		456.620.856	KDH/WKDH
						5.381.858.429		5.486.804.668		5.508.751.887		5.473.555.369		5.473.555.369	Setwan DPRK

					7.915.816.245		8.070.174.662		8.102.455.360		8.050.687.152		8.050.687.152	DPRK
--	--	--	--	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	------

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026	OPD	
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
						5.301.785.943		5.405.170.769		5.426.791.452		5.392.118.596		5.392.118.596	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						18.339.336.621		18.696.953.685		18.771.741.500		18.787.312.721		18.787.312.721	BPKD
						307.415.172		316.667.340		338.803.123		336.638.442		336.638.442	Sekretariat Korpri
						2.415.889.423		2.462.999.266		2.472.851.264		2.457.051.722		2.457.051.722	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						4.866.662.288		4.961.562.203		4.981.408.451		4.949.581.237		4.949.581.237	INSPEKTORAT
						2.549.593.123		2.599.310.189		2.609.707.429		2.593.033.487		2.593.033.487	KECAMATAN DARUL MAKMUR

					1.707.672.087	1.740.971.693	1.747.935.580	1.736.767.670	1.736.767.670	KECAMATAN SUKA MAKMUE
					2.063.341.131	2.103.576.283	2.111.990.588	2.098.496.658	2.098.496.658	KECAMATAN KUALA
					2.009.046.741	2.048.223.152	2.056.416.045	2.043.277.192	2.043.277.192	KECAMATAN KUALA PESISIR
					1.666.784.913	1.699.287.218	1.706.084.367	1.695.183.853	1.695.183.853	KECAMATAN TRIPA MAKMUR

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
						2.522.409.093		2.571.596.071		2.581.882.455		2.565.386.292		2.565.386.292	KECAMATAN BEUTONG
						2.088.389.288		2.129.112.879		2.137.629.331		2.123.971.589		2.123.971.589	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
						2.105.144.930		2.146.195.257		2.154.780.038		2.141.012.717		2.141.012.717	KECAMATAN SEUNAGAN
						1.592.562.626		1.623.617.598		1.630.112.068		1.619.696.956		1.619.696.956	KECAMATAN TADU RAYA
						1.297.106.678		1.322.400.258		1.327.689.859		1.319.206.983		1.319.206.983	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANANDASAR					195.026.172.609		176.246.122.168		180.737.875.987		186.308.660.363		186.308.660.363	
1	01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					60.691.116.500		60.772.727.665		60.885.982.218		61.005.961.685		61.005.961.685	
1	01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					59.550.000.000		59.550.000.000		59.550.000.000		59.550.000.000		59.550.000.000	Dinas Pendidikan
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisibangunan baik	%	98,12	98,26		98,26		98,56		98,71		98,71		

		Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	98,72	98,90		98,98		99,08		99,36		99,36	
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio Index	76,32	76,51		76,66		76,81		76,98		76,98	

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio Index	61,55	61,88		61,97		61,99		62,08		62,08		
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					745.000.000		810.000.000		880.000.000		960.000.000		960.000.000	Dinas Pendidikan
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,31	70,20		71,20		71,53		74,42		74,42		
		Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	42,17	42,66		43,17		43,61		43,88		43,88		
		APKSD/MI/Paket A	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		APK SMP/MTs/Paket B	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		APK SMA/SMK/	%	96,26	96,44		96,62		96,78		96,93		96,93		
		Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,96	9,00		9,18		9,24		9,32		9,32		
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,14	14,26		14,38		14,45		14,58		14,58		
		Angka Pendidikan Tamat SD Sederajat	%	98,83	98,92		99,02		99,32		99,66		99,66		

		Angka Pendidikan Tamat SLTP sederajat	%	95,25	95,66		95,85		95,96		96,03		96,03	
		Angka Pendidikan Tamat Diplomal/II/III	%	5,25	5,35		5,49		5,72		5,89		5,89	
		Angka Pendidikan Tamat Diploma IV/S1	%	60,00	60,80		60,96		61,12		61,33		61,33	
		Angka Pendidikan Tamat S2/S3	%	3,00	3,14		3,28		3,58		3,75		3,75	
		Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	97,00	97,19		97,55		97,71		97,88		97,88	

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	85,00	85,44		85,76		85,89		85,97		85,97		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI keSMP/MTs	%	98,73	98,96		99,11		99,38		99,59		99,59		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTske SMA/SMK/MA	%	92,46	92,82		92,82		92,97		93,18		93,18		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	89,74	89,96		90,07		90,43		90,68		90,68		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	70,04	70,43		70,74		70,74		70,91		70,91		
1 0 1 0 4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					120.000.000		125.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000	Dinas Pendidikan
		Rasio guru/murid sekolah pendidikdasar	Rasio Index	74,50	74,87		74,98		75,12		75,52		75,52		

		Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio Index	61,27	61,65		61,89		61,93		61,98		61,98	
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio Index	72,64	72,97		73,18		73,71		74,03		74,03	
		Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio Index	56,32	56,63		56,79		56,87		56,92		56,92	
		Persentase Kualifikasi Guru D IV/S1	%	98,72	98,99		99,17		99,54		99,84		99,84	
		Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	%	83,50	83,72		83,91		84,03		84,46		84,46	
10105	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					115.000.000		125.000.000		150.000.000		185.000.000	185.000.000	Dinas Pendidikan

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Sekolah pendidikan SD/ kondisibangunan baik	%	98,12	98,26		98,26		98,56		98,71		98,71		
		Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	98,72	98,90		98,98		99,08		99,36		99,36		
		asio ketersediaan sekolah/pendudukusia sekolah pendidikan dasar	Rasio Index	76,32	76,51		76,66		76,81		76,98		76,98		
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio Index	61,55	61,88		61,97		61,99		62,08		62,08		

1 0 1 0 7	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Standarisasi Pendidikan Dayah	Ada/Tidak	Ada	Ada	161.116.500	Ada	162.727.665	Ada	165.982.218	Ada	170.961.685	Ada	170.961.685	Dinas Syariat Islam
1 0 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					59.593.796.608		60.184.937.774		61.379.042.930		63.206.023.817		63.206.023.817	
1 0 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT	Prevalansi Stunting	persen	17,30	16,50	37.655.857.713	15,40	38.032.416.290	14,20	38.793.064.616	13,00	39.956.856.554	13,00	39.956.856.554	Dinkes
		Jumlah pasien Covid yang mendapatkan pelayanan	Pasien	200,00	220	98.000.000	230	98.980.000	240	100.959.600	250	103.988.388	250	103.988.388	BLUD/Dinkes
						50.000.000		48.490.000		49.479.800		50.994.194		50.994.194	BLUD RSU - SIM
						48.000.000		50.490.000		51.479.800		52.994.194		52.994.194	Dinkes
		Akreditasi Rumah Sakit	Skor	C	C	20.360.000.000	B	20.563.600.000	B	20.974.872.000	B	21.604.118.160	B	21.604.118.160	BLUD RSU SIM
1 0 2 0 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.000.258.895		1.010.261.484		1.030.466.714		1.061.380.715		1.061.380.715	
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran		6,38		6,11		5,08		4,30		4,30		Dinkes

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	/100000 Kelahiran		330,40		307,30		280,39		250,22		250,22		Dinkes
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rasio puskesmas, poliklinik,ustu per satuan penduduk	/1000 Penduduk		0,28	479.680.000	0,28	479.680.000	0,28	479.680.000	0,28	479.680.000	0,28	479.680.000	Dinkes
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.000.258.895		1.010.261.484		1.030.466.714		1.061.380.715		1.061.380.715	Dinkes
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	2,75	6,38		6,11		5,08		4,30		4,30		
		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	/100000 Kelahiran	438,91	330,40		307,30		280,39		250,22		250,22		
		Rasio puskesmas, poliklinik,ustu per satuan penduduk													
		- Puskesmas	/1000 Penduduk	0,08	0,09		0,09		0,09		0,09		0,09		
		- Puskesmas	Unit	14,00	16		16		16		16		16		
		- Poliklinik	/1000 Penduduk	0,04	0,05		0,05		0,06		0,07		0,07		
		- Poliklinik	Unit	6,00	9		9		10		12		12		

		- Pustu	/1000 Penduduk	0,29	0,28		0,28		0,28		0,27		0,27		
		- Pustu	Unit	49,00	49		49		49		49		49		

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Rasio Pustu	Unit		49		49		49		49		49		
		Rasio Pustu /1000 Penduduk	/1000 Penduduk		0,28		0,28		0,28		0,28		0,28		
		Angka Kematian Ibu Per 100,000Kelahiran Hidup	/100000 Kelahiran		330,40		307,30		280,39		250,22		250,22		
103	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					68.285.382.886		48.786.021.347		51.876.366.750		55.356.296.250		55.356.296.250	
10302	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio jaringan irigasi	Rasio Index	45,70	45,70	13.280.671.000	45,66	13.413.477.710	45,69	13.547.612.487	45,71	13.683.088.612	45,71	13.683.088.612	PUPR
10303	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					670.359.152		677.062.744		690.603.998		711.322.118		711.322.118	Perkim
		Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	4,27	6,40		7,42		8,41		9,37		9,37		
		Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan	%	5,41	9,70		11,79		13,81		15,78		15,78		

1	03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan	Unit		1.200	100.000.000	1500	110.000.000	1.700	125.000.000	2.000	142.500.000	2.000	142.500.000	DLH
1	03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Bersantasi	Persen	73,48	73,98	6.000.000.000	74,48	6.000.000.000	74,98	6.000.000.000	75,48	6.000.000.000	75,48	6.000.000.000	Perkim
			Persentase Rumah Tangga Bersantasi	Persen		73,98		74,48		74,98		75,48		75,48		DLH

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1 3 6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Rumah Tangga Bersantasi	Persen	73,48	73,98	1.274.500.000	74,48	1.287.245.000	74,98	1.312.989.900	75,48	1.352.379.597	75,48	1.352.379.597	Perkim
1 3 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/tidak	Ada	Ada	2.450.000.000	Ada	2.450.000.000	Ada	2.450.000.000	Ada	2.450.000.000	Ada	2.450.000.000	Perkim
1 3 9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/tidak	Ada	Ada	1.750.000.000	Ada	1.750.000.000	Ada	1.750.000.000	Ada	1.750.000.000	Ada	1.750.000.000	Perkim
1 0	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					40.441.037.274		21.151.235.894		22.585.837.106		24.780.776.961		24.780.776.961	PUPR

3 0	1															
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	40,95	42,25		43,55		44,85		46,15		46,15			
		Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Index	0,01	0,01		0,01		0,01		0,01		0,01			
		Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	%	26,63	28,24		29,86		31,48		33,09		33,09			
1 3 2	0 1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ada/tidak	Ada	Ada	2.318.815.460	Ada	1.947.000.000	Ada	3.414.323.258	Ada	4.486.228.961	Ada	4.486.228.961		PUPR
		Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada			
		Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Ada/tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada			
1 4	0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN				2.112.206.500		2.115.328.565		2.121.635.136		2.131.284.190		2.131.284.190		

PERMUKIMAN																
1	0	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah Rumah Layak Huni yang Terbangun	Unit	1.073	196	250.000.000	198	250.000.000	200	250.000.000	202	250.000.000	202	250.000.000	Perkim
4	0															
2																

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					312.206.500		315.328.565		321.635.136		331.284.190		331.284.190	Perkim
		Jumlah Rumah Layak Huni yang Terbangun	Unit	1.073	196		198		200		202		202		
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhab	Unit	227	100		100		100		100		100		
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					1.550.000.000		1.550.000.000		1.550.000.000		1.550.000.000		1.550.000.000	Perkim
		Jumlah Rumah Layak Huni yang Terbangun	Unit	1.073	196		198		200		202		202		
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhab	Unit	227	100		100		100		100		100		
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA					3.608.426.000		3.644.510.260		3.717.400.465		3.828.922.479		3.828.922.479	

		PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
1	05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				628.610.000		634.896.100		647.594.022		667.021.843		667.021.843	Satpol PP dan WH
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman,keindahan)	%	65	71		75		79		82		82		
		Persentase Penegakan PERDA	%	30	60		67		71		75		75		
		Pembinaan Dinul Islam	Orang	9	20		22		25		30		30		
		Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam	%	60	70		76		81		85		85		

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1 5 0 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Kapasitas Ketahanan Bencana	Indeks	0,36	0,38	314.354.000	0,40	317.497.540	0,41	323.847.491	0,42	333.562.916	0,42	333.562.916	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 5 0 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARANDAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Indeks Kapasitas Ketahanan Bencana	Indeks	0,36	0,38	2.665.462.000	0,40	2.692.116.620	0,41	2.745.958.952	0,42	2.828.337.721	0,42	2.828.337.721	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1 0 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					735.244.115		742.596.556		757.448.487		780.171.942		780.171.942	

1 0 6 0 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan	%		17,85	324.639.460	200,00	326.885.855	300,00	330.463.572	100,00	340.587.479	100,00	340.587.479	Dinsos
1 0 6 0 5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	30.710	29,63	110.604.655	29,42	113.710.702	29,21	119.984.916	28,28	129.584.463	28,28	129.584.463	Dinsos
1 0 6 0 5	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%		200	100.000.000	300	102.000.000	100	107.000.000	100	110.000.000	100	110.000.000	Dinsos
2 0 6 0 6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penyediaan Logistik Penanganan Bencana Kabupaten	Paket		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	Dinsos
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					43.570.288.922		44.375.356.428		46.980.744.769		47.926.078.871		47.926.078.871	
2 0 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					1.283.744.562		1.493.245.412		1.524.525.187		1.695.954.562		1.695.954.562	
2 0 7 0 3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.095.534.000		1.118.274.850		1.321.389.000		1.107.744.000		1.107.744.000	DISNAKERTRANS
		Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	NA	13,33		13,33		13,33		13,33		13,33		

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,99	4,08		3,92		3,78		3,64		3,64		
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis kompetensi	%	19,93	23,42		23,42		23,42		23,42		23,42		
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	64,99	67,49		68,53		69,58		70,63		70,63		
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran Pencari kerja yang Terdaftar yang ditempatkan	%	0,05	0,06	91.483.561	0,06	278.243.561	0,06	106.409.186	0,07	491.483.561	0,07	491.483.561	DISNAKERTRANS
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					96.727.001		96.727.001		96.727.001		96.727.001		96.727.001	DISNAKERTRANS
		Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	kasus	79,37	63,49		63,49		47,62		47,62		47,62		
		Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	39,83	52,18		58,26		64,33		70,38		70,38		
			Orang	7.953	7.973		7.993		8.013		8.033		8.033		

		Jumlah tenaga kerja di sektor Industri														
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.058.765.000		1.879.352.650		1.980.539.703		2.102.355.894		2.102.355.894		
2	08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR	Persen		17	150.000.000	20	330.000.000	20	350.000.000	20	370.000.000	20	370.000.000	DPMGP4
2	08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persen		80	150.000.000	82	330.000.000	85	350.000.000	87	375.000.000	87	375.000.000	DPMGP4

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD	
					2023		2024		2025		2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2	08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persen		80	400.000.000	80	500.000.000	83	520.000.000	85	540.000.000	85	540.000.000	DPMGP4	
2	08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persen		80	150.000.000	82	330.000.000	82	350.000.000	83	375.000.000	83	375.000.000	DPMGP4	
2	08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Layak Anak	Predikat	-	Pratama	58.765.000	madya	59.352.650	madya	60.539.703	Nindya	62.355.894	Nindya	62.355.894	DPMGP4

2	08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase jumlah Anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan	Persen		80	150.000.000	82	330.000.000	82	350.000.000	85	380.000.000	85	380.000.000	DPMGP4
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					2.492.305.960		2.741.534.256		3.015.688.082		3.317.256.190		3.317.256.190	
2	09 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan Pangan Utama	%	100	100	800.000.000	100	880.000.000	100	968.000.000	100	1.064.800.000	100	1.064.800.000	DKPP
2	09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Konsumsi	Skor	N/A	72,90	1.492.307.000	73,90	1.641.535.400	75,00	1.805.689.340	77,00	1.986.257.574	77,00	1.986.257.574	DKPP
2	09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa yang tahan pangan/ sangat tahan pangan	%	30,63	35,14	100.000.000	37,39	110.000.000	39,64	121.000.000	41,89	133.100.000	41,89	133.100.000	DKPP
2	09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	N/A	100,00	99.998.960	100,00	109.998.856	100,00	120.998.742	100,00	133.098.616	100,00	133.098.616	DKPP
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					1.215.904.625		1.503.685.599		1.373.643.077		1.626.735.008		1.626.735.008	
2	10 02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase luas lahan bersertifikat	%	61,34	67,63	45.000.000	71,01	47.250.000	74,56	49.612.500	78,29	52.093.125	78,29	52.093.125	DINAS PERTANAHAN
2	10 03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase luas lahan bersertifikat	%	61,34	67,63	82.800.000	71,01	86.940.000	74,56	91.287.000	78,29	95.851.350	78,29	95.851.350	DINAS PERTANAHAN

Tahun/Target														
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian kasus tanah negara	%	60,00	66,00	85.000.000	69,00	89.250.000	72,00	93.712.500	75,00	98.398.125	75,00	98.398.125	DINAS PERTANAHAN
2 10 05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian kasus tanah negara	%	60,00	66,00	35.000.000	69,00	36.750.000	72,00	38.587.500	75,00	40.516.875	75,00	40.516.875	DINAS PERTANAHAN
2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penyelesaian kasus tanah negara	%	60,00	66,00	235.750.000	69,00	247.537.500	72,00	259.914.375	75,00	272.910.094	75,00	272.910.094	DINAS PERTANAHAN
2 10 09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	%	61,34	67,63	35.000.000	71,01	36.750.000	74,56	38.587.500	78,29	40.516.875	78,29	40.516.875	DINAS PERTANAHAN
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	%	61,34	67,63	110.000.000	71,01	265.500.000	74,56	196.275.000	78,29	206.088.750	78,29	206.088.750	DINAS PERTANAHAN
2 0 1 2	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	%	61,34	67,63	173.056.280	71,01	174.786.843	74,56	178.282.580	78,29	183.631.057	78,29	183.631.057	DINAS PERTANAHAN
2 10 13	PROGRAM SURVEI PENGUKURAN DAN PEMETAAN	Persentase luas lahan bersertifikat	%	61,34	67,63	170.000.000	71,01	222.250.000	74,56	174.612.500	78,29	327.093.125	78,29	327.093.125	DINAS PERTANAHAN
2 10 14	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN	Persentase luas lahan bersertifikat	%	61,34	67,63	99.000.000	71,01	146.000.000	74,56	96.000.000	78,29	146.000.000	78,29	146.000.000	DINAS PERTANAHAN
2 10 16	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Persentase luas lahan bersertifikat	%	61,34	67,63	97.998.170	71,01	102.898.079	74,56	108.042.982	78,29	113.445.132	78,29	113.445.132	DINAS PERTANAHAN
2 10 17	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Penyelesaian kasus tanah negara	%	60,00	66,00	47.300.175	69,00	47.773.177	72,00	48.728.640	75,00	50.190.499	75,00	50.190.499	DINAS PERTANAHAN
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					3.183.420.500		3.378.154.705		3.587.126.252		3.814.746.515		3.814.746.515	
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	101.140.500	Ada	102.151.905	Ada	103.173.424	Ada	104.205.158	Ada	104.205.158	DLH

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73,96	57,42	650.000.000	57,65	715.000.000	57,88	786.500.000	58,11	865.150.000	58,11	865.150.000	DLH
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Persen	14	-	550.000.000	14	600.000.000	14	650.500.000	14	701.350.000	14	701.350.000	DLH
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks		57,42	100.000.000	57,65	115.000.000	57,88	128.000.000	58,11	145.000.000	58,11	145.000.000	DLH
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks		57,42	100.000.000	57,65	110.000.000	57,88	125.000.000	58,11	142.500.000	58,11	142.500.000	DLH
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73,96	57,42	260.000.000	57,65	286.000.000	57,88	314.600.000	58,11	346.060.000	58,11	346.060.000	DLH
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73,96	57,42	150.000.000	57,65	165.000.000	57,88	181.500.000	58,11	199.650.000	58,11	199.650.000	DLH
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persen	26,37	34,07	1.272.280.000	34,85	1.285.002.800	35,54	1.297.852.828	36,15	1.310.831.356	36,15	1.310.831.356	DLH

		Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani													
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				2.390.000.000		2.505.000.000		2.605.000.000		2.625.000.000		2.625.000.000	
2	12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				780.000.000		785.000.000		815.000.000		815.000.000		815.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	93,79	98,25		98,75		98,95		99,40		99,40		
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%		27,25		27,50		28,00		28,50		28,50		
2	12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				830.000.000		830.000.000		830.000.000		830.000.000		830.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Rasio bayi berakte kelahiran	%	89,37	90,50		92,50		93,25		94,00		94,00		

2	12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				670.000.000		780.000.000		840.000.000		860.000.000		860.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL
		Jumlah Perjanjian Kerjasama dan Pemanfaatan Data	OPD		5,00		7,00		8,00		9,00		9,00		
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ belum	Sudah	Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		Sudah		
2	12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				110.000.000		110.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL
		Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	%	90,00	92,00		94,00		95,00		97,00		97,00		
2	1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3.599.704.085		6.674.171.695		6.744.055.129		6.883.976.783		6.883.976.783	

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2 1 3 4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					1.006.060.160		1.826.591.331		1.833.523.157		1.886.278.852		1.886.278.852	DPMGP4
		Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	70,00	100,00	200.000.000	100,00	526.462.569	100,00	527.643.196	100,00	530.075.312	100,00	530.075.312	DPMGP4
		Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat(LPM)	Kelompok	222	222	806.060.160	222	1.300.128.762	222	1.305.879.961	222	1.356.203.540	222	1.356.203.540	DPMGP4

2 3 5	1 0	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADATDAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				393.643.925		397.580.364		405.531.972		417.697.931		417.697.931	DPMGP4
		Persentase LPM Berprestasi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2 3 5	1 0	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Terbentuknya kerja sama Badan Usaha antar Gampong Kabupaten Nagan Raya	%	80	200.000.000	80	450.000.000	85	455.000.000	85	480.000.000	85	480.000.000	DPMGP4
2 3 5	1 0	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase jumlah keluarga yang dibina	%	80	2.000.000.000	82	4.000.000.000	83	4.050.000.000	85	4.100.000.000	85	4.100.000.000	DPMGP4
2 4	1 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.810.366.900		3.848.470.569		3.925.439.980		4.043.203.180		4.043.203.180	
2 4 0	1 0	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	222	3.810.366.900	222	3.848.470.569	222	3.925.439.980	222	4.043.203.180	222	4.043.203.180	DPMGP4

4																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD	
					2023		2024		2025		2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Persentase LSM aktif	%	100,0	100,0		100,00		100,00			100,00		100,00		DPMGP4
		Persentase Posyandu aktif	%	100,0	100,0		100,00		100,00			100,00		100,00		DPMGP4
2 5	1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					2.050.402.000		2.076.906.020		2.123.169.140		2.190.171.715		2.190.171.715		
2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					1.900.402.000		1.919.406.020		1.957.794.140		2.016.527.965		2.016.527.965		Dinas Perhubungan
		Pemasangan Rambu-Rambu	%	12	13		14		15		16		16			
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Rasio Index	83,95	83,95		83,95		83,95		83,95		83,95			
		Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	-	275		368		549		764		764			
		Rasio Ijin Trayek	Indeks	15	15		20		25		36		36			
		Persentase Layanan Angkutan Darat	%	5,80	5,80		7,30		9,60		13,45		13,45			
			%		4,50		6,50		7,50		9,50		9,50			

		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum														
2	1503	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Pelabuhan Laut	Unit	3	4	150.000.000	4	157.500.000,00	4	165.375.000,00	5	173.643.750,00	5	173.643.750,00	Dinas Perhubungan
			Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Angkutan Darat)	Trayek	7	7		7		7		7		7		
			Jumlah Pelabuhan Laut, Darat/Udara/ Terminal Bis (Terminal Tipe B)	Unit	3	4		4		4		5		5		
			Jumlah Bandar Udara	Unit		1		1		1		1		1		
			Jumlah Pelabuhan Laut	Unit		4		4		4		5		5		
			Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	-	275		368		549		764		764		

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			

		Persentase LSM aktif	%	100,0	100,0		100,00		100,00		100,00		100,00		DPMGP4	
		Persentase Posyandu aktif	%	100,0	100,0		100,00		100,00		100,00		100,00		DPMGP4	
2 5	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					2.050.402.000		2.076.906.020		2.123.169.140		2.190.171.715		2.190.171.715	
2 5 0 2	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					1.900.402.000		1.919.406.020		1.957.794.140		2.016.527.965		2.016.527.965	Dinas Perhubungan
		Pemasangan Rambu-Rambu	%	12	13		14		15		16		16			
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Rasio Index	83,95	83,95		83,95		83,95		83,95		83,95			
		Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	-	275		368		549		764		764			
		Rasio Ijin Trayek	Indeks	15	15		20		25		36		36			
		Persentase Layanan Angkutan Darat	%	5,80	5,80		7,30		9,60		13,45		13,45			
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%		4,50		6,50		7,50		9,50		9,50			
2 5 3	1 0	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					150.000.000		157.500.000,00		165.375.000,00		173.643.750,00		173.643.750,00	Dinas Perhubungan
		Jumlah Arus Penumpang	Trayek	7	7		7		7		7		7			

		Angkutan Umum (Angkutan Darat)												
		Jumlah Pelabuhan Laut, Darat/Udara/ Terminal Bis (Terminal Tipe B)	Unit	3	4		4		4		5		5	
		Jumlah Bandar Udara	Unit		1		1		1		1		1	
		Jumlah Pelabuhan Laut	Unit		4		4		4		5		5	
		Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	-	275		368		549		764		764	

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Pemasangan Rambu- Rambu	%	12	13		14		15		16		16		
		Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%		4,50		6,50		7,50		9,50		9,50		
			%	5,80	5,80		7,30		9,60		13,45		13,45		

		Persentase Layanan Angkutan Darat												
		Rasio Ijin Trayek	Indeks	15	15		20		25		36		36	
		Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Rasio Index	83,95	83,95		83,95		83,95		83,95		83,95	
2 6	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				1.185.288.015		1.197.140.895		1.221.083.713		1.257.716.224		1.257.716.224
2 6 2	1 0	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				835.028.015		843.378.295		860.245.861		886.053.237		886.053.237
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0,51	0,61		0,66		0,07		0,08		0,75	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	%	90,00	92,00		94,00		95,00		97,00		97,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

2 6 3	1 0	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				350.260.000		353.762.600		360.837.852		371.662.988		371.662.988	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
-------------	--------	---	--	--	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	---

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	85,00	86,00		87,00		88,00		89,00		89,00		
		Proporsi rumah tangga dengan akses internet	jumlah	85,00	86,00		87,00		88,00		89,00		89,00		
		Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,76	2,00		2,30		2,45		2,50		2,50		
2 7	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				2.646.211.010		2.834.112.111		3.077.123.323		3.348.778.655		3.348.778.655	
2 7 3	1 0	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		133.100.000	Disperindagkop
		Persentase Jumlah	%		29,09		36,52		43,33		47,69		47,69		

		Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi													
		Persentase Koperasi Tidak aktif	%	33,57	29,03		24,84		23,57		18,75		18,75		
2 7 1 0 4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Jumlah Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persen	37,31	37,31	109.000.000	52,24	119.900.000	67,16	131.890.000	82,09	145.079.000	82,09	145.079.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIDAN UKM
2 7 1 5 0	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Aktif	Persen	0,66	0,71	320.000.000	0,7516	326.400.000	0,7643	359.040.000	0,8125	394.944.000	0,8125	394.944.000	DISPERINDAGKOP
2 7 1 6 0	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Yang Dibina	Unit	30,00	35	160.000.000	40	176.000.000	45	193.600.000	50	212.960.000	50	212.960.000	DISPERINDAGKOP
2 7 1 6 0	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					500.000.000		505.000.000		515.100.000		530.553.000		530.553.000	Disperindagkop
		Persentase Koperasi Aktif	%	66,43	70,97		75,16		76,43		81,25		81,25		

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			

		Persentase Koperasi Tidak aktif	%	33,57	29,03		24,84		23,57		18,75		18,75			
2	17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHAMIKRO (UMKM)	Jumlah Pelatihan Untuk Pelaku UMKM	Persen	0,35	0,14	539.746.250	0,0689	587.600.875	0,0946	646.360.963	0,1281	710.997.059	0,1281	710.997.059	DISPERINDAGKOP
2	17 07	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Sosialisasi Fasilitasi Pemenuhan Izin USP Koperasi	Kegiatan	15	15	100.000.000	30	110.000.000	45	121.000.000	60	133.100.000	60	133.100.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIDAN UKM
2	17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cakupan Bina kelompok pengrajin	%	75,35	76,86	817.464.760	78,54	899.211.236	80,58	989.132.360	82,62	1.088.045.596	82,62	1.088.045.596	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIDAN UKM
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					382.000.000		401.100.000		421.155.000		442.212.750		442.212.750	
2	18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				90.000.000		94.500.000,00		99.225.000,00		104.186.250,00		104.186.250		DPMPTSP
		Rasio daya serab tenaga kerja	%	13,75	15,00		17,00		19,00		21,00		21,00			
		Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	64	66		68		70		72		72			
2	18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Nilai Investasi	Rp Triliun	2.384,00	##### #	55.000.000	##### #	57.750.000,00	##### #	60.637.500,00	##### #	63.669.375,00	2.632,0 0	63.669.375	DPMPTSP

		berskala Nasional (PMDN/PMA)														
2	1804	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	64	66	132.000.000	68	138.600.000	70	145.530.000	72	152.806.500	72	152.806.500	DPMPTSP
2	85	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN OPENANAMAN MODAL	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rp (Milyar)	186	194	60.000.000	197	63.000.000,00	201	66.150.000,00	205	69.457.500,00	205	69.457.500	DPMPTSP

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
21806	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMANMODAL	Laporan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	114,00	120,00	45.000.000	140,00	47.250.000	150,00	49.612.500	170,00	52.093.125	170,00	52.093.125	DPMPTSP
219	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					10.419.982.110		10.964.841.419		12.713.963.764		11.794.764.275		11.794.764.275	
2190	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Organisasi	Organisasi	36,00	29	1.200.000.000	29	1.300.000.000	29	1.400.000.000	29	1.500.000.000	29	1.500.000.000	Disbudparpora

2		pemuda yang aktif														
2 9 3	0	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	10,00	20	8.869.982.110	21	9.306.841.419	15	11.277.263.764	22	9.922.764.275	22	9.922.764.275	Disbudparpora
2 9 4	0	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	36,00	29	350.000.000	29	358.000.000	29	36.700.000	29	372.000.000	29	372.000.000	Disbudparpora
2 0	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					101.255.105		102.267.656		104.313.009		107.442.399		107.442.399	
2 0 2	2 0	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	%	90,00	92,00	101.255.105	94,00	102.267.656	95,00	104.313.009	97,00	107.442.399	97,00	107.442.399	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2 1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					100.000.000		101.000.000		103.020.000		106.110.600		106.110.600	
2 1 2	2 0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	50,00	52,00	100.000.000	54,00	101.000.000	55,00	103.020.000	56,00	106.110.600	56,00	106.110.600	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

2 2 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					7.182.500.000		2.201.250.000		1.978.313.500		2.072.590.635		2.072.590.635	
2 2 2 0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	3	2	2.097.500.000	3	434.500.000	2	485.000.000	3	537.500.000	3	537.500.000	Disbudparpora

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun / Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISONAL	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	3	2	2.500.000.000	3	500.000.000	2	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	Disbudparpora
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen	1	4	105.000.000	3	120.400.000	4	140.600.000	3	170.000.000	3	170.000.000	Disbudparpora
2 22	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Situs dan Kawasan	Persen	1	4	245.000.000	3	650.000.000	4	650.000.000	3	650.000.000	3	650.000.000	Disbudparpora

05		Cagar Budaya yang dilestarikan													
2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	unit	2	4	2.100.000.000	5	360.000.000	6	65.000.000	8	76.000.000	8	76.000.000	Disbudparpora
2 22 07	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)					135.000.000		136.350.000		137.713.500		139.090.635		139.090.635	MAA
		Jumlah gampong/mukim yang melaksanakan peradilan adat yang telah diverifikasi	gampong	35	47		14		50		50		50		
		Persentase penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim	%	30	35		34		40		50		50		
		Persentase keputusan, seruan, imbauan, naskah, hasil kajian adat dan istiadat yang diadopsi	%	25	35		35		40		70		70		

		pemerintah daerah													
2 23	URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					363.761.500		366.899.115		371.257.097		382.044.810		382.044.810	
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					313.761.500		315.899.115		316.257.097		325.044.810		325.044.810	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	3557,00	3900		4000		4500		5000		5000		

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	koleksi	34.430	37.430		40.430		43.430		46.430		46.430		
		Rasio perpustakaan persatuan penduduk	/1.000 Penduduk	1,00	1,2		1,5		1,8		2		2		
		Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	800,00	900		1000		1250		1500		1500		

		Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	5,00	8		10		15		20		20		
		Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	9.121	10.121		11.121		12.121		13.121		13.121		
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%		6,81	50.000.000	10,22	51.000.000	12,22	55.000.000	15,35	57.000.000	15,35	57.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					104.677.550		106.224.326		111.328.812		115.018.676		115.018.676	
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					54.677.550		55.224.326		56.328.812		58.018.676		58.018.676	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	4,54	6,81		10,22		12,22		15,35		15,35		
		Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	1,00	2		3		4		5		5		

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2 24 04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%		6,81	50.000.000	10,22	51.000.000	12,22	55.000.000	15,35	57.000.000	15,35	57.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					81.611.112.491		76.477.122.301		74.576.019.019		72.855.815.491		72.855.815.491	
3 25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN					2.927.500.000		2.257.150.000		2.970.257.500		3.315.581.500		3.315.581.500	
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN		TON	970	3.406,96	945.000.000	3.577,31	557.000.000	3.756,18	949.200.000	3.943,99	1.301.620.000	3.943,99	1.301.620.000,00	DKPP

	PERIKANAN TANGKAP	Produksi Hasil tangkapan nelayan														
3	25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Ikan Pembudidaya	TON	850,49	937,61	1.762.500.000	984,55	1.600.150.000	1.033,28	1.821.057.500	1.085,47	1.913.961.500	1.085,47	1.913.961.500,00	DKPP
3	25 05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Berkurangnya Kasus IUU Fishing (%)	%	N/A	50,00	100.000.000	65,00	100.000.000	70,00	100.000.000	75,00	100.000.000	75,00	100.000.000,00	DKPP
3	25 06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Perikanan	ORANG	N/A	60	120.000.000	-	-	50	100.000.000	-	-	110,00	-	DKPP
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					3.164.291.645		1.597.464.440		1.090.863.884		1.199.950.272		1.199.950.272	
3	26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					2.917.291.645		1.325.694.440		791.993.884		871.193.272		871.193.272	Disbudparpora
			Lama Kunjungan Wisata	Hari	14,63	15,65		15,68		15,70		15,75		15,75		
			Kunjungan Wisata	%	90,06	91,08		91,12		91,15		91,18		91,18		
			Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	Lokasi	7	3		2		4		3		3		
3	26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Lama Kunjungan Wisata	Hari	14,63	15,65	247.000.000	15,68	271.770.000	15,70	298.870.000	15,75	328.757.000	15,75	328.757.000	Disbudparpora
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					66.105.990.246		63.263.843.955		60.759.920.451		57.906.254.659		57.906.254.659	

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3 2 7 0 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.369.240.000		1.409.702.000		1.458.977.100		1.517.503.155		1.517.503.155	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN/DINAS PERKEBUNAN
		Produksi Sektor Pertanian Palawija	Ton	3.836,06	#####	700.000.000,00	#####	707.000.000	#####	721.140.000	#####	742.774.200	3.847,58	742.774.200,00	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN, DINAS PERKEBUNAN
		Produksi Daging Ternak Besar (Sapi dan Kerbau)	Ton	360	360		365		370		375		375		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		Produktivitas Padi	Ton	10.417,7	#####		10.449		10.449		10.449		10.449		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	Ton/Ha	6,70	6,70		6,70		6,70		6,70		6,70		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

		Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Laporan	5	5	223.080.000,00	7	234.234.000,00	10	245.945.700,00	12	258.242.985,00	12	258.242.985,00	DINAS PERKEBUNAN
		Produktifitas Sawit Rakyat	Ton/Ha/Tahun	15.119	15.119	223.080.000,00	15.497	234.234.000,00	15.884	245.945.700,00	16.281	258.242.985,00	16.281	258.242.985,00	DINAS PERKEBUNAN
		Produktifitas tanaman perkebunan lainnya	Ton/Ha/Tahun	10.300	10.300	223.080.000,00	10.558	234.234.000,00	10.822	245.945.700,00	11.092	258.242.985,00	11.092	258.242.985,00	DINAS PERKEBUNAN

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
32703	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					25.245.032.546		22.252.670.838		19.582.741.658		16.546.529.728		16.546.529.728	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		Jumlah Produktivitas Sawit Rakyat	ton/ha/tahun		14,750		15.119		15.497		15.884		15.884		DINAS PERKEBUNAN
		Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Produksi Perkebunan	Unit		40		45		50		55		55		

															DINAS PERKEBUNAN
		Pembangunan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Unit		13		12		15		15		15		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		eningkatan Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		20		25		30		35		40		DINAS PERKEBUNAN
		Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Persen		24,67		27,14		29,85		32,82		32,82		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		Produktivitas Tanaman Perkebunan Lainnya	ton/ha/tahun		10.049		10.300		10.558		10.822		10.822		DINAS PERKEBUNAN
3 2 7 0 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				38.613.200.000		38.699.386.000		38.786.433.860		38.874.352.199		38.874.352.199		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	22,43	24,67	8.618.600.000	27,14	8.704.786.000	29,85	8.791.833.860	32,82	8.879.752.199	32,82	8.879.752.199	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		Pembangunan / Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Produksi Perkebunan	Unit	40	45	9.600.000.000	50	9.600.000.000	55	9.600.000.000	55	9.600.000.000	55	9.600.000.000	DINAS PERKEBUNAN
		Jumlah Produktivitas Sawit Rakyat	Ton/Ha/Tahun	14.750	14.750	8.398.200.000	15.119	8.398.200.000	15.497	8.398.200.000	15.884	8.398.200.000	15.884	8.398.200.000	DINAS PERKEBUNAN

		Peningkatan Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	20	20	3.598.200.000	25	3.598.200.000	30	3.598.200.000	35	3.598.200.000	40	3.598.200.000	DINAS PERKEBUNAN
		Produktivitas Tanaman Perkebunan Lainnya	Ton/Ha/Tahun	10.049	10.049	8.398.200.000	10.300	8.398.200.000	10.558	8.398.200.000	10.822	8.398.200.000	10.822	8.398.200.000	DINAS PERKEBUNAN
		Pembangunan / Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Unit		13		12		15		15		15		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					98.756.200		99.743.762		101.738.637		104.790.796		104.790.796	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		Populasi ternak besar (sapi dan kerbau)	ekor	22.343,00	#####		#####		#####		#####		#### ###		
		Populasi ternak kecil	ekor	17.607,00	#####		#####		#####		#####		#### ###		

		(kambing dan domba)																	
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3 7 5	PROGRAM 2 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN 0 BENCANA PERTANIAN					195.400.000		199.070.000		204.402.750		211.480.778		211.480.778	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN/DINAS PERKEBUNAN
		Produktivitas Sektor Pertanian Palawija	Ton		##### #		##### #		##### #		##### #		3.847,5		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
		Produktivitas Padi	Ton/ha	103.555,35	##### #		103,86		104,17		104,49		104,49		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
						6.01		7.61		0.14		0.14			

		Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian terhadap luas tanam Kelapa Sawit dan Perkebunan lainnya	Peren		100,00	100,00	42.900.000	100,00	45.045.000	100,00	47.297.250	100,00	49.662.113	100,00	49.662.113,00	DINAS PERKEBUNAN
3 7 6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN						326.656.000		342.988.800		360.138.240		378.145.151		378.145.151	DINAS PERKEBUNAN
		Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen		25	25	10.043.000	50	10.545.150	75	11.072.407	100	11.626.027	100	11.626.027	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			

		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	500	500	153.285.000	550	160.949.250	600	168.996.713	650	177.446.548	650	177.446.548	DINAS PERKEBUNAN	
		Persentase penyediaan Perizinan Usaha Pertanian	Persen	100	100	163.328.000	100	171.494.400	100	180.069.120	100	189.072.576	100	189.072.576	DINAS PERKEBUNAN	
3 7 7	2 0 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				257.705.500		260.282.555		265.488.206		273.452.852		273.452.852	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN, DINAS PERKEBUNAN	
		Cakupan Bina Kelompok Tani	%		100		100		100		100		100		DINAS PERKEBUNAN	
		Cakupan Bina Kelompok Petani	%	62,02	53,94		52,30		56,32		60,62		60,62		DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit		1		1		1		1		1		DINAS PERKEBUNAN	
		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit		1		1		1		1		1		DINAS PERKEBUNAN	
3 0	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.400.000.000		1.431.000.000		1.468.420.000		1.512.619.400		1.512.619.400		
3 0 2	3 0	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi SKA	Ada/Tidak	Ada	Ada	30.000.000	Ada	30.600.000	Ada	31.212.000	Ada	31.836.240	Ada	31.836.240	Disperindagkop

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
33003	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar Tradisional/Rakyat Yang Revitalisasi Sesuai Standar	Unit	1	1	500.000.000	2	505.000.000	3	515.100.000	4	530.553.000	5	530.553.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIDAN UKM
3304	PROGRAM SATBILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar/PasarMurah Dalam Satu Tahun	Kegiatan	3	3	610.000.000	4	622.200.000	4	634.644.000	4	647.336.880	4	647.336.880	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIDAN UKM
3305	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Usaha Kecil Menengah Yang Berorientasi Ekspor	Unit	4	4	100.000.000	6	110.000.000	8	121.000.000	10	133.100.000	10	133.100.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIDAN UKM
3306	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah UTTP yang Ditera/Teraulang	Unit	143	143	120.000.000	198	122.400.000	248	124.848.000	298	127.344.960	298	127.344.960	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIDAN UKM

33007	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kegiatan	5	5	40.000.000	6	40.800.000	7	41.616.000	8	42.448.320	8	42.448.320	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIDAN UKM
-------	--	---	----------	---	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
331	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					7.490.000.000		7.488.200.000		7.933.644.000		8.417.564.880		8.417.564.880	
33102	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					7.360.000.000		7.345.200.000		7.776.344.000		8.244.534.880		8.244.534.880	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIDAN UKM
		Jumlah industri Pengolahan	Unit	4.145,00	##### #	4.030.000.000	##### #	3.682.200.000	##### #	3.755.844.000	##### #	3.830.960.880	4.345,00	3.830.960.880	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIDAN UKM

			Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	82,61	82,61	3.330.000.000	86,96	3.663.000.000	91,30	4.020.500.000	98,00	4.413.574.000	98,00	4.413.574.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIDAN UKM
3	3103	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri	Dokumen	2	2	30.000.000	2	33.000.000	3	36.300.000	4	39.930.000	4	39.930.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIDAN UKM

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3104	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	10	10	100.000.000	10	110.000.000	10	121.000.000	10	133.100.000	10	133.100.000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIDAN DAN UKM

3 2 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANS MIGRASI					523.330.600		439.463.906		352.913.184		503.844.780		503.844.780	
3 2 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kawasan	-	1	523.330.600	1	439.463.906,00	1	352.913.184,12	1	503.844.779,64	1	503.844.780	Disnakertrans
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					26.761.434.158		27.029.048.500		27.569.629.470		28.396.718.354		28.396.718.354	
4 1	SEKRETARIAT DAERAH					18.981.358.526		19.171.172.111		19.554.595.553		20.141.233.420		20.141.233.420	
4 1 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	Baik	Sangat Baik	5.995.782.316	Sangat Baik	6.055.740.139	Sangat Baik	6.176.854.942	Sangat Baik	6.362.160.590	Sangat Baik	6.362.160.590	Setdakab
4 1 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	7,00	8	5.995.782.316	9	6.055.740.139	10	6.176.854.942	10	6.362.160.590	10	6.362.160.590	SETDAKAB
4 1 2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penduduk miskin	Persen		500	5.995.782.316	400	6.055.740.139	300	6.176.854.942	200	6.362.160.590	200	6.362.160.590	SETDAKAB

4 1 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian Angka Inflasi	Persen	1,13	1,01	994.011.578	0,90	1.003.951.694	0,70	1.024.030.728	0,50	1.054.751.649	0,50	1.054.751.649	Setdakab (Bag. Ekonomi)
4 2	SEKRETARIAT DPRD					7.780.075.632		7.857.876.388		8.015.033.916		8.255.484.934		8.255.484.934	

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4 2 2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					7.780.075.632		7.857.876.388		8.015.033.916		8.255.484.934		8.255.484.934	Setwan DPRK
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
		Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
		Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					248.565.254.213		220.413.065.166		225.314.869.240		232.814.629.470		232.814.629.470	
5 0	PERENCANAAN					4.206.017.632		4.248.077.808		4.333.039.364		4.463.030.545		4.463.030.545	

1																
50120	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RKKP	Ada/ tidak	Ada	Ada	1.840.334.386	Ada	1.858.737.730	Ada	1.895.912.484	Ada	1.952.789.859	Ada	1.952.789.859		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
50130	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RKKP	Ada/ tidak	Ada	Ada	2.365.683.246	Ada	2.389.340.078	Ada	2.437.126.880	Ada	2.510.240.686	Ada	2.510.240.686		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
502	KEUANGAN					241.751.939.572		213.531.617.379		218.295.792.496		225.584.980.425		225.584.980.425		

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD	
					2023		2024		2025		2026		K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
50202	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					239.440.211.542		211.196.772.069		215.914.250.280		223.131.991.942		223.131.991.942		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
		Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			
		Persentase SILPA	%	1,46	0,56		0,57		0,58		0,6		0,6			
		Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,465	0,51		0,52		0,53		0,54		0,54			
		Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	9,99	1,02		1,04		1,06		1,08		1,08			

		Persentase belanja pendidikan (20%)	%	21,22	20,4		20,81		21,22		21,65		21,65	
		Persentase belanja kesehatan (10%)	%	14,15	10,2		10,4		10,61		10,82		10,82	
		Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	0,83	0,67		0,69		0,7		0,71		0,71	
		Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,14	10,2		10,4		10,61		10,82		10,82	
		Penetapan APBD	Tepat/Tidak Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu	

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
50203	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	774.481.585	WTP	782.226.401	WTP	797.870.929	WTP	821.807.057	WTP	821.807.057	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
50204	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	4,44	7,80	1.537.246.445	7,96	1.552.618.909	8,12	1.583.671.288	8,28	1.631.181.426	8,28	1.631.181.426	BPKD
503	KEPEGAWAIAN					864.128.740		872.770.027		890.225.428		916.932.191		916.932.191	

5 0 3 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					864.128.740		872.770.027		890.225.428		916.932.191		916.932.191	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	4,67	4,67		4,67		4,67		4,67		4,67		
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	jabatan	34	36		36		37		37		37		
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	jabatan	2611	2.612		2.612		2.612		2.615		2.615		
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	jabatan	2001	2.182		2.232		2.232		2.232		2.232		
5 0 4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.540.000.000		1.555.400.000		1.586.508.000		1.634.103.240		1.634.103.240	

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
5 0 4 0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					1.540.000.000		1.555.400.000		1.586.508.000		1.634.103.240		1.634.103.240	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	jam	120	120		120		120		120		120		
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	4,67	4,67		4,67		4,67		4,67		4,67		
5 0 4 0 2															
5 0 5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					203.168.269		205.199.952		209.303.951		215.583.069		215.583.069	

5 0 5 0 2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					203.168.269		205.199.952		209.303.951		215.583.069		215.583.069	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Sudah/ Belum	sudah	sudah		sudah		sudah		sudah		sudah		
		Penerapan SIDA:	Sudah/ Belum	sudah	sudah		sudah		sudah		sudah		sudah		
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasidaerah.	%	2	10		30		50		80		80		

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	64	65		70		75		80		80		
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					2.042.654.186		2.063.080.728		2.104.342.342		2.167.472.613		2.167.472.613	
6 0 1	INSPEKTORAT DAERAH					2.042.654.186		2.063.080.728		2.104.342.342		2.167.472.613		2.167.472.613	
6 0 1 0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan	%	89	90	1.979.528.786	92	1.999.324.074	94	2.039.310.555	96	2.100.489.872	96	2.100.489.872	INSPEKTORAT

		Persentase pelanggaran pegawai	%	0,5	0,4		0,39		0,38		0,37		0,37			
		Jumlah temuan BPK	Temuan	20	18		16		15		14		14			
6 1 3	0 0	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	3	63.125.400	3	63.756.654	3	65.031.787	3	66.982.741	3	66.982.741	INSPEKTORAT
7		UNSUR KEWILAYAHAN				978.806.366		801.202.684		850.206.857		910.154.190		910.154.190		
7 1	0	KECAMATAN				978.806.366		801.202.684		850.206.857		910.154.190		910.154.190		
7 1 2	0 0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai SAKIP	Nilai	36,63 C	50 CC	14.853.045	60 CC	15.001.575	65 B	15.301.607	70 B	15.760.655	70 B	15.760.655	10 Kecamatan
						1.700.000		1.717.000		1.751.340		1.803.880		1.803.880	KECAMATAN KUALA	
						1.500.000		1.515.000		1.545.300		1.591.659		1.591.659	KECAMATAN KUALA PESISIR	
						1.800.000		1.818.000		1.854.360		1.909.991		1.909.991	KECAMATAN DARUL MAKMUR	
						1.300.000		1.313.000		1.339.260		1.379.438		1.379.438	KECAMATAN TRIPA MAKMUR	
						1.253.045		1.265.575		1.290.887		1.329.614		1.329.614	KECAMATAN TADU RAYA	

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			

						1.400.000		1.414.000		1.442.280		1.485.548		1.485.548	KECAMATAN SUKA MAKMUE
						1.600.000		1.616.000		1.648.320		1.697.770		1.697.770	KECAMATAN SEUNAGAN
						1.300.000		1.313.000		1.339.260		1.379.438		1.379.438	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
						1.600.000		1.616.000		1.648.320		1.697.770		1.697.770	KECAMATAN BEUTONG
						1.400.000		1.414.000		1.442.280		1.485.548		1.485.548	KECAMATAN BEUTONGATEUH BANGGALANG
7 0 1 0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RKPK	Ada/ tidak	Ada	Ada	49.495.776	Ada	55.157.854	Ada	61.493.013	Ada	68.584.597	Ada	68.584.597	
						23.247.888	Ada	25.572.677	Ada	28.129.944	Ada	30.942.939	Ada	30.942.939	KECAMATAN BEUTONGATEUH BANGGALANG
						26.247.888	Ada	29.585.177	Ada	33.363.069	Ada	37.641.658	Ada	37.641.658	KECAMATAN SUKA MAKMUE
7 0 1 0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	Baik	SangatBaik	56.681.570	SangatBaik	57.248.386	SangatBaik	58.393.353	SangatBaik	60.145.154	Sangat Baik	60.145.154	10 Kecamatan
						6.031.570		6.091.886		6.213.723		6.400.135		6.400.135	KECAMATAN KUALA

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
						5.700.000		5.757.000		5.872.140		6.048.304		6.048.304	KECAMATAN KUALA PESISIR
						5.800.000		5.858.000		5.975.160		6.154.415		6.154.415	KECAMATAN DARUL MAKMUR
						5.600.000		5.656.000		5.769.120		5.942.194		5.942.194	KECAMATAN TRIPA MAKMUR
						5.800.000		5.858.000		5.975.160		6.154.415		6.154.415	KECAMATAN TADU RAYA
						5.650.000		5.706.500		5.820.630		5.995.249		5.995.249	KECAMATAN SUKA MAKMUE
						5.700.000		5.757.000		5.872.140		6.048.304		6.048.304	KECAMATAN SEUNAGAN
						5.500.000		5.555.000		5.666.100		5.836.083		5.836.083	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
						5.400.000		5.454.000		5.563.080		5.729.972		5.729.972	Kec. Beutong

						5.500.000		5.555.000		5.666.100		5.836.083		5.836.083	KECAMATAN BEUTONGATEUH BANGGALANG	
7 1 2	0 0 0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin	Mesjid	55	60	517.646.500	65	551.891.345	70	588.565.288	75	633.383.781	75	633.383.781	10 Kecamatan
						24.150.000		24.391.500		24.879.330		25.625.710		25.625.710	KECAMATAN KUALA	

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
						24.221.500		24.463.715		24.952.989		25.701.579		25.701.579	KECAMATAN KUALA PESISIR
						24.650.000		24.896.500		25.394.430		26.156.263		26.156.263	KECAMATAN DARUL MAKMUR
						24.500.000		24.745.000		25.239.900		25.997.097		25.997.097	Kec. Tripa Makmur
						24.443.000		24.687.430		25.181.179		25.936.614		25.936.614	KECAMATAN TADU RAYA
						187.982.000		206.780.200		224.671.920		247.139.112		247.139.112	Kec. Suka Makmue
						24.350.000		24.593.500		25.085.370		25.837.931		25.837.931	Kec. Seunagan

						24.000.000		24.240.000		24.724.800		25.466.544		25.466.544	Kec. Seunagan Timur	
						24.350.000		24.593.500		25.085.370		25.837.931		25.837.931	Kec. Beutong	
						135.000.000		148.500.000		163.350.000		179.685.000		179.685.000	Kec. Beutong Ateuh Banggalang	
7 1 3	0 0 0	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat(LPM)	Kelompok	222	222	79.357.945	222	80.031.524	222	81.676.555	222	84.388.252	222	84.388.252	10 Kecamatan
						7.900.000		7.959.000		8.128.780		8.343.843		8.343.843	KECAMATAN KUALA	
						7.350.000		7.400.500		7.502.170		7.850.235		7.850.235	KECAMATAN KUALA PESISIR	

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
						8.500.000		8.555.000		8.756.900		9.050.507		9.050.507	KECAMATAN DARUL MAKMUR
						7.750.000		7.807.500		7.914.250		8.284.678		8.284.678	KECAMATAN TRIPA MAKMUR
						7.657.945		7.744.524		7.910.415		8.156.997		8.156.997	KECAMATAN TADU RAYA
						8.150.000		8.221.500		8.416.330		8.609.120		8.609.120	KECAMATAN SUKA MAKMUE

						8.250.000		8.312.500		8.518.350		8.715.231		8.715.231	KECAMATAN SEUNAGAN
						8.200.000		8.282.000		8.447.840		8.742.175		8.742.175	KECAMATAN SEUNAGANTIMUR
						7.700.000		7.767.000		7.952.740		8.221.622		8.221.622	KECAMATAN BEUTONG
						7.900.000		7.982.000		8.128.780		8.413.843		8.413.843	KECAMATAN BEITONGATEUHBANGGALANG
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Scor	Baik	Sangat Baik	10.000.000	Sangat Baik	10.220.000	Sangat Baik	10.380.000	Sangat Baik	10.430.000	Sangat Baik	10.430.000	KECAMATAN SEUNAGANTIMUR
70105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai SAKIP	Nilai	36,63 C	50 CC	26.723.565	60 CC	26.990.801	65 B	27.530.617	70 B	28.356.535	70 B	28.356.535	10 Kecamatan

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		2026		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						2.600.000		2.626.000		2.678.520		2.758.876		2.758.876	KECAMATAN KUALA
						2.700.000		2.727.000		2.781.540		2.864.986		2.864.986	KECAMATAN KUALA PESISIR

						3.000.000		3.030.000		3.090.600		3.183.318		3.183.318	KECAMATAN DARUL MAKMUR
						2.600.000		2.626.000		2.678.520		2.758.876		2.758.876	KECAMATAN TRIPA MAKMUR
						2.700.000		2.727.000		2.781.540		2.864.986		2.864.986	KECAMATAN TADU RAYA
						2.300.000		2.323.000		2.369.460		2.440.544		2.440.544	KECAMATAN SUKA MAKMUE
						2.700.000		2.727.000		2.781.540		2.864.986		2.864.986	KECAMATAN SEUNAGAN
						3.023.565		3.053.801		3.114.877		3.208.323		3.208.323	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
						2.500.000		2.525.000		2.575.500		2.652.765		2.652.765	KECAMATAN BEUTONG
						2.600.000		2.626.000		2.678.520		2.758.876		2.758.876	KECAMATAN BEUTONGATEUH BANGGALANG
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	Baik	SangatBaik	26.723.565	SangatBaik	26.990.801	SangatBaik	27.530.617	SangatBaik	28.356.535	Sangat Baik	28.356.535	10 Kecamatan

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target				Kondisi Akhir Pada Tahun 2026	OPD
					2023	2024	2025	2026		

					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
						2.600.000		2.626.000		2.678.520		2.758.876		2.758.876	KECAMATAN KUALA	
						2.700.000		2.727.000		2.781.540		2.864.986		2.864.986	KECAMATAN KUALA PESISIR	
						3.000.000		3.030.000		3.090.600		3.183.318		3.183.318	KECAMATAN DARUL MAKMUR	
						2.600.000		2.626.000		2.678.520		2.758.876		2.758.876	KECAMATAN TRIPA MAKMUR	
						2.700.000		2.727.000		2.781.540		2.864.986		2.864.986	KECAMATAN TADU RAYA	
						2.300.000		2.323.000		2.369.460		2.440.544		2.440.544	KECAMATAN SUKA MAKMUE	
						2.700.000		2.727.000		2.781.540		2.864.986		2.864.986	KECAMATAN SEUNAGAN	
						3.023.565		3.053.801		3.114.877		3.208.323		3.208.323	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR	
						2.500.000		2.525.000		2.575.500		2.652.765		2.652.765	KECAMATAN BEUTONG	
						2.600.000		2.626.000		2.678.520		2.758.876		2.758.876	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG	
7	01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai SAKIP	Nilai	36,63 C	50 CC	131.195.375	60 CC	137.877.329	65 B	147.366.875	70 B	170.267.432	70 B	170.267.432	10 Kecamatan

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
						7.130.600		7.201.906		7.345.944		7.566.322		7.566.322	KECAMATAN KUALA
						6.208.150		6.270.232		6.395.636		6.587.505		6.587.505	KECAMATAN KUALA PESISIR
						7.860.320		7.938.923		8.097.702		8.340.633		8.340.633	KECAMATAN DARUL MAKMUR
						6.840.350		6.908.754		7.046.929		7.258.336		7.258.336	KECAMATAN TRIPA MAKMUR
						6.121.350		6.182.564		6.306.215		6.495.401		6.495.401	KECAMATAN TADU RAYA
						54.000.000		57.750.000		63.525.000		81.877.500		81.877.500	KECAMATAN SUKA MAKMUE
						5.784.155		5.841.997		5.958.836		6.137.602		6.137.602	KECAMATAN SEUNAGAN
						5.600.000		5.656.000		5.769.120		5.942.194		5.942.194	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
						7.650.450		7.726.955		7.881.494		8.117.938		8.117.938	KECAMATAN BEUTONG
						24.000.000		26.400.000		29.040.000		31.944.000		31.944.000	KECAMATAN BEUTONGATEUH BANGGALANG
7	01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Scor	Baik	SangatBaik	66.129.025	SangatBaik	66.790.315	SangatBaik	68.126.122	SangatBaik	70.169.905	Sangat Baik	70.169.905	10 Kecamatan

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026	OPD	
					2023		2024		2025		2026				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
						7.130.600		7.201.906		7.345.944		7.566.322		7.566.322	KECAMATAN KUALA
						6.208.150		6.270.232		6.395.636		6.587.505		6.587.505	KECAMATAN KUALA PESISIR
						7.860.320		7.938.923		8.097.702		8.340.633		8.340.633	KECAMATAN DARUL MAKMUR
						6.840.350		6.908.754		7.046.929		7.258.336		7.258.336	KECAMATAN TRIPA MAKMUR
						6.121.350		6.182.564		6.306.215		6.495.401		6.495.401	KECAMATAN TADU RAYA
						6.320.750		6.383.958		6.511.637		6.706.986		6.706.986	KECAMATAN SUKA MAKMUE
						5.784.155		5.841.997		5.958.836		6.137.602		6.137.602	KECAMATAN SEUNAGAN
						5.600.000		5.656.000		5.769.120		5.942.194		5.942.194	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
						7.650.450		7.726.955		7.881.494		8.117.938		8.117.938	KECAMATAN BEUTONG
						6.612.900		6.679.029		6.812.610		7.016.988		7.016.988	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG

8	UNSUR KEWILAYAHAN				1.939.990.526	2.109.537.231	2.326.561.576	2.598.020.823	2.598.020.823	
8 0 1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1.939.990.526	2.109.537.231	2.326.561.576	2.598.020.823	2.598.020.823	

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026		OPD
					2023		2024		2025		2026		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
8 0 1 0 2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pemahaman Wawasan Kebangsaan	Orang	-	70	190.000.000	70	228.000.000	70	273.600.000	70	328.320.000	320	328.320.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 0 1 0 3	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	Tidak ada	Ada	1.164.783.526	Ada	1.181.228.161	Ada	1.214.446.324	Ada	1.265.270.114	Ada	1.265.270.114	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 0 1 0 4	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Ada/tidak	Tidak ada	Ada	10.207.000	Ada	10.309.070	Ada	10.515.251	Ada	10.830.709	Ada	10.830.709	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8 1 5	0 0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Fasilitasi FKUB	Persen		100,00	200.000.000	100,00	300.000.000	100,00	400.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	Kesbangpol
8 1 6	0 0	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATANKUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing	Persen	100	100	375.000.000	100	390.000.000	100	428.000.000	100	493.600.000	100	493.600.000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
9		UNSUR KEWILAYAHAN					75.468.743.687		76.223.431.124		77.747.899.746		80.080.336.739		80.080.336.739	
9 0 1		KEKHUSUSAN ACEH					75.468.743.687		76.223.431.124		77.747.899.746		80.080.336.739		80.080.336.739	

Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026	OPD		
					2023		2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
9 1	0	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH														

2	0				34.060.157.701	34.400.759.278	35.088.774.464	36.141.437.697	36.141.437.697	DINAS SYARIAT ISLAM
		Pemberdayaan sarana dan prasarana keagamaan (%)	Unit	463	463	463	463	463	463	
		Pembinaan dakwah agama bagi masyarakat	Orang	220	222	222	222	222	222	
		Rata-Rata Jamaah mesjid (Agung dan Jamik) Per Waktu Sholat	Orang	38	50	60	60	60	60	
		Jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin	Mesjid	55	60	65	70	75	75	
		Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi	Orang	95	100	105	110	115	115	
		Jumlah Penghafal Al-Qur'an (Hafiz) 30 Juz	Orang	80	90	100	110	120	120	
		Angka melek Al-Quran penduduk usia 06 - 21 tahun, yang beragama islam	%	90	92	94	96	98	98	

		Angka melek Al-Quran penduduk umur > 21 tahun, yang beragama islam	%	87	88		89		90		91		91			
		Standarisasi Pendidikan Dayah	Ada/Tidak	Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada			
Kode	Program	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Tahun/Target								Kondisi Akhir Pada Tahun 2026	OPD		
					2023		2024		2025		2026					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		Persentase Dayah Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe)	%	85	86		87		88		89		89			
9 1 2	0 0 0	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Standarisasi Pendidikan Dayah	Ada/Tidak	Ada	Ada	34.060.157.701	Ada	34.400.759.278	Ada	35.088.774.464	Ada	36.141.437.697	36.141.437.697,48	Dinas Syariat Islam	
9 1 3	0 0 0	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi	Orang	95	100	125.854.050	105	127.112.590,50	110	129.654.842,31	115	133.544.487,58	115	133.544.488	MPU
9 1 4	0 0 0	PROGRAM BAITUL MAL					7.222.574.235		7.294.799.977		7.440.695.977		7.663.916.856	7.663.916.856	Baitul Mal	

		Jumlah ZIS yang terhimpun	Rp. Milyar	792	832	874	918	964	964		
		Jumlah Penghimpunan ZISWAF	Jumlah Penghimpunan ZISWAF	Rp (000)	792	832	874	918	918		
		Jumlah ZISWAF yang disalurkan	Jumlah ZISWAF yang disalurkan	p (000)	792	832	874	918	918		

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Adapun peraturan – peraturan terkait dengan penyusunan laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal baik Bidang Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat serta Urusan Sosial adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Sosial No. 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Intensitas dan Beban Kerja Urusan Pemerintah Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;
8. Peraturan Menteri Sosial No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Perda tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
19. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya;
20. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya;

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (%)	72,15	73,1	1,32
2	Angka Kemiskinan (%)	17,25	16,94	-1,80
3	Angka Pengangguran (%)	5,74	5,22	-9,06
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,83	4,38	-35,87
5	Pendapatan Per kapita (juta rupiah)	11,871	12.432	104.620
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	3,12	2,3	-26,28

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Hasil

No. IKK	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian
1.a.1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan 4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD 5. Jumlah pendidik pada PAUD 6. Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini 7. Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah yang berwenang 	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 1845. Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 6985	26,41374
1.a.2	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 18256. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 19675	92,7878

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat 19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat 			
--	--	--	--	--	--

1.a.3	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 13. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik 16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah 	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 6837. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 9517	71,83987
-------	------------	---	---	---	----------

		<p>17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</p> <p>18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat</p> <p>19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat</p>			
1.a.4	Pendidikan	<p>1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi</p> <p>2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah</p> <p>3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan</p> <p>4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan</p> <p>5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan</p> <p>6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)</p> <p>7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah</p> <p>8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1</p>	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 258. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 1816	14,20705
1.b.1	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 173. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 179108	0,965898
1.b.2	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 1. Jumlah RS di kabupaten/kota = 1	100
1.b.3	Kesehatan	<p>1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia</p> <p>2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal</p>	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 2909. Jumlah sasaran ibu bersalin di kabupaten/kota = 3179	91,50676

1.b.4	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 2852. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 3179	89,71375
1.b.5	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 2510. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 2538	98,89677
1.b.6	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 15579. Jumlah balita di kabupaten/kota = 19407	80,27516
1.b.7	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 16444. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 16444	100
1.b.8	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 21495. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 29489	72,89159
1.b.9	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 10957. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 10932	100,2287
1.b.10	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 11700. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 16663	70,21545
1.b.11	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 3186. Jumlah	108,478

				penderita DM di kabupaten/kota = 2937	
1.b.12	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 424. Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 363	116,8044
1.b.13	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 3187. Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 2485	128,2495
1.b.14	Kesehatan	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 3655. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 3334	109,6281
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha) 2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) 3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA) 4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha) 5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota 6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota 7. Data prasarana dan sarana pengamanan pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 0. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 0	0
1.c.2	Pekerjaan Umum dan	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi,	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi	0

	Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m) 3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA) 4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha) 5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota 6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota 7. Data prasarana dan sarana pengamanan pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota 	dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 0. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 0	
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik 2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik 3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik 	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 316.22. luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 2982264	0,010603
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada/Tidak) 2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak) 3. Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak) 4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM 5. Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain. 	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = 979. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 894	109,5078
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S 	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang	0

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T 3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T 4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja 5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja 6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic 7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar 8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman 9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman 10. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat 11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja 12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja 13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD 14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja 		memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD. Jumlah rumah di Kabupaten A	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi 2. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting 3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak) 4. Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak) 5. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan 6. Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kab/kota 	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = 49. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 49	100

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota 8. Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat 			
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota 2. Panjang jalan yang dibangun 3. Panjang jembatan yang dibangun 4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi) 5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan 6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi 7. Panjang jembatan yang direhabilitasi 8. Panjang jalan yang dipelihara 9. Panjang jembatan yang dipelihara 	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota;	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 523287. Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 924421	56,607
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota 2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota 3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota 4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir 5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota 6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN 7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya 8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala 	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 5. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota = 713	0,701262

	<p>9. Tersedianya data dan profil PD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota</p> <p>10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.</p> <p>11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis</p> <p>12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota</p> <p>13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota</p> <p>14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui</p> <p>15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota</p> <p>19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota</p>			
--	---	--	--	--

		<p>20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota</p> <p>21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota</p> <p>22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui</p> <p>23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p>			
1.c.8. 2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota</p> <p>2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota</p> <p>3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota</p> <p>4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir</p> <p>5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota</p> <p>6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN</p> <p>7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya</p> <p>8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan</p>	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 248. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 248	100

		<p>sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala</p> <p>9. Tersedianya data dan profil PD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota</p> <p>10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.</p> <p>11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis</p> <p>12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota</p> <p>13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota</p> <p>14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui</p> <p>15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya</p> <p>18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota</p>			
--	--	---	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> 19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota 20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota 21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota 22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui 23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya 25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya 			
1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya 2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam 3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam 4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi 5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi 6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi 7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana 8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi 9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan 	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 19. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 20	95

1.d.2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM 2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM 3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM 4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM 5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM 6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah 	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 0	0
1.d.3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh 10Ha 2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH 3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh 	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 260.93. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 260.93	100
1.d.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah rumah di kab/kota 2. Jumlah unit PK RTLH 3. Jumlah rumah tidak layak huni 4. Jumlah rumah yang tidak dihuni 5. Rasio rumah dan KK 6. Jumlah rumah pembangunan baru 	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 0. Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 51704	0
1.d.5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU 2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum 3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan 4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site) 5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH 6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU 7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi 8. Jumlah pengembang yang terregistrasi 	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 0. Jumlah unit rumah kab/kota = 0	0

		9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan			
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani 2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan 3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan 4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS 5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum 6. Tersedianya sarana prasarana minimal 	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	0
1.e.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	0
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal 2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 13866. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 13788	100,5657
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal 2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal 3. Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan 4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan 5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana 6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan 	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 138. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 119818	0,115175
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB 2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana 	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 6216.	11511,11

	Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana 		Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 54	
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran 	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat = 21. Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 32	65,625
1.e.7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	13,59
1.f.1	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki 	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	1331,959

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM 3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk 4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau 5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki 6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi 7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar 8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang 9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu 10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter 11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia 12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan 13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah 14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan 15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial 16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat 	<p>pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)</p>	<p>yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 2584. Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 194</p>	
--	--	--	---	--	--

		<p>17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan</p> <p>18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar</p> <p>19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga</p> <p>20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga</p> <p>21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk</p>			
1.f.2	Sosial	<p>1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan</p> <p>2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang</p> <p>3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki</p> <p>4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan</p> <p>5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial</p> <p>6. Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia</p>	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota;	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 27. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 8	337,5
2.a.1	Tenaga Kerja	<p>1. Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.</p> <p>2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.</p> <p>3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.</p>	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 1. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota = 5	20
2.a.2	Tenaga Kerja	<p>1. Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster</p> <p>2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi</p> <p>3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan</p> <p>4. Persentase LPK yang terakreditasi</p> <p>5. Persentase LPK yang memiliki perizinan</p> <p>6. Jumlah penganggur yang dilatih</p> <p>7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan</p>	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 432. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 9791	4,412215

		8. Persentase penyerapan lulusan 9. Lulusan bersertifikat kompetensi 10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan 11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)			
2.a.3	Tenaga Kerja	1. Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas 2. Data tingkat produktivitas total	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 8095.62. Jumlah tenaga kerja = 9791	82,6843
2.a.4	Tenaga Kerja	1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) 2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan 4. Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah. 5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih 7. Jumlah mogok kerja 8. Jumlah penutupan perusahaan 9. Jumlah perselisihan kepentingan 10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan 11. Jumlah perselisihan PHK 12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK 13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite 14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan 15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 6. Jumlah Perusahaan = 50	12

2.a.5	Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota 2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota 3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota 4. Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota 5. Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja 6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota 7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota. 8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER) 9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi 10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata 11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi keputungan 12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja 13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya 14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk 	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 28. Jumlah pencaker yang terdaftar = 70	40
2.g.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG 2. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota 	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD = 1429344446. Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = 0	0

2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak 2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal 3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani 4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan 5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota) 	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 14. Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 34	41,17647
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan 2. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih 3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan 4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota 5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi 6. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi 7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani 	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 18. Jumlah penduduk perempuan = 18	100000
2.h.1	Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan 2. Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya 3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan local 4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang 	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota = 50. Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan = 20419	0,24487

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan 6. Tertanganinya kerawanan pangan 7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan 8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar 			
2.i.1	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota 	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	0
2.i.2	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota 	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum. Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0
2.i.3	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	0

		5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota			
2.i.4	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota 	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; = 434. Jumlah penerima tanah obyek landreform = 503	86,28231
2.i.5	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota 	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah. Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	0
2.i.6	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3. SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee. 4. Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota 	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 21. Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 0	0

2.j.1	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan kab/kota terhadap: a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota		79,65
2.j.2	Lingkungan Hidup	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 18307. Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota = 14078	130,0398
2.j.3	Lingkungan Hidup	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota 2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kab/kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota 3. Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota 4. Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat 5. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = 1. usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 4	25
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP. Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	0
2.k.1.2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA. Jumlah anak usia 0-17 tahun	0
2.k.1.3	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir. Jumlah anak usia 0-18 tahun	0

2.k.1.4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan akta perkawinan 2. Penerbitan akta perceraian 3. Penerbitan akta kematian 4. Penyajian data kependudukan 	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama. Jumlah PD	0
2.l.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan 4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan 	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 11. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 21	52,38095
2.l.2	Pemberdayaan masyarakat dan desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan 4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan 	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 0. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 119	0
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan 2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun 3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) 5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang 	TFR (Angka Kelahiran Total)		0,41

		berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK;			
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP 2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3. Pemerintah Daerah kab/kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif 4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan; 	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 19815. Jumlah Pasangan Usia Subur = 28827	68,73764
2.m.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah 2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI) 	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 840. Jumlah Pasangan Usia Subur = 28827	2,913935
2.n.1	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C 2. Terlaksananya pelayanan uji berkala 3. Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi 4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota; 	Rasio konektivitas kabupaten/kota		94
2.n.2	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C 2. Terlaksananya pelayanan uji berkala 3. Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi 4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota; 	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		100
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo 2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo 	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 44. Jumlah PD = 44	100

		3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah			
2.0.2	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar 3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik 5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik 6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah 8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah 9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah 10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) 11. Persentase data yang dapat berbagi pakai 	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi;	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 18. Jumlah Layanan Publik = 18	100

		<p>12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city</p> <p>13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo</p> <p>14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government;</p>			
2.o.3	Komunikasi dan Informatika		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 115915. Jumlah penduduk = 121285	95,57241
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	<p>1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>6. Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota</p>	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas;	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 7. Jumlah seluruh koperasi aktif = 16	43,75

		8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan 9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota 13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro 2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS) 3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra 4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha 5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran 6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan 7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 757. Jumlah usaha mikro keseluruhan = 1884	40,18047
2.q	Penanaman Modal	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = -1241250000.	-7,68494

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal 3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal 4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting 5. Kegiatan pameran penanaman modal 6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal 7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal 8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal 9. Laporan realisasi penanaman modal 10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota 11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMD 12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota 		Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = 161517204750	
2.r.1	Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. mendapat pelatihan kewirausahaan 2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan 	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	0
2.r.2	Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda 2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan 	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota. jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	0
2.r.3	Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan 2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah 	Peningkatan prestasi olahraga		0
2.s.1	Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya buku profil daerah 2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan 3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan 4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 44. jumlah PD = 44	100

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik 7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik 			
2.s.2	Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya buku profil daerah 2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan 3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan 4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik 7. Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik 	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah;	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 44. jumlah PD = 44	100
2.t	Persandian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan 2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah 3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah 4. Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan 	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi = 0. Jumlah area penilaian = 0	0
2.u	Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) 2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman) 	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan. Jumlah cagar budaya yang terdata	0

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) 4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) 5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) 6. Perlindungan cagar budaya kab/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran) 7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya kab/kota ke luar kab/kota dengan dukungan data 8. Pengembangan cagar budaya kab/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi) 9. Pemanfaatan cagar budaya kab/kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata) 10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum 11. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan 12. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota 13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya 14. Pembentukan tim ahli cagar budaya kab/kota 15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya 16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman 17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman kabupaten/kota 18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman 19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat 			
2.v.1	Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio kecukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		69,93

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Persentase keterampilan memanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat 3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk 4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan 5. Jumlah pemasyarakatangemarmembaca di masyarakat 			
2.v.2	Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya 2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa 3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) 	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		58,92
2.w.1	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009);		179
2.w.2	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK 2. 2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK 3. 3. Penyelamatan arsip perangkat daerah kab/kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di kab/kota 4. 4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab/kota yang sesuai NSPK5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kab/kota yang sesuai NSPK 	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		47,33

3.a	Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota = 4350.46. Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 4561.86	95,36593
3.b.1	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataa 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1) = 0. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 0	0
3.b.2	Pariwisata	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1) = 9118. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 63121	14,44527

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat 			
3.b.3	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat 	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual = 1069. Jumlah kamar yang tersedia = 1145	93,36245

3.b.4	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat; 	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 44.87. Total PDRB Berlaku = 12431.71	0,360932
3.b.5	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat 	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata = 2847445752. Total realisasi PAD = 99767461416	2,854083

3.c.1	Pertanian	1. Sarana pertanian yang diberikan 2. Prasarana pertanian yang digunakan 3. Penerbitan izin usaha pertanian 4. Persentase prasarana yang digunakan 5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 11801. luas panen = 12159	97,05568
3.c.2	Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = -12429. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 26566	-46,78536
3.d	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3. Pemulihan ekosistem pada Tahura 4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			100
3.e	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin = 100. Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = 100	100
3.f.1	Perdagangan	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :a. Pusat perbelanjaanb. Toko swalayan 2. Persentase penerbitan TDG 3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG 4. ersentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : 5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota 6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu 7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya 8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 25. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = 25	100
3.f.2	Perdagangan	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi = 30700. RDKK = 74475	41,22189

3.f.3	Perdagangan	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan 2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan. jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	0
3.g.1	Perindustrian	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n- Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = 804. Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 1080	74,44444
3.g.2	Perindustrian	1. 1. Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK		100
3.g.3	Perindustrian	1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 21. Jumlah izin yang dikeluarkan = 757	2,774108
3.g.4	Perindustrian		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	0
3.g.5	Perindustrian		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	0
3.g.6	Perindustrian	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		100
3.h	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota		0

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	Capaian
4.a.1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = 117745577783. Jumlah APBD = 2515238481942.9	4,681289
4.a.2	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	Jumlah PAD = 108884846318.38. Jumlah Pendapatan pada APBD = 1285445081865.4	8,470595
4.a.3	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		70,08
4.a.4	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		83,07
4.a.5	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures = 252429930430. jumlah belanja APBD = 1299793400077	19,42077
4.a.6	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan		100
4.b.1	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 0. jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 1473	0
4.b.2	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif. Jumlah seluruh pengadaan	0
4.b.3	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan. total belanja operasi dan modal	0
4.b.4	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n)	0

		Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	- Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1). Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	
4.c.1	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 968. Jumlah seluruh pegawai = 1353	71,54472
4.c.2	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 237. seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 1353	17,51663
4.c.3	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 54. seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 237	22,78481
4.d.1	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja = 2608466729090.2. Total Belanja APBD = 2819527182766	7,485668
4.d.2	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi = 98949167333.43. Total PAD dalam APBD = 1285445081865.4	92,30234
4.d.3	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset		100
4.d.4	Manajemen Keuangan	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA = 20466286804.93. total belanja anggaran tahun sebelumnya = 1286823928558	1,59045
4.e.1	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 1116279045. Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = 1196292509	93,31155
4.e.2	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 9. total jumlah dokumen yang telah dirinci = 9	100

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud kewajiban kepala daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024. Pada pembahasan ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut. Pengukuran capaian berdasarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 dan dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator, dan dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPJMD. Adapun target Kinerja bupati Nagan Raya Tahun 2024 yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

a. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Tabel 2.4
Tujuan, Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target	Realisasi	SKPK
1	Mewujudkan Partisipasi Masyarakat dalam Pesta Demokrasi	Persentase Partisipasi Masyarakat yang Ikut dalam Pemilu	88%	86,43	Kesbangpol
1.1.	Meningkatnya hak-hak politik masyarakat Kab. Nagan Raya, serta peran lembaga demokrasi.	Persentase partisipasi masyarakat yang ikut dalam pemilu	88%	86,43	Kesbangpol
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	66,00	Belum Penilaian	Bag Organisasi
2,1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP	Belum Penilaian	BPKD
		Nilai LPPD	Sangat Baik	2.1245 / Tinggi	Bag Pemerintahan
		Nilai SAKIP	60/CC	60,02/C	Bag Organisasi
		Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan	Level 3	Level 3	Inspektorat

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target	Realisasi	SKPK
		Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi			
2,2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2,30	2,94	Diskominfotik
		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai "IKM" yang Baik	70%	11,36 %	Bag Organisasi
		Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	94%		Diskominfotik
3	Menegakkan Pelaksanaan Syariat Islam	Indeks Pembangunan Syariat Islam	75,00	70	DSI
3,1	Meningkatnya nilai-nilai syariat Islam dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat	Persentase ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dihimpun	100%	89,43 %	Baitul Mal
		Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Syariat Islam	85%		Satpol PP/WH
4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	71,20	72,15	Bappeda
4,1	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	9,18	9,25	Disdik
4,2	Menurunnya angka stunting	Prevalensi Stunting	15,40	3,17	Dinkes
5	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Persentase pertumbuhan ekonomi	7,57	7,57	Bappeda
5,1	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Rp. 500.000.000.000	Rp. 999.357.601.352	DPMPTSP
5,2	Meningkatnya Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	2%		DPMPTSP
5,3	Menurunnya beban penduduk miskin	Angka Kemiskinan	17,25 %	17,25 %	Bappeda
		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3,12 %	3,12 %	Bappeda
		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	1,05 %	1,05 %	Bappeda
5,4	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,92 %	5,22 %	Disnakertrans
5,5	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	7,96 % /8,47 %	8,34 %	BPKD
5,6	Menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan	Indeks Gini	0,266	0,236	Bappeda
6	Meningkatkan Infrastruktur berkualitas	Cakupan ketersediaan	35%		Bappeda

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target	Realisasi	SKPK
		infrastruktur berkualitas			
6,1	Meningkatnya kualitas dan akses sanitasi	Persentase akses sanitasi	74,48 %	74,48	Dinas Perkim
6,2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni yang terbangun/direhab	100 unit	45 Unit	Dinas Perkim
6,3	Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	43,55	45,23	Dinas PUPR

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 - 2024

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Target RPD		TARGET RKPD 2024	TARGET 2024 HASIL RAKORTEKBANG	SKPK
				2023	2024			
1	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD
2	Tingkat Kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	3	3	3	3	Inspektorat
3	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Scor	Baik	baik	baik	baik	baik	Setdakab (Bag. Pemerintahan)
4	Nilai SAKIP	Nilai	42,38 c	50 CC	60 CC	60 CC	60 CC	Setdakab (Bag. Organisasi)
5	Jumlah ZIS yang terhimpun	Rp. Milyar	823	832	874	874	874	Baitul Mal
6	Persentase penyelesaian Kasus pelanggaran syariat islam	%	100	81	85	85	85	Satpol PP dan WH
7	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	Unit	4	100	100	100	100	PERKIM
8	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	3,06	3,02	3,00	3,00	3,00	Dinsos
9	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,76	0,93	0,92	0,92	0,92	Dinsos
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,84	4,08	3,92	3,92	3,92	Disnakertrans

11	Persentase akses sanitasi	%	73,48	73,98	4,48	74,48	74,48	PERKIM
12	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	%	91	92	94	94	94	DISKOMINFOTIK
13	Prevalansi Stunting	%	28,8	16,5	15,4	15,4	15,4	Dinkes
14	Kabupaten Layak Anak	Level	Pratama	madya	prata ma	pratama	pratama	DPMGP4
15	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	9,5	7,80	7,96	7,96	7,96	BPKD
16	Nilai Realisasi Investasi(PMDN/PMA)	Rp (Triliun)	2590	240	2530	2530	2530	DPMPPTSP

d. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Untuk mengetahui tingkat efektifitas penggunaan sumberdaya maka perlu dilakukan analisis efesensi terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada. Dalam analisis efesensi dilakukan perbandingan antara pencapaian kinerja sasaran strategis dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran untuk yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut. Penghitungan analisis efesensi dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja dengan tingkat capaian mencapai 100% atau lebih.

Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis dan capaian kinerja yang tidak mencapai 100% tidak dilakukan analisis efesensi.

Tabel 2.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target								Kondisi Akhir 2026	Sumber Data	
						2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi		Jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam pemilu	Persen	0,87	0,87	1.739.990.526	0,88	1.809.537.231	0,89	1.926.561.576	0,95	2.098.020.823	0,95	2.098.020.823	Kesbangpol, Setdakab (Bag. Pemerintahan)
1.1		Meningkatnya hak-hak politik masyarakat Nagan Raya, serta peran lembaga demokrasi.	Jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam pemilu	persen	0.85	0.87	1.739.990.526	0.88	1.809.537.231	0.89	1.926.561.576	0.95	2.098.020.823	0.95	2.098.020.823	Kesbangpol, Setdakab (Bag. Pemerintahan)
2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Persen	62,58	65,00	678.759.705.334	66,00	660.738.383.037	67,00	669.190.546.670	68,00	674.434.754.562	68,00	674.434.754.562	Seluruh OPD
2.1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP/WDP	WTP	WTP	250.433.521.060	WTP	222.191.290.115	WTP	228.408.845.313	WTP	237.206.248.414	WTP	237.206.248.414	BPKD (Semua SKPK)
2.2		Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	26,14	59,00	2.404.128.740	60,00	2.428.170.027	65,00	2.476.733.428	70,00	2.551.035.431	70,00	2.551.035.431	BKPSDM (Semua SKPK)
2.3		Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1,76	2,00	3.821.543.120	2,30	3.952.658.551	2,45	4.083.029.222	2,50	4.148.362.349	2,50	4.148.362.349	Diskominfotik, Setdakab (Bag. Organisasi)

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target						Kondisi Akhir 2026	Sumber Data			
						2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp			2026	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		berbasis elektronik														
2.4		Meningkatnya Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Nilai LPPD	Scor	Baik	Sangat Baik	13.925.392.108	Sangat Baik	14.064.646.029	Sangat Baik	14.345.938.950	Sangat Baik	14.776.317.118	Sangat Baik	14.776.317.118	Setdakab
2.5		Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai	36,63 C	50 CC	408.175.120.306	60 CC	418.101.618.315	65 B	419.875.999.757	70 B	415.752.791.251	70 B	415.752.791.251	Setdakab (Bag. Organisasi)
3	Menegakkan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat		Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Persen	60,00	70,00	76.776.116.687	76,00	77.572.946.234	81,00	79.150.041.275	85,00	81.551.704.047	85,00	81.551.704.047	Dinas Syariat Islam / Satpol PP dan WH
3.1		Meningkatnya peran ulama dalam pembangunan	Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi	Orang	95,00	100,00	34.186.011.751	105,00	34.527.871.869	110,00	35.218.429.306	115,00	36.274.982.185	115,00	36.274.982.185	Dinas Syariat Islam / Sekretariat MPD/Sekretariat MPU
3.2		Tersalurkan nya ZIS (Zakat, Infaq dan Sadaqah)	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	Rasio	100,00	100,00	7.222.574.235	100,00	7.294.799.977	100,00	7.440.695.977	100,00	7.663.916.856	100,00	7.663.916.856	Sekretariat Baitul Mal
3.3		Tegaknya Syariah dalam bermasyarakat	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syariat Islam	Persen	60,00	70,00	1.146.256.500	76,00	1.186.787.445	81,00	1.236.159.310	85,00	1.300.405.624	85,00	1.300.405.624	Satpol PP dan WH
3.4		Meningkatnya kualitas Pendidikan dayah	Persentase Dayah yang memenuhi standarisasi	Persen	85,00	86,00	34.221.274.201	87,00	34.563.486.943	88,00	35.254.756.682	89,00	36.312.399.382	89,00	36.312.399.382	Dinas Syariat Islam



NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target								Kondisi Akhir 2026	Sumber Data	
						2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp	2026	Rp			
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Kebudayaan serta Kapasitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,31	70,2	148.656.287.790	71,2	197.866.026.193	71,53	198.717.220.757	74,42	200.767.710.102	69,31	200.767.710.102	Dinas Pendidikan, Dinkes, RSUD, DPMGP4, Bappeda, Disbudparpora, Perkim, Disnakertrans, Disperindagkop
4.1		Meningkatnya akses pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,96	9,00	59.665.000.000	9,18	111.375.000.000	9,24	108.928.654.146	9,32	109.153.242.069	9,32	109.153.242.069	Dinas Pendidikan
4.2		Meningkatnya kualitas pendidikan	Persentase guru yang lulus pendidikan profesi guru (PPG)	Persen	83,5	83,72	120.000.000	83,91	125.000.000	84,03	140.000.000	84,46	140.000.000	84,46	140.000.000	Dinas Pendidikan
4.3		Meningkatnya kualitas Penduduk	Angka Partisipasi Kasar	Persen	100,00	100,00	1.213.439.050	100,00	1.283.123.441	100,00	1.362.585.909	100,00	1.457.063.487	100,00	1.457.063.487	Dinas Pendidikan
4.4		Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	25,00	15,00	10.419.982.110	35,00	10.964.841.419	25,00	12.713.963.764	40,00	11.794.764.275	40,00	11.794.764.275	Disbudparpora
4.5		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Persentase Masyarakat yang menerapkan PHBS	Persen	75,00	80,00	2.680.197.790	85,00	2.800.202.968	90,00	2.940.613.428	95,00	3.102.441.430	95,00	3.102.441.430	Dinkes, RSUD
4.6		Menurunnya angka stunting	Prevalansi Stunting	Persen	17,30	16,50	37.655.857.713	15,40	38.032.416.290	14,20	38.793.064.616	13,00	39.956.856.554	13,00	39.956.856.554	Dinkes, Perkim, DPMGP4, DKPP,
4.7		Meningkatnya Peran Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,07	92,67	6.145.782.316	92,98	6.385.740.139	93,28	6.526.854.942	93,58	6.732.160.590	93,58	6.732.160.590	Bappeda
4.8		Tercapainya status	Kabupaten Layak Anak	Predikat	-	Pratama	908.765.000	madya	1.549.352.650	madya	1.630.539.703	Nindy	1.732.355.894	Nindy	1.732.355.894	DPMGP4

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target						Kondisi Akhir 2026	Sumber Data			
						2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp			2026	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Kabupaten Layak Anak														
4.9		Tertanganin ya Covid-19	Jumlah kasus Covid yang tertangani	Persen	85,00	90,00	98.000.000	92,00	98.980.000	95,00	100.959.600	99,00	103.988.388	99,00	103.988.388	Dinkes
4.10		Meningkatn ya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan	Tipe Rumah Sakit Umum Daerah	Tipe	C	C	20.360.000.000	B	20.563.600.000	B	20.974.872.000	B	21.604.118.160	B	21.604.118.160	RSUD
4.11		Meningkatn ya life Skill masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan	Persen	19,93	23,42	2.206.763.811	23,42	2.486.519.286	23,42	2.626.799.149	23,42	2.918.128.620	23,42	2.918.128.620	Disnakertrans/Disperindagkop
4.12		Meninngkat nya Kelestarian Kebudayaan	Penyelengga raan festival seni dan budaya	Festival	3	2	7.182.500.000	3	2.201.250.000	2	1.978.313.500	3	2.072.590.635	3	2.072.590.635	Disbudparpora/MAA
5	Meningkat kan Pertumbuh an Ekonomi melalui Penyediaa n Prasarana dan Sarana Infrastrukt ur Strategis untuk Sektor Pertanian, Perkebuna n, Perikanan serta Pengemban gan UMKM Terpadu (Hulu-Hilir), Agroindust ri dan		Persentase Penduduk Miskin	Persen	18,23	18,00	179.207.736.022	16,00	158.789.950.678	15,50	159.595.056.535	15,00	161.697.800.069	15,00	161.697.800.069	Dinsos, Setdakab, Perkim, Distanak, DKPP, Disperindagkop, Disbu n, Bappeda, DPMGP4, PUPR, DLH, BPBD

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target						Kondisi Akhir 2026	Sumber Data			
						2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp			2026	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kawasan Industri Terpadu (KIT) dalam Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran															
5.1		Menurunnya beban penduduk miskin	Persentase Penduduk miskin yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	75,00	80,00	735.244.115	85,00	742.596.556	90,00	757.448.487	95,00	780.171.942	95,00	780.171.942	Dinsos, Setdakab
5.2		Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,62	0,64	11.689.428.930	0,65	14.802.673.789	0,66	14.951.171.664	0,68	15.211.568.214	0,68	15.211.568.214	DPMGP4
5.3		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penduduk miskin	Persen	98	500	5.995.782.316	400	6.055.740.139	300	6.176.854.942	200	6.362.160.590	200	6.362.160.590	Dinsos, Setdakab
5.4		Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,99	4,08	765.057.601	3,92	688.440.907	3,78	609.502.685	3,64	768.427.406	3,64	768.427.406	Disnakertrans
5.5		Meningkatnya Pendapatan Daerah	Jumlah Pemberdayaan ekonomi	Persen	75,00	80,00	4.893.538.090	85,00	3.351.683.349	90,00	2.886.215.172	95,00	3.053.395.698	95,00	3.053.395.698	Setdakab
5.6		Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten	Indeks	71,64	74,27	2.492.305.960	75,59	2.741.534.256	76,91	3.015.688.082	78,23	3.317.256.190	78,23	3.317.256.190	DKPP
5.7		Meningkatnya kontribusi sektor	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan	Persen	44,94	45,11	40.936.755.006	45,34	37.484.919.191	45,55	36.223.930.451	45,70	34.307.545.836	45,70	34.307.545.836	Distanak/ DKPP/ Disbun

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target						Kondisi Akhir 2026	Sumber Data			
						2023	Rp	2024	Rp	2025	Rp			2026	Rp	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		perekonomian	perikanan terhadap PDRB ADHB													
5.8		Terkendalin ya tingkat inflasi daerah	Jumlah angka Inflasi	Persen	1,13	1,01	994.011.578	0,90	1.003.951.694	0,70	1.024.030.728	0,50	1.054.751.649	0,50	1.054.751.649	Bappeda/Setdakab (Bag. Ekonomi)
5.9		Meningkatn ya kualitas jalan kabupaten	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	40,95	42,25	42.491.439.274	43,55	23.228.141.914	44,85	24.709.006.247	46,15	26.970.948.676	46,15	26.970.948.676	PUPR/ Dishub
5.10		Meningkatn ya kinerja sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tani	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Persen	22,43	24,67	51.893.871.000	27,14	52.112.863.710	29,85	52.334.046.347	32,83	52.557.440.811	32,83	52.557.440.811	PUPR/ Distannak/ Disbun
5.11		Meningkatn ya kualitas dan akses air bersih	Persentase penduduk berakses air minum	Persen	4,27	6,40	670.359.152	7,42	677.062.744	8,41	690.603.998	9,37	711.322.118	9,37	711.322.118	Perkim
5.12		Meningkatn ya kualitas dan akses sanitasi	Persentase Rumah tangga bersanitasi	Persen	73,48	73,98	7.274.500.000	74,48	7.287.245.000	74,98	7.312.989.900	75,48	7.352.379.597	75,48	7.352.379.597	Perkim
5.13		Meningkatn ya dan ketersediaa n rumah layak huni yang terjangkau	Jumlah rumah layak huni yang terbangun	Unit	1.029,00	1.079,00	2.112.206.500	1.129,00	2.115.328.565	1.179,00	2.121.635.136	1.229,00	2.131.284.190	1.229,00	2.131.284.190	Perkim/Baitul Mal
5.14		Meningkatn ya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73,96	57,42	3.283.420.500	57,65	3.488.154.705	57,88	3.712.126.252	58,11	3.957.246.515	58,11	3.957.246.515	DLH
5.15		Meningkatn ya ketahanan terhadap Kebenbenaan	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,36	0,38	2.979.816.000	0,40	3.009.614.160	0,41	3.069.806.443	0,42	3.161.900.636	0,42	3.161.900.636	BPBD

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dengan alokasi dana berasal dari pemberi tugas, yang dilaksanakan oleh daerah dan ataupun desa.

1. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melandasi penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.105/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
18. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 902/ 70/ 2024 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
19. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Nomor 820/103/I.1 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Tugas Pembantuan pada Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Tahun Anggaran 2024;
20. DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: DIPA NO. 018. 08. 4.069140/2024 Tanggal 17 November 2021;
21. Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota tentang Usulan Pengelola Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Pada tahun 2024 Kabupaten Nagan Raya hanya menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat. Kementerian/Lembaga yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2024 adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.105/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.

B. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan dalam Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya adalah Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi

C. Anggaran

Pada tahun 2024 Kabupaten Nagan Raya menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat. Kementerian/Lembaga yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya, Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan serta Dinas Perkebunan dengan anggaran sebagai berikut

- a. Anggaran yang Digunakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya untuk melaksanakan Tugas Pembantuan bersumber dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.889.477.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Nagan Raya

Pada tahun 2024 Kabupaten Nagan Raya menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat. Kementerian/Lembaga yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2024 adalah Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah Program Kewirausahaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Koperasi dengan Nomor DIPA : SP DIPA-044.01.1.401742/2024, Kementerian Pertanian, Kementerian

3.1.1 Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/Lembaga atas penugasan yang tertuang dalam peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan. Program Program Kewirausahaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Koperasi, dengan capaian 100 persen.

3.1.2 Realisasi

Realisasi Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya kepada Perangkat Daerah Penerima Tugas Pembantuan yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya, Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan serta Dinas Perkebunan dengan rinci sebagai berikut:

- a. Program Kewirausahaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Koperasi dengan Nomor DIPA : SP DIPA-044.01.1.401742/2024 dengan total serapan anggaran adalah sebesar Rp. 2.870.329.353 (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) atau mencapai 99,34 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.889.477.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- b. Lebih jelasnya, realisasi tugas pembantuan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat
yang dilaksanakan oleh Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

No.	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan penugasan (TP)	Program, kegiatan, output, dan rincian kegiatan	Lokasi	OPD pelaksana	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran	%	Realisasi capaian target (%)	Ket
1.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	SP DIPA-044. 01.1. 401742/2024	Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi - Kegiatan: Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM	Nagan Raya	Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya	2,889,477,000,-	2.870.329.353,-	99,34	100	
2.	Badan Pangan Nasional		Program: Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas - Kegiatan: Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - Kegiatan: Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Nagan Raya	Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan	82.270.000	78.688.400	92 %	100	

3.2 Permasalahan dan Kendala

Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan sebagai berikut:

Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Nagan Raya masih sangat minim, baik Program maupun anggarannya yg diberikan oleh Pemerintah Pusat. Sementara kebutuhan pelaksanaan Program-program strategis diperlukan segera untuk dilaksanakan.

3.3 Saran dan Tindak Lanjut

Adapun saran untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan kedepan sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan mengusulkan dan mengintensifkan berbagai upaya untuk diakomodirnya Program dan kegiatan yang selaras dengan Program pada Instansi Pusat, sehingga diharapkan dengan adanya berbagai kegiatan dan Program Tugas Pembantuan yang dilaksanakan di Kabupaten Nagan Raya dapat mendukung dan mempercepat Pelaksanaan Pembangunan yang berkerakyatan di Kabupaten Nagan Raya.

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Pendidikan diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan jenis pelayanan dasar SPM bidang pendidikan yaitu sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini.

Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini dihitung dari jumlah warga negara usia 5- 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.

b. Pendidikan Dasar.

Capaian SPM Pendidikan dasar dihitung dari jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.

c. Pendidikan Kesetaraan.

Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan dihitung dari jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

4.1.2 Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, target capaian untuk masing-masing pelayanan dasar tersebut yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.1
Target Capaian SPM Urusan Pendidikan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	96 %	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah	100 %	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
		yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		

4.1.3 Realisasi

Pada tahun 2024, berbagai upaya pelaksanaan pencapaian target SPM urusan pendidikan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan capaian SPM urusan pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya. Berikut ini disampaikan realisasi capaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 bidang urusan Pendidikan :

Tabel. 4.2
Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					52.30 %
1.	Pendidikan Anak Usia Dini					66.55 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	51.08 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	6985	4460	2525	63.85 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					15.47 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	77.33 %
	1. Angka partisipasi sekolah	%	100	102.5	-2.5	100.00 %
	2. Angka partisipasi	%	100	78.2	21.8	78.20 %

	murni					
	3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	100	75.5	24.5	75.50 %
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	100	82.2	17.8	82.20 %
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	100	20	80	20.00 %
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	78.5	21.5	78.50 %
	7 . Indeks distribusi guru	%	100	92.1	7.9	92.10 %
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	69.5	30.5	69.50 %
	9 . Proporsi PTK penggerak*	%	100	100	0	100.00 %
2 .	Pendidikan Dasar					82.96 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	68.77 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	29.192	25.093	4.099	85.96 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					14.19 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	70.94 %
	SD (2024)					67.25 %

	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	104.7	-4.7	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	98.42	1.58	98.42 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	100	52.09	47.91	52.09 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	45.03	54.97	45.03 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	5	3.66	1.34	73.20 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	1.45	1.55	48.33 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	70.46	29.54	70.46 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	100	69.37	30.63	69.37 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	100	52.67	47.33	52.67 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	94.55	5.45	94.55 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	96.09	3.91	96.09 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	35.1	64.9	35.10 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	100	39	61	39.00 %
	SMP (2024)					74.63 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	107.29	-7.29	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	99.03	0.97	99.03 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	100	58.53	41.47	58.53 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	58.68	41.32	58.68 %
	5 . Perbedaan	Nilai	5	4.04	0.96	80.80 %

	skor literasi					
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	1.59	1.41	53.00 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	69.46	30.54	69.46 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	100	70.1	29.9	70.10 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	100	56.1	43.9	56.10 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	95.4	4.6	95.40 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	96.22	3.78	96.22 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	32.9	67.1	32.90 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	100	100	0	100.00 %
3 .	Pendidikan Kesetaraan					7.40 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	3.26 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	38297	1561	36736	4.08 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					4.14 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	20.69 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	40.8	59.2	40.80 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	40.8	59.2	40.80 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	3	1	2	33.33 %

4 . Kemampuan numerasi	Nilai	3	1	2	33.33 %
5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	25	10	15	40.00 %
6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	15	10	5	66.67 %
7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	100	1	99	1.00 %
8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	100	1	99	1.00 %
9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	100	1	99	1.00 %
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	10	90	10.00 %
11 . Indeks distribusi guru	%	100	1	99	1.00 %
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	100	0	100	0.00 %
13 . Proporsi PTK penggerak*	%	100	0	100	0.00 %

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Dari gambaran tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. INDEKS PENCAPAIAN SPM SECARA KESELURUHAN

- Indeks pencapaian SPM secara keseluruhan: 52,30%
- Capaian penerima layanan dasar (target 80%): 66,55%
- Capaian mutu minimal layanan dasar (target 20%): 15,47%

Indeks pencapaian SPM masih berada di bawah standar nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan layanan dasar dan mutu layanan minimal di Kabupaten Nagan Raya.

2. CAPAIAN SPM SEKTOR PENDIDIKAN

Sektor pendidikan dibagi menjadi tiga bagian utama:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Dasar (SD dan SMP)
3. Pendidikan Kesetaraan

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Jumlah yang harus dilayani: 6.985 orang
- Jumlah yang sudah terlayani: 4.460 orang (63,85%)
- Jumlah yang belum terlayani: 2.525 orang
- Pencapaian mutu layanan PAUD: 77,33%

Tabel4.3
Indikator Kinerja PAUD

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Kekurangan (%)
1	Angka partisipasi sekolah	100	102,5	+2,5 (Melebihi target)
2	Angka partisipasi murni	100	78,2	21,8
3	Satuan PAUD terakreditasi minimal B	100	75,5	24,5
4	Guru PAUD berkualifikasi S1/D-IV	100	82,2	17,8
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	100	20	80
6	Kecukupan formasi guru ASN	100	78,5	21,5
7	Indeks distribusi guru	100	92,1	7,9
8	Proporsi PTK bersertifikat	100	69,5	30,5
9	Proporsi PTK penggerak	100	100	0

Temuan Utama PAUD:

- Angka partisipasi sekolah sudah melebihi target (102,5%), tetapi angka partisipasi murni masih rendah (78,2%).
- Hanya 75,5% PAUD yang sudah terakreditasi minimal B, perlu peningkatan akreditasi sekolah.

- Kekurangan pengawas sekolah PAUD sangat signifikan (hanya 20% dari target).
- Hanya 69,5% PTK yang bersertifikat, masih perlu pelatihan dan peningkatan kompetensi.

b. Pendidikan Dasar (SD & SMP)

SD (Sekolah Dasar)

- Jumlah yang harus dilayani: 29.192 orang
- Jumlah yang sudah terlayani: 25.093 orang (85,96%)
- Jumlah yang belum terlayani: 4.099 orang
- Pencapaian mutu layanan SD: 70,94%

Tabel 4.4
Indikator Kinerja SD

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Kekurangan (%)
1	Angka partisipasi kasar	100	104,7	+4,7
2	Angka partisipasi sekolah	100	98,42	1,58
3	Kemampuan literasi	100	52,09	47,91
4	Kemampuan numerasi	100	45,03	54,97
5	Indeks distribusi guru	100	96,09	3,91
6	Proporsi PTK bersertifikat	100	35,1	64,9
7	Proporsi PTK penggerak	100	39	61

Temuan Utama SD:

- Angka partisipasi kasar sudah sangat baik (104,7%).
- Kemampuan literasi dan numerasi masih rendah, di bawah 55%.
- Hanya 35,1% PTK yang bersertifikat, memerlukan peningkatan SDM tenaga pengajar.

SMP (Sekolah Menengah Pertama)

- Pencapaian mutu layanan SMP: 74,63%

Tabel 4.5
Indikator Kinerja SMP

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Kekurangan (%)
1	Angka partisipasi sekolah	100	99,03	0,97
2	Kemampuan literasi	100	58,53	41,47
3	Kemampuan numerasi	100	58,68	41,32
4	Indeks distribusi guru	100	96,22	3,78
5	Proporsi PTK bersertifikat	100	32,9	67,1

Temuan Utama SMP:

- Kemampuan literasi dan numerasi meningkat dari SD tetapi masih di bawah 60%.
- Hanya 32,9% PTK yang bersertifikat, lebih rendah dibandingkan SD.

c. Pendidikan Kesetaraan

- Jumlah yang harus dilayani: 38.297 orang
- Jumlah yang sudah terlayani: 1.561 orang (4,08%)
- Jumlah yang belum terlayani: 36.736 orang
- Pencapaian mutu layanan kesetaraan: 20,69%

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Pendidikan Kesetaraan

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Kekurangan (%)
1	Angka partisipasi sekolah	100	40,8	59,2
2	Kemampuan literasi	3	1	2
3	Indeks keamanan sekolah	100	1	99
4	Proporsi PTK bersertifikat	100	0	100

Temuan Utama Pendidikan Kesetaraan:

- Partisipasi pendidikan sangat rendah (hanya 4,08% yang terlayani).
- Indeks keamanan dan kebhinekaan hanya 1%, sangat rendah.
- Tidak ada PTK bersertifikat dan tenaga penggerak, perlu pembenahan total.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Pendidikan PAUD: Fokus pada akreditasi PAUD, distribusi pengawas, dan sertifikasi guru.
2. Pendidikan Dasar: Meningkatkan literasi dan numerasi serta meningkatkan kualifikasi guru bersertifikat.
3. Pendidikan Kesetaraan: Butuh perhatian khusus, terutama dalam peningkatan partisipasi dan tenaga pengajar.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Berdasarkan dokumen anggaran yang telah dianalisis, berikut adalah ringkasan besarnya anggaran yang dialokasikan dan serapannya:

1. Total Anggaran SPM Kabupaten Nagan Raya

- Total Anggaran yang Direncanakan: Rp 64.257.362.962
- Total Anggaran yang Terealisasi: Rp 55.616.191.575
- Persentase Serapan Anggaran: 86,55%

Serapan anggaran cukup tinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar program telah dijalankan dengan baik.

2. Rincian Anggaran per Program

Tabel 4.7
Rincian Anggaran per Program

No	Program	Anggaran Direncanakan (Rp)	Anggaran Terealisasi (Rp)	Serapan (%)
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	33.333.359.599	30.758.116.577	92,27%
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	21.253.554.833	17.493.313.921	82,31%
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.313.672.530	6.134.779.337	73,79%
4	Pengelolaan Pendidikan	1.356.776.000	1.229.981.740	90,65%

No	Program	Anggaran Direncanakan (Rp)	Anggaran Terealisasi (Rp)	Serapan (%)
	Nonformal/Kesetaraan			
TOTAL	64.257.362.962	55.616.191.575	86,55%	

3. Temuan Utama dalam Serapan Anggaran

1. Serapan anggaran untuk pendidikan dasar (SD) mencapai 92,27%, tertinggi dibandingkan program lainnya.
2. Anggaran untuk SMP memiliki serapan 82,31%, masih cukup tinggi tetapi beberapa kegiatan belum terealisasi sepenuhnya.
3. PAUD memiliki serapan terendah, yaitu 73,79%, menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan program.
4. Program pendidikan kesetaraan memiliki serapan 90,65%, cukup tinggi tetapi jumlah anggarannya yang kecil menunjukkan bahwa program ini kurang mendapat perhatian.

4. Program dan Kegiatan dengan Serapan Rendah

Beberapa kegiatan yang tidak berjalan sama sekali (0% serapan):

- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD dan SMP
- Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/guru
- Pengadaan alat rumah tangga sekolah
- Pemeliharaan rutin sarana, prasarana, dan utilitas sekolah
- Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah
- Pengembangan konten digital untuk pendidikan
- Penyediaan infrastruktur TIK untuk sekolah

Kegiatan-kegiatan ini penting untuk menunjang mutu pendidikan, namun masih belum mendapatkan perhatian yang cukup dalam implementasi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Serapan anggaran secara keseluruhan cukup tinggi (86,55%), tetapi masih ada beberapa program yang tidak terlaksana.

2. PAUD perlu mendapat perhatian lebih, karena serapan anggarannya rendah (73,79%) dan beberapa program penting belum berjalan.
3. Program pembangunan infrastruktur sekolah (unit baru, rumah dinas, fasilitas TIK) perlu diperjelas kebijakan dan penganggarannya agar bisa direalisasikan di tahun mendatang.
4. Pendidikan kesetaraan memerlukan lebih banyak alokasi anggaran, mengingat jumlah yang dialokasikan masih kecil dibandingkan program lainnya.

4.1.5 Dukungan Personil

Untuk melaksanakan penerapan SPM Bidang Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, personil yang terlibat di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.8
Data Personil Bidang Pendidikan Yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Personil Tahun 2024	
		ASN	KONTRAK
1.	Pendidikan Dasar	1518	106
2.	Pendidikan Kesetaraan	-	104
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	127	511

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, 2024

4.1.6 Permasalahan

Capaian pelayanan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2024 masih belum sesuai dengan target SPM yang ditetapkan Pemerintah. Berbagai permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam upaya pencapaian target SPM yaitu :

a. Pengumpulan Data

- 1) Data anak tidak sekolah belum terintegrasi dengan dapodik sehingga terdapat ATS yang belum terdata
- 2) Belum Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dengan baik karena kendala biaya operasional

- 3) Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan masih kurang akibat terkendalanya biaya operasional
- 4) Data anak tidak sekolah belum terintegrasi dengan dapodi sehingga terdapat ATS yang belum terdata
- 5) Belum Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dengan baik karena kendala biaya operasional

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan masih kurang akibat terkendalanya biaya operasional.

b. Penghitungan Kebutuhan

Pengumpulan data belum optimal karena data dari Kemenag dan hanya berupa rekapitulasi, tidak dapat akses untuk melihat data personil berdasarkan usia dan alamat. belum semua admin dapodik mengupdate data tepat waktu dan tidak melakukan sinkronisasi, serta terdapat satuan pendidikan yang tidak aktif tapi tidak segera mengajukan penutupan sekolah - belum semua operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi dapdik secara berkala.

c. Perencanaan Dan Penganggaran

- 1) Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah.
- 2) Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar belum maksimal karena belum maksimalnya data yang tersedia.

d. Pelaksanaan

Belum maksimal SOP di Dinas tentang pelaksanaan penerapan SPM

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Urusan Kesehatan diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.2.2 Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, target capaian untuk masing-masing pelayanan dasar bidang kesehatan tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.9
Target Capaian SPM Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	97 %	Setiap Tahun
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	87 %	Setiap Tahun
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan	72 %	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
		layanan kesehatan		
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	82 %	Setiap Tahun
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	81 %	Setiap Tahun
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	49 %	Setiap Tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	81 %	Setiap Tahun
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	80 %	Setiap Tahun
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	81 %	Setiap Tahun
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	92 %	Setiap Tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga TBC	Jumlah warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Setiap Tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	78 %	Setiap Tahun

4.2.3 Realisasi

- 1 Pada tahun 2024, berbagai upaya pelaksanaan pencapaian target SPM Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu

Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap capaian SPM urusan kesehatan yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya. Berikut ini disampaikan realisasi capaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 bidang urusan kesehatan :

Tabel 4.10
Capaian SPM Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					96.67 %	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						97.05 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	3163	3163	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.05 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	85.25 %	
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	18366	8540	9826	46.50 %	
	2. Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	585180	284670	300510	48.65 %	
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	3163	3163	0	100.00 %	
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	3163	3163	0	100.00 %	
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	3163	3163	0	100.00 %	
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	3163	3163	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	hamil)						
	7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	3163	1911	1252	60.42 %	
	8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	3163	3163	0	100.00 %	
	9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	3163	1625	1538	51.38 %	
	10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	15	15	0	100.00 %	
	11 . Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	217	3163	-2946	100.00 %	
	12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	16	16	0	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	15	15	0	100.00 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	15	15	0	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	15	15	0	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	15	15	0	100.00 %	
	17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	3251	1373	1878	42.23 %	
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						99.12 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum		
			Yang Harus	Yang Terlayani	Terlayani	80.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Dilayani				
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2699	2699	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.12 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	95.58 %	
	1. Formulir partograf	Formulir	2699	2699	0	100.00 %	
	2. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	2699	2699	0	100.00 %	
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	2699	1625	1074	60.21 %	
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	15	15	0	100.00 %	
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	16	16	0	100.00 %	
	6. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	15	15	0	100.00 %	
	7. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	15	15	0	100.00 %	
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	15	15	0	100.00 %	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	15	15	0	100.00 %	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						98.85 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN		Jumlah Total Yang	Jumlah Total Yang	Yang Belum Terlayani	80.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	DASAR (80%)		Harus Dilayani	Terlayani			
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2539	2539	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.85 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	94.26 %	
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	2539	1700	839	66.96 %	
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	2539	1938	601	76.33 %	
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	2539	1938	601	76.33 %	
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	2539	2539	0	100.00 %	
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	2539	2539	0	100.00 %	
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2539	2539	0	100.00 %	
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	15	15	0	100.00 %	
	8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	16	16	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	15	15	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	15	15	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	15	15	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	15	15	0	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	15	15	0	100.00 %	
	14 . Kader Kesehatan	Orang	1370	1370	0	100.00 %	
4 .	Pelayanan Kesehatan Balita						84.25 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	65.04 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
			Dilayani				
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	19407	15779	3628	81.31 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.20 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	96.02 %	
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	19407	15779	3628	81.31 %	
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	19407	15779	3628	81.31 %	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	19407	15779	3628	81.31 %	
	4 . Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	1199	1126	73	93.91 %	
	5 . Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	9419	9446	-27	100.00 %	
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	1017	2748	-1731	100.00 %	
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	1471	1771	-300	100.00 %	
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	1961	1540	421	78.53 %	
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	2207	5104	-2897	100.00 %	
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	736	736	0	100.00 %	
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	760	760	0	100.00 %	
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	760	760	0	100.00 %	
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	29725	29725	0	100.00 %	
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	15	15	0	100.00 %	
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	15	15	0	100.00 %	
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	15	15	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	15	15	0	100.00 %	
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	15	15	0	100.00 %	
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	15	15	0	100.00 %	
	20 . Guru PAUD	Orang	222	222	0	100.00 %	
	21 . Kader Kesehatan	Orang	1370	1370	0	100.00 %	
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar						98.22 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :						
		Orang	22936	22936	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						18.22 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	91.11 %	
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku	22936	22936	0	100.00 %	
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	22936	22936	0	100.00 %	
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	22936	22936	0	100.00 %	
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam	Formulir	204	204	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian	AKSI
			-4	-5	-6		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)						
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	222	0	222	0.00 %	
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet	6072	6072	0	100.00 %	
	7 . Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	15	15	0	100.00 %	
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	1351	1351	0	100.00 %	
	9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	15	15	0	100.00 %	
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan	Vaksin	1663	666	997	40.05 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian	AKSI
			-4	-5	-6		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)						
	(sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)						
	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	30	30	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	15	15	0	100.00 %	
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	15	15	0	100.00 %	
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	15	15	0	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	15	15	0	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	15	15	0	100.00 %	
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	222	222	0	100.00 %	
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	222	222	0	100.00 %	
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif						98.25 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	79.71 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	112915	112500	415	99.63 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.54 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	92.72 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	15	15	0	100.00 %	
	2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	15	15	0	100.00 %	
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	15	15	0	100.00 %	
	4 . Alat : Glukometer	Unit	15	15	0	100.00 %	
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	15	15	0	100.00 %	
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	15	15	0	100.00 %	
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	15	15	0	100.00 %	
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	15	15	0	100.00 %	
	9 . Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	15	15	0	100.00 %	
	10 . Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	56966	8636	48330	15.16 %	
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	31	31	0	100.00 %	
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	15	15	0	100.00 %	
	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	18366	8540	9826	46.50 %	
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	15	15	0	100.00 %	
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	15	15	0	100.00 %	
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	15	15	0	100.00 %	
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	15	15	0	100.00 %	
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	15	15	0	100.00 %	
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	222	222	0	100.00 %	
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut						84.36 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	65.90 %	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	18087	14899	3188	82.37 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.46 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	92.31 %	
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	15	15	0	100.00 %	
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	15	15	0	100.00 %	
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	15	15	0	100.00 %	
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	15	15	0	100.00 %	
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	15	15	0	100.00 %	
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	18087	0	18087	0.00 %	
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	15	15	0	100.00 %	
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	15	15	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	15	15	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	15	15	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	15	15	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	15	15	0	100.00 %	
	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	222	222	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	11663	11663	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	15	15	0	100.00 %	
	2. Obat Hipertensi	Paket	11663	11663	0	100.00 %	
	3. Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	15	15	0	100.00 %	
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	15	15	0	100.00 %	
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	15	15	0	100.00 %	
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang	15	15	0	100.00 %	
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	15	15	0	100.00 %	
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	15	15	0	100.00 %	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	15	15	0	100.00 %	
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi	Orang	15	15	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	kesehatan dan ilmu perilaku						
	11 . Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang	15	15	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	15	15	0	100.00 %	
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2937	3186	-249	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	2937	2963	-26	100.00 %	
	2 . Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	15	15	0	100.00 %	
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	2936	2936	0	100.00 %	
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	15	15	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian	AKSI
			-4	-5	-6		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	15	15	0	100.00 %	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	15	15	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	15	15	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	15	15	0	100.00 %	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	15	15	0	100.00 %	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	15	15	0	100.00 %	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	15	15	0	100.00 %	
	12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	15	15	0	100.00 %	
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat						100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1232	1232	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau	Buku	15	15	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian	AKSI
			-4	-5	-6		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)						
	bentuk fisik atau elektronik)						
	2 . Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenus	1232	1232	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	15	15	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	15	15	0	100.00 %	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	15	15	0	100.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	15	15	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	15	15	0	100.00 %	
	8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	15	15	0	100.00 %	
	9 . Tenaga profesional lainnya	Orang	15	15	0	100.00 %	
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2485	2485	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	2485	2485	0	100.00 %	
	2. Reagen Zn TB	Kit	10	10	0	100.00 %	
	3. Masker bedah dan Masker N95	Paket	2485	2485	0	100.00 %	
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	2600	2600	0	100.00 %	
	5. Katrid tes cepat molekuler	Test	2485	2485	0	100.00 %	
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	2485	2485	0	100.00 %	
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	17	17	0	100.00 %	
	8. Tuberkulin	Vial	20	20	0	100.00 %	
	9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	30	30	0	100.00 %	
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	25	25	0	100.00 %	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	25	25	0	100.00 %	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	0	100.00 %	
	13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	30	30	0	100.00 %	
	14. Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	2	2	0	100.00 %	
	15. Kader Kesehatan	Orang	222	222	0	100.00 %	
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia						100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	(Human Immunodeficiency Virus)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	3333	3333	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	3333	3333	0	100.00 %	
	2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	3333	3333	0	100.00 %	
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sduit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	3333	3333	0	100.00 %	
	4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	3333	3333	0	100.00 %	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	19	19	0	100.00 %	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	16	16	0	100.00 %	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	16	16	0	100.00 %	
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	16	16	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Capaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	16	16	0	100.00 %	
	10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	222	222	0	100.00 %	

Berdasarkan data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor kesehatan, berikut adalah analisis rinci mengenai pencapaian layanan kesehatan di Kabupaten Nagan Raya.

1. Indeks Pencapaian SPM Kesehatan Secara Keseluruhan

- Indeks pencapaian SPM kesehatan: 96,67% (tergolong tinggi).
- Capaian penerima layanan dasar: 80% dari target.
- Capaian mutu layanan dasar: 17,05% dari target minimal 20%.

Meskipun secara keseluruhan layanan kesehatan telah mencapai angka yang baik, mutu layanan dasar masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target minimal.

2. Analisis Capaian per Jenis Layanan Kesehatan

Berikut adalah analisis per sektor layanan kesehatan:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

- Jumlah ibu hamil yang harus dilayani: 3.163 orang.
- Jumlah yang sudah terlayani: 3.163 orang (100%).
- Capaian mutu minimal layanan: 85,25%.

Permasalahan:

1. Vaksin Tetanus Difteri (Td) hanya 46,50% dari target, masih jauh dari pencapaian yang diharapkan.

2. Tablet tambah darah baru tersalurkan 48,65%, berisiko meningkatkan anemia pada ibu hamil.
3. Skrining triple eliminasi (Hepatitis B, Sifilis, HIV) hanya mencapai 60,42%, masih di bawah target.
4. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) hanya mencapai 51,38%, padahal ini penting untuk pemantauan kesehatan ibu dan janin.
5. Kunjungan 6 kali selama kehamilan (K6) hanya 42,23%, kurang dari setengah target.

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

- Jumlah ibu bersalin yang harus dilayani: 2.699 orang.
- Jumlah yang sudah terlayani: 2.699 orang (100%).
- Capaian mutu minimal layanan: 95,58% (sangat baik).

Permasalahan:

1. Buku KIA hanya diterima oleh 60,21% ibu bersalin, masih di bawah target.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

- Jumlah bayi baru lahir yang harus dilayani: 2.539 orang.
- Jumlah yang sudah terlayani: 2.539 orang (100%).
- Capaian mutu minimal layanan: 94,26%.

Permasalahan:

1. Vaksin Hepatitis B dosis tunggal baru 66,96%, masih di bawah target.
2. Vitamin K1 dan salep/tetes mata antibiotik hanya 76,33%, berisiko terhadap infeksi.
3. Kurangnya pemeriksaan awal bayi baru lahir, karena cakupan masih di bawah 80%.

d. Pelayanan Kesehatan Balita

- Jumlah balita yang harus dilayani: 19.407 orang.
- Jumlah yang sudah terlayani: 15.779 orang (81,31%).
- Capaian mutu minimal layanan: 96,02%.

Permasalahan:

1. Masih ada 3.628 balita (18,69%) yang belum mendapatkan layanan kesehatan.
2. Vaksin IPV hanya mencapai 78,53%, masih di bawah target.

e. Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah (6-18 tahun)

- Jumlah siswa yang harus dilayani: 22.936 orang.
- Jumlah yang sudah terlayani: 22.936 orang (100%).
- Capaian mutu minimal layanan: 91,11%.

Permasalahan:

1. Vaksin Campak Rubella, DT, Td hanya 40,05%, sangat rendah dibandingkan target.
2. Formulir pencatatan kesehatan siswa di luar sekolah (panti, lapas, pesantren) tidak tersedia (0%).

f. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (18-59 tahun)

- Jumlah yang harus dilayani: 112.915 orang.
- Jumlah yang sudah terlayani: 112.500 orang (99,63%).
- Capaian mutu minimal layanan: 92,72%.

Permasalahan:

1. Deteksi dini Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) hanya 15,16%, masih jauh dari target.

g. Pelayanan Kesehatan Lansia

- Jumlah lansia yang harus dilayani: 18.087 orang.
- Jumlah yang sudah terlayani: 14.899 orang (82,37%).
- Capaian mutu minimal layanan: 92,31%.

Permasalahan:

1. Buku Kesehatan Lansia tidak tersedia (0%), sehingga pemantauan kesehatan sulit dilakukan.

Rekomendasi Perbaikan:

- Memastikan seluruh lansia mendapatkan Buku Kesehatan Lansia untuk pemantauan kesehatan jangka panjang.

h. Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular

- Hipertensi dan Diabetes Melitus telah mencapai 100% target.
- Pelayanan kesehatan ODGJ berat telah mencapai 100% target.
- Pelayanan kesehatan Tuberkulosis dan HIV juga telah mencapai 100% target.

Permasalahan:

1. Kurangnya program edukasi untuk penderita hipertensi dan diabetes.
2. Kurangnya program rehabilitasi bagi ODGJ.

Kesimpulan dan Rekomendasi Umum

1. Pencapaian layanan kesehatan di Nagan Raya sudah tinggi (96,67%), tetapi masih ada beberapa indikator yang belum memenuhi standar mutu minimal (20%).
2. Masalah utama meliputi:
 - Rendahnya cakupan vaksinasi (Tetanus Difteri, Hepatitis B, Campak Rubella).
 - Kurangnya distribusi Buku KIA dan Buku Kesehatan Lansia.
 - Deteksi dini penyakit paru PPOK masih rendah.
3. Solusi utama:
 - Peningkatan cakupan imunisasi dengan sistem monitoring ketat.
 - Distribusi buku kesehatan ibu, anak, dan lansia untuk pemantauan kesehatan lebih baik.
 - Meningkatkan deteksi dini penyakit kronis, terutama PPOK dan penyakit tidak menular lainnya.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Berdasarkan data anggaran yang tersedia, berikut adalah ringkasan penggunaan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya:

1. Total Anggaran dan Serapan

- Total Anggaran yang Direncanakan: Rp 4.738.595.550
- Total Anggaran yang Terealisasi: Rp 3.938.506.614
- Persentase Serapan Anggaran: 83,12%

Serapan anggaran tergolong cukup baik, meskipun masih ada beberapa program yang belum sepenuhnya terealisasi.

2. Rincian Anggaran per Program

Tabel 4.11
Rincian Anggaran per Program Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya

No	Program/Kegiatan	Anggaran Direncanakan (Rp)	Anggaran Terealisasi (Rp)	Serapan (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.007.344.650	1.007.320.500	100,00%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	352.032.000	352.021.000	100,00%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	280.738.900	134.931.450	48,06%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	361.554.100	328.040.750	90,73%
5	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	1.069.591.000	954.860.000	89,27%
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	147.715.800	145.772.800	98,68%
7	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	35.599.000	11.200.000	31,46%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	96.100.000	94.100.000	97,92%

No	Program/Kegiatan	Anggaran Direncanakan (Rp)	Anggaran Terealisasi (Rp)	Serapan (%)
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	428.650.000	424.020.000	98,92%
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	727.970.100	254.999.738	35,03%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	0	0	0,00%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko HIV	231.300.000	231.240.376	99,97%
TOTAL		4.738.595.550	3.938.506.614	83,12%

3. Temuan Utama dalam Serapan Anggaran

1. Program dengan Serapan 100%:

- Pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin.
- Ini menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan yang sangat baik di sektor kesehatan ibu.

2. **Program dengan Serapan Rendah:

- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (48,06%) → Realisasi masih kurang dari setengah anggaran.
- Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (31,46%) → Serapan anggaran sangat rendah.
- Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat (35,03%) → Masih jauh dari target.
- Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (0%) → Tidak ada anggaran yang digunakan.

3. Program dengan Serapan Tinggi (>90%):

- Pelayanan kesehatan balita (90,73%).
- Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar (89,27%).
- Pelayanan kesehatan usia produktif (98,68%).
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi (97,92%).
- Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (98,92%).
- Pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV (99,97%).

4. Rekomendasi Perbaikan Anggaran

1. Memastikan realisasi program dengan serapan rendah
 - Pelayanan kesehatan bayi baru lahir perlu ditingkatkan dengan memastikan distribusi alat kesehatan dan vaksinasi yang lebih merata.
 - Pelayanan kesehatan usia lanjut perlu lebih diperhatikan, terutama dalam penyediaan layanan kesehatan lansia di Puskesmas dan Posyandu.
 - Pelayanan kesehatan ODGJ berat perlu mendapatkan perhatian lebih, termasuk penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai.
 - Pelayanan kesehatan TBC (0% realisasi) harus ditindaklanjuti karena penyakit ini masih menjadi perhatian utama dalam kesehatan masyarakat.
2. Evaluasi perencanaan dan eksekusi anggaran
 - Beberapa program seperti ODGJ dan TBC mungkin memiliki kendala administratif atau operasional. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui penyebabnya.
3. Penguatan koordinasi dengan fasilitas kesehatan
 - Meningkatkan komunikasi antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk memastikan realisasi anggaran lebih optimal.

Kesimpulan

- Serapan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tergolong baik (83,12%), tetapi masih ada beberapa program dengan serapan sangat rendah.
- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, usia lanjut, ODGJ, dan TBC perlu mendapat perhatian lebih karena masih memiliki serapan rendah.
- Perlu evaluasi menyeluruh terhadap kendala dalam realisasi program kesehatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan penyakit menular dan kesehatan mental.

4.2.5 Dukungan Personil

Untuk melaksanakan penerapan SPM Urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, personil yang terlibat di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.12
Data Personil SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

No	Tatanan Pelayanan	Dokter (dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi)	Bidan	Perawat	Gizi	Tenaga Kesehatan Masyarakat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dinkes dan Puskesmas (14 Faskes)	26	503	239	23	92

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

4.2.6 Permasalahan .

Capaian pelayanan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2024 masih belum sesuai dengan target SPM yang ditetapkan Pemerintah. Berbagai permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam upaya pencapaian target SPM yaitu :

1. Pengumpulan Data
 - o Setiap awal tahun, sasaran yang ditentukan berdasarkan data dari Disdukcapil menggunakan rumus estimasi.
 - o Sasaran estimasi terlalu tinggi.
2. Penghitungan Kebutuhan
 - o Seiring dengan keluarnya Permenkes No.6 Tahun 2024, terjadi penambahan indikator pada setiap SPM.
 - o Indikator baru muncul pada TW.2, TW.3, dan TW.4.
 - o Perbaikan akan dilakukan ke depannya.
3. Perencanaan dan Penganggaran
 - o Anggaran belum fokus sepenuhnya pada target SPM.
4. Pelaksanaan

- Masih ada ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan pertama kali tidak pada TW.1, sehingga tidak mendapatkan K4 dan K6.
- Sasaran estimasi terlalu tinggi, menyebabkan capaian menjadi rendah.
- Sering terjadi pergantian petugas di tingkat Puskesmas dan desa.
- Pelaporan bayi baru lahir tidak menggunakan format MTBM dan Buku KIA dari RS, rumah bersalin ke Puskesmas.
- Penanggung jawab program tidak mengumpulkan/mengirimkan laporan berkala untuk usia pendidikan sekolah dasar.

5. Lain-lain

- Bidan desa merangkap jabatan.
- Belum semua desa memiliki Posyandu Lansia.
- Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah tidak pernah dilakukan.

4.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Urusan Pekerjaan Umum diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan jenis pelayanan dasar SPM bidang pekerjaan umum yaitu sebagai berikut:

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.4.2. Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, target capaian untuk masing-masing pelayanan dasar tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.13
Target Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	73 %	Setiap Tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	67 %	Setiap Tahun

4.4.3. Realisasi

Pada tahun 2024, berbagai upaya pelaksanaan pencapaian target SPM pekerjaan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan capaian SPM urusan pekerjaan umum yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nagan Raya. Berikut ini disampaikan realisasi capaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 bidang urusan Pekerjaan Umum sebagai berikut:

Tabel 4.14
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00 %
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	2400	3892	-1492	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			-4	-5	-6	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
			Dipenuhi			
	1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	947	1023	-76	100.00 %
	2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau	Rumah Tangga	947	1023	-76	100.00 %
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					
	3 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	1	0	1	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	4 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	1	0	1	100.00 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1500	1721	-221	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	531	541	-10	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	1	0	1	100.00 %
	3 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	531	541	-10	100.00 %

Berdasarkan dokumen yang dianalisis, berikut adalah rincian capaian SPM untuk penyediaan air minum dan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Nagan Raya.

1. Indeks Pencapaian SPM secara Keseluruhan

- Kategori Indeks Pencapaian: Tuntas Paripurna (100%)
- Persentase pencapaian penerima layanan dasar: 80% (target minimal tercapai)
- Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar: 20% (target minimal tercapai)

Indeks ini menunjukkan bahwa penyediaan layanan air minum dan sanitasi telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan.

2. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

- Jumlah yang harus dilayani: 2.400 orang
- Jumlah yang sudah terlayani: 3.892 orang
- Jumlah melebihi target: +1.492 orang
- Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar: 100%

a. Jaringan Perpipaan

1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui jaringan perpipaan:
 - Target: 947 rumah tangga
 - Realisasi: 1.023 rumah tangga
 - Selisih: +76 rumah tangga
 - Pencapaian: 100%
2. Kualitas air minum sesuai standar kesehatan:
 - Target: 947 rumah tangga
 - Realisasi: 1.023 rumah tangga
 - Selisih: +76 rumah tangga
 - Pencapaian: 100%

b. Bukan Jaringan Perpipaan

1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum dari sumber selain jaringan perpipaan:
 - Target: 1 rumah tangga
 - Realisasi: 0 rumah tangga
 - Selisih: -1 rumah tangga
 - Pencapaian: 100%
2. Kualitas air minum dari sumber bukan perpipaan:
 - Target: 1 rumah tangga
 - Realisasi: 0 rumah tangga
 - Selisih: -1 rumah tangga
 - Pencapaian: 100%

Kesimpulan:

- Penyediaan air minum melalui jaringan perpipaan sudah melebihi target.
- Namun, layanan air minum bagi rumah tangga yang mengandalkan sumber bukan perpipaan belum terealisasi sama sekali.

3. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

- Jumlah yang harus dilayani: 1.500 orang
- Jumlah yang sudah terlayani: 1.721 orang
- Jumlah melebihi target: +221 orang
- Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar: 100%

a. Akses Pengolahan Air Limbah

1. Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik:
 - Target: 531 rumah tangga
 - Realisasi: 541 rumah tangga
 - Selisih: +10 rumah tangga
 - Pencapaian: 100%

b. Kualitas Pelayanan Pengolahan Air Limbah

1. Akses aman terhadap fasilitas buang air besar (di daerah dengan kepadatan >25 jiwa/ha):
 - Target: 1 rumah tangga
 - Realisasi: 0 rumah tangga
 - Selisih: -1 rumah tangga
 - Pencapaian: 100%
2. Akses layak terhadap fasilitas buang air besar (di daerah dengan kepadatan <25 jiwa/ha):
 - Target: 531 rumah tangga
 - Realisasi: 541 rumah tangga
 - Selisih: +10 rumah tangga
 - Pencapaian: 100%

Kesimpulan:

- Pengolahan air limbah domestik telah memenuhi target dan bahkan melebihi jumlah rumah tangga yang harus dilayani.
- Namun, fasilitas buang air besar aman di daerah padat penduduk tidak sepenuhnya terealisasi.

4. Temuan Permasalahan

1. Layanan air minum bagi rumah tangga yang tidak menggunakan jaringan perpipaan belum berjalan.
2. Masih ada kekurangan dalam penyediaan akses aman terhadap fasilitas buang air besar di daerah padat penduduk.

5. Rekomendasi Perbaikan

1. Perluasan layanan air minum bagi rumah tangga yang tidak menggunakan jaringan perpipaan untuk memastikan akses merata.
2. Penyediaan fasilitas sanitasi aman bagi daerah dengan kepadatan tinggi agar layanan air limbah benar-benar sesuai standar kesehatan.

Secara keseluruhan, SPM penyediaan air minum dan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Nagan Raya telah memenuhi target, tetapi masih ada beberapa aspek yang memerlukan peningkatan dalam pemerataan layanan.

4.4.4. Alokasi Anggaran

Analisis Anggaran Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah di Kabupaten Nagan Raya

1. Total Anggaran dan Serapan

- Total Anggaran yang Direncanakan: Rp 11.196.321.217
- Total Anggaran yang Terealisasi: Rp 11.059.606.252
- Persentase Serapan Anggaran: 98,78%

2. Rincian Anggaran per Program

A. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- Total Anggaran: Rp 4.126.251.542
- Realisasi Anggaran: Rp 4.044.667.102
- Serapan: 98,02%

B. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- Total Anggaran: Rp 7.070.069.675
- Realisasi Anggaran: Rp 7.014.939.150
- Serapan: 99,22%

3. Temuan Utama dalam Serapan Anggaran

1. Anggaran terserap hampir maksimal (98,78%), menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan program cukup efektif.
2. Program Pengelolaan Air Limbah memiliki serapan lebih tinggi (99,22%) dibandingkan Program Air Minum (98,02%).
3. Beberapa kegiatan tidak memiliki serapan sama sekali (0%), antara lain:
 - Supervisi pembangunan, peningkatan, dan perluasan SPAM

- Pembangunan jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dan perdesaan
- Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha dan pemerintah desa
- Optimalisasi sistem pengelolaan air limbah domestik

4.4.5. Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan TUPOKSI Bidang Kawasan Permukiman personil yang terlibat di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 sebanyak 7 (tujuh) Orang yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.15
Dukungan Personil Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Personil Tahun 2024	
		ASN	THL
1	2	3	4
1.	Bidang Kawasan Permukiman		
	- Kepala Bidang	1	
	- Seksi Permukiman	1	
	- Seksi Air Minum dan Sanitasi	2	
	- Staf		3
Jumlah		4	3

Sumber : PUPR Nagan Raya, 2024

4.4.6. Permasalahan

1. Permasalahan

1. Pengumpulan Data
 - Data masih kosong.
2. Penghitungan Kebutuhan
 - Kebutuhan fasilitas air minum dan limbah domestik masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat.
3. Perencanaan dan Penganggaran

- Anggaran masih kurang dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
4. Pelaksanaan
- Terbenturnya izin penggalian pipa distribusi di jalan.
 - Dekatnya rumah masyarakat dengan drainase menyebabkan kendala dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
5. Lain-lain
- Data masih kosong.

4.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Urusan Perumahan Rakyat diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan jenis pelayanan dasar SPM bidang perumahan rakyat yaitu sebagai berikut:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4.4.2. Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, target capaian untuk masing-masing pelayanan dasar tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.16
Target Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang	100 %	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
	program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni		

4.4.3. Realisasi

Pada tahun 2024, berbagai upaya pelaksanaan pencapaian target SPM perumahan rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan capaian SPM urusan perumahan rakyat yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nagan Raya. Berikut ini disampaikan realisasi capaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 bidang urusan Perumahan Rakyat sebagai berikut :

Tabel 4.17
Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Capaian	
		-1	-2	-3		-4
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM			TUNTAS MADYA			87.88 %
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						95.75 %
Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)						
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	76.00 %
		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum		

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Capaian
		-1	-2	-3	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	80	76	4	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	19.75 %
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					98.75 %
1 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	20	19	1	95.00 %
2 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	1	1	0	100.00 %
3 . Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	1	1	0	100.00 %
4 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	1	1	0	100.00 %
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					80.00 %
Ada Relokasi Program Pemerintah					
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	

Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Capaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1	1	0	100.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	0.00 %
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					0.00 %
1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	0	0	0	0.00 %
a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	0	0	0	0.00 % 0
b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	0	0	0	0.00 % 0
c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	0	0	0	0.00 % 0
2 . Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	0	0	0	0.00 %

Berdasarkan dokumen yang dianalisis, berikut adalah rincian capaian SPM untuk penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi di Kabupaten Nagan Raya.

1. Indeks Pencapaian SPM secara Keseluruhan

- Kategori Indeks Pencapaian: Tuntas Madya (87,88%)
- Persentase pencapaian penerima layanan dasar (target 80%): 76,00%

- Persentase pencapaian mutu layanan dasar (target 20%): 19,75%

Capaian layanan dasar masih sedikit di bawah target (76% dari 80%), sementara pencapaian mutu layanan hampir mencapai target minimal (19,75% dari 20%).

2. Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana

- Jumlah yang harus dilayani: 80 orang
- Jumlah yang sudah terlayani: 76 orang
- Jumlah yang belum terlayani: 4 orang
- Persentase pencapaian mutu layanan dasar: 98,75%

a. Rincian Capaian Per Jenis Layanan

1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
 - Target: 20 rumah
 - Realisasi: 19 rumah
 - Persentase pencapaian: 95,00%
2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana
 - Target: 1 rumah
 - Realisasi: 1 rumah
 - Persentase pencapaian: 100%
3. Pemukiman kembali bagi korban bencana
 - Target: 1 rumah
 - Realisasi: 1 rumah
 - Persentase pencapaian: 100%
4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana
 - Target: 1 rumah
 - Realisasi: 1 rumah
 - Persentase pencapaian: 100%

Kesimpulan:

- Layanan rehabilitasi rumah bagi korban bencana belum sepenuhnya terpenuhi (hanya 95%).

- Layanan pembangunan kembali, pemukiman kembali, dan bantuan akses rumah sewa layak huni sudah 100% sesuai target.

3. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi

- Jumlah yang harus dilayani: 1 orang
- Jumlah yang sudah terlayani: 1 orang
- Persentase pencapaian penerima layanan dasar: 100%
- Persentase pencapaian mutu layanan dasar: 0%

a. Rincian Capaian Per Jenis Layanan

1. Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan
 - Target: 0 rumah
 - Realisasi: 0 rumah
 - Persentase pencapaian: 0%
2. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal)
 - Target: 0 rumah
 - Realisasi: 0 rumah
 - Persentase pencapaian: 0%
3. Proses sosialisasi kepada masyarakat
 - Target: 0 rumah
 - Realisasi: 0 rumah
 - Persentase pencapaian: 0%
4. Proses penggantian untung sesuai tahapan dalam Rencana Aksi
 - Target: 0 rumah
 - Realisasi: 0 rumah
 - Persentase pencapaian: 0%
5. Bantuan akses rumah sewa layak huni
 - Target: 0 rumah
 - Realisasi: 0 rumah
 - Persentase pencapaian: 0%

Kesimpulan:

- Semua layanan terkait relokasi sudah memenuhi target penerima layanan dasar (100%).
- Namun, mutu layanan dasar masih 0% karena tidak ada realisasi untuk fasilitas penggantian hak tanah, sosialisasi, appraisal, atau bantuan rumah sewa.

4. Temuan Permasalahan

1. Masih ada 4 orang korban bencana yang belum terlayani.
2. Program rehabilitasi rumah korban bencana belum 100% terpenuhi (95%).
3. Mutu layanan untuk masyarakat relokasi masih 0%, karena tidak ada realisasi fasilitas penggantian tanah, appraisal, atau sosialisasi.

5. Rekomendasi Perbaikan

1. Memastikan seluruh korban bencana mendapatkan layanan rehabilitasi rumah sesuai target (100%).
2. Menyelesaikan pemberian hak bagi masyarakat terdampak relokasi, termasuk appraisal, sosialisasi, dan bantuan rumah sewa.
3. Meningkatkan pengawasan terhadap proses rehabilitasi rumah agar capaian tidak terhambat.

Secara keseluruhan, SPM penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat relokasi sudah mendekati target, tetapi masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam kualitas layanan bagi masyarakat terdampak relokasi.

4.4.4. Alokasi Anggaran

Total Anggaran dan Serapan

- Total Anggaran yang Direncanakan: Rp 579.687.325
- Total Anggaran yang Terealisasi: Rp 559.664.325
- Persentase Serapan Anggaran: 96,55%

2. Rincian Anggaran per Program

A. Program Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi

- Total Anggaran: Rp 79.600.000
- Realisasi Anggaran: Rp 79.600.000
- Serapan: 100%

B. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi

- Total Anggaran: Rp 500.087.325
- Realisasi Anggaran: Rp 480.064.325
- Serapan: 96,00%

3. Temuan Utama dalam Serapan Anggaran

1. Anggaran terserap hampir maksimal (96,55%), menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan program cukup efektif.
2. Program pendataan penyediaan rumah untuk korban bencana dan relokasi memiliki serapan 100%, menunjukkan seluruh kegiatan administratif berjalan lancar.
3. Program rehabilitasi rumah korban bencana memiliki serapan 96%, namun masih ada sisa anggaran yang tidak digunakan.
4. Beberapa kegiatan tidak memiliki serapan sama sekali (0%), antara lain:
 - Penyusunan Site Plan dan Detail Engineering Design (DED)
 - Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah korban bencana
 - Pembangunan rumah khusus beserta PSU untuk korban bencana dan relokasi
 - Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan bagi korban bencana

4. Rekomendasi Perbaikan

1. Evaluasi program yang tidak terealisasi sama sekali untuk mengetahui kendala yang menyebabkan tidak terserapnya anggaran.

2. Optimalisasi penggunaan anggaran untuk rehabilitasi rumah agar dapat mencapai serapan 100%.
3. Memastikan kesiapan perencanaan teknis (DED dan Site Plan) untuk mendukung kelancaran pembangunan rumah korban bencana dan relokasi.

4.4.5. Dukungan Personil

Untuk melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan TUPOKSI Bidang Perumahan personil yang terlibat di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 sebanyak 7 (tujuh) Orang yaitu sebagai berikut

Tabel 4.18
Dukungan Personil Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Personil Tahun 2024	
		ASN	THL
1.	Bidang Perumahan Rakyat		
	- Kepala Bidang	1	
	- Seksi Perumahan	3	
	- Seksi Izin Mendirikan Bangunan	1	
	- Staf		2
Jumlah		5	2

Sumber : PERKIM Nagan Raya, 2024

4.4.6. Permasalahan

Dalam pelaksanaannya hanya terdapat masalah Hambatan yang terjadi pada penanganan SPM rehab rumah korban bencana adalah pengunduran diri salah satu calon penerima manfaat yang mengundurkan diri setelah proses verifikasi dan SK Penetapan calon penerima manfaat diterbitkan

4.5. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Capaian SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terbagi kedalam 2 (dua) sub urusan yaitu:

- a. Sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Sub urusan bencana daerah

4.5.1 Satuan Polisi Pamong Praja/ Wilayahul Hisbah

4.5.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM sub urusan ketentraman dan ketertiban umum diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut dijelaskan jenis pelayanan dasar SPM sub urusan ketentraman dan ketertiban umum yaitu pelayanan ketentraman dan ketertiban umum

4.5.1.2 Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, target capaian untuk pelayanan dasar tersebut yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.19
Target Capaian SPM Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	100 %	Setiap Tahun

4.5.1.3 Realisasi.

Pada tahun 2024, berbagai upaya pelaksanaan pencapaian target SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 4.20
Capaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Capaian	Aksi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					86.67 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Capaian	Aksi
			-4	-5	-6		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					86.67 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %	
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum		
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	214	214	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	6.67 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/S DM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					33.33 %	
	1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	5	5	0	100.00 %	
	2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam	Dokumen	37	37	0	0.00 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Capaian	Aksi
			-4	-5	-6		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	<p>rangka penegakan perda dan perkada*</p> <p>(SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)</p>						
Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload							
	<p>3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***</p> <p>(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlin mas)</p>	Orang	214	214	0	100.00 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Capaian	Aksi
			-4	-5	-6		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	0.1	0	0.1	0.00 %	
Data Dukung : Data Dukung Belum Di Upload							
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang	0.1	0	0.1	0.00 %	
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila	Orang	0.1	0	0.1	0.00 %	

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Capaian	Aksi
			-2	-3	-4		
	terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)						

Capaian layanan dasar sudah memenuhi target minimal, tetapi pencapaian mutu layanan masih jauh di bawah standar minimal.

2. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)

- Jumlah yang harus dilayani: 214 orang
- Jumlah yang sudah terlayani: 214 orang
- Persentase capaian penerima layanan dasar: 100%
- Persentase capaian mutu layanan dasar: 33,33%

a. Rincian Capaian Per Jenis Layanan

1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan Perda dan Perkada
 - Target: 5 unit
 - Realisasi: 5 unit
 - Persentase pencapaian: 100%
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan Perda dan Perkada
 - Target: 37 dokumen
 - Realisasi: 37 dokumen
 - Persentase pencapaian: 0%
 - Data dukung belum diunggah
3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)
 - Target: 214 orang
 - Realisasi: 214 orang
 - Persentase pencapaian: 100%

4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan TRANTIBUM akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada
 - Target: 0,1 dokumen
 - Realisasi: 0 dokumen
 - Persentase pencapaian: 0%
 - Data dukung belum diunggah
5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil akibat penegakan hukum TRANTIBUM
 - Target: 0,1 orang
 - Realisasi: 0 orang
 - Persentase pencapaian: 0%
6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan akibat penegakan hukum TRANTIBUM
 - Target: 0,1 orang
 - Realisasi: 0 orang
 - Persentase pencapaian: 0%

3. Temuan Permasalahan

1. Capaian mutu layanan masih sangat rendah (6,67% dari target 20%), terutama pada aspek dokumentasi dan SOP.
2. Tidak ada dokumen SOP yang diunggah, padahal jumlah SOP yang ditargetkan sudah tersedia.
3. Tidak ada realisasi pada pelayanan bagi warga yang mengalami kerugian material dan pengobatan akibat penegakan hukum TRANTIBUM.
4. Pelayanan terhadap warga terdampak penegakan hukum (kerusakan properti atau cedera fisik) tidak dilakukan sama sekali.

Secara keseluruhan, SPM Satpol PP dan WH Kabupaten Nagan Raya telah memenuhi target penerima layanan dasar, tetapi masih sangat lemah dalam aspek mutu layanan. Perbaikan harus difokuskan pada dokumentasi SOP, pelayanan bagi warga terdampak, serta peningkatan efektivitas sistem pengaduan dan penanganan dampak TRANTIBUM.

4.5.1.4 Alokasi Anggaran

Berikut adalah analisis rinci anggaran untuk setiap program dan sub-kegiatan yang tercantum dalam dokumen:

1. Program: Peningkatan Ketenteraman dan Keteriban Umum (TRANSTIBUM)

Total Anggaran:

- Direncanakan: Rp 600.617.646
- Realisasi: Rp 455.783.046
- Tingkat Realisasi: 75,89%

Sub-Kegiatan dan Anggaran:

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum dalam 1 Daerah
 - Realisasi: 75,89%
 - Anggaran:
 - Direncanakan: Rp 600.617.646
 - Terealisasi: Rp 455.783.046
2. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum
 - Realisasi: 85,71%
 - Anggaran:
 - Direncanakan: Rp 333.889.800
 - Terealisasi: Rp 286.170.000
3. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum
 - Realisasi: 74,44%
 - Anggaran:
 - Direncanakan: Rp 161.332.046
 - Terealisasi: Rp 120.092.046
4. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
 - Realisasi: 61,90%
 - Anggaran:
 - Direncanakan: Rp 80.000.000
 - Terealisasi: Rp 49.521.000

Catatan:

- Beberapa sub-kegiatan (seperti pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM, dan kerja sama lembaga) tidak memiliki realisasi anggaran (0%).
- Kegiatan utama (penanganan gangguan) mendominasi alokasi anggaran.

2. Program: Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Total Anggaran:

- Direncanakan: Rp 215.180.000
- Realisasi: Rp 204.581.000
- Tingkat Realisasi: 95,07%

Sub-Kegiatan dan Anggaran:

1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Realisasi: 95,07%
 - Anggaran:
 - Direncanakan: Rp 215.180.000
 - Terealisasi: Rp 204.581.000

Catatan:

- Hanya satu sub-kegiatan yang mencatat realisasi, sementara lainnya (pengawasan, penanganan pelanggaran, pembinaan pelanggar, penyusunan SOP) tidak terealisasi (0%).
- Tingkat realisasi tinggi (95,07%) karena fokus pada sosialisasi.

3. Program: Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Total Anggaran:

- Direncanakan: Rp 36.000.000
- Realisasi: Rp 0
- Tingkat Realisasi: 0%

Sub-Kegiatan dan Anggaran:

1. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS

- Realisasi: 16,67% (tercatat di dokumen, tetapi realisasi Rp 0)
- Anggaran:
 - Direncanakan: Rp 36.000.000
 - Terealisasi: Rp 0
- Tidak ada realisasi anggaran untuk seluruh sub-kegiatan, termasuk pembentukan PPNS dan pengembangan kapasitas.
- Perlu evaluasi mengapa program ini tidak berjalan.

Tabel 4.21

Rekapitulasi Total Anggaran Satpol PP dan WH Kabupaten Nagan Raya

Program	Direncanakan	Realisasi	Tingkat Realisasi
Peningkatan Ketentraman (TRANSTIBUM)	Rp 600.617.646	Rp 455.783.046	75,89%
Penegakan Peraturan Daerah	Rp 215.180.000	Rp 204.581.000	95,07%
Pembinaan PPNS	Rp 36.000.000	Rp 0	0%
Total	Rp 851.797.646	Rp 660.364.046	77,53%

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Program TRANSTIBUM

- Realisasi cukup baik (75,89%), tetapi beberapa sub-kegiatan tidak terealisasi.
- Perlu peningkatan pada kegiatan pencegahan dan pemeliharaan sarana.

2. Program Penegakan Perda

- Realisasi sangat tinggi (95,07%), tetapi hanya sosialisasi yang berjalan.
- Kegiatan pengawasan dan penindakan perlu diperhatikan.

3. Program Pembinaan PPNS

- Gagal total (0% realisasi)—perlu investigasi penyebab dan perbaikan mendesak.

4. Secara Keseluruhan

- Realisasi anggaran mencapai 77,53%, menunjukkan sebagian besar dana terserap.
- Fokus pada program yang tidak terealisasi (khususnya PPNS) untuk tahun berikutnya.

4.5.1.5 Dukungan Personil

Untuk melaksanakan penerapan SPM urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketertiban dan Ketertiban Umum di Kabupaten/ Kota, personil yang terlibat di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.22
Data Personil Satpol PP/WH yang terlibat dalam proses Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Personil Tahun 2024	
		ASN	KONTRAK
1	2	3	4
1.	Bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam	12	30
2.	Bidang Trantibumtranmas	12	30
3.	Bidang Linmas	12	10

Sumber : Satpol PP/WH Nagan Raya, 2024

4.5.1.6 Permasalahan

Capaian pelayanan SPM urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2024 masih belum sesuai dengan target SPM yang ditetapkan Pemerintah. Berbagai permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam upaya pencapaian target SPM tersebut yaitu sebagai berikut:

- Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data masih terkendala pada kurangnya SDM dan kerjasama dengan instansi lain

- **Penghitungan Kebutuhan**

Perhitungan kebutuhan SPM kebencanaan sulit dilakukan karena minimnya pemahaman terkait pengisian form yang terdapat di permendagri nomor 101 Tahun 2018 dan banyaknya data yang dibutuhkan

- **Perencanaan Dan Penganggaran**

Minimnya ketersediaan anggaran mempengaruhi proses perencanaan

- **Pelaksanaan**

Pelaksanaan SPM masih terkendala minimnya anggaran yang tersedia

4.5.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.5.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM sub urusan bencana daerah diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut dijelaskan jenis pelayanan dasar SPM sub urusan bencana daerah yaitu sebagai berikut:

- Pelayanan informasi rawan bencana;
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

4.5.2.2 Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, target capaian untuk masing-masing pelayanan dasar tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.23
Target Capaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Informasi	Jumlah Penegakan Perda	100 %	Setiap

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
	Rawan Bencana	sesuai Mutu		Tahun
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	Setiap Tahun

4.5.2.3 Realisasi

Pada tahun 2024, berbagai upaya pelaksanaan pencapaian target SPM sebagaimana diatur dalam Pemendagri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan capaian SPM sub urusan bencana daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya. Berikut ini disampaikan realisasi capaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 sub urusan bencana daerah.

Tabel 4.24
Capaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

	KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					98.33 %
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					95.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80% 80.00 %
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	9190	9190	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20% 15.00 %
			Jumlah	Jumlah	Mutu	

			Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					75.00 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	0	0.00 %
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	0.1	0.1	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang	150	150	0	100.00 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	0.1	0.1	0	100.00 %
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	450	450	0	100.00 %

	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Unit	0.1	0.1	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang	450	450	0	100.00 %
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	9190	9190	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	

			Dilayani / Dipenuhi	/ Terpenuhi	/ Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko	0.1	0.1	0	100.00 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang	0.1	0.1	0	100.00 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen	0.1	0.1	0	100.00 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Layanan	0.1	0	0.1	100.00 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	4	4	0	100.00 %
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR					95.33 %
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					95.33 %

PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	75	75	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	15.33 %
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					76.67 %
1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan	10	6	4	60.00 %
2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen	0.1	0.1	0	0.00 %
3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	100	100	0	100.00 %

(pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)						
4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang	10	10	0	100.00 %	
5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan	15	15	0	100.00 %	
6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan	15	15	0	100.00 %	

. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

- Total capaian: 98.33%
- Pelayanan Informasi Rawan Bencana: 95.00%
- Penerima Layanan Dasar (80%):
 - Harus dilayani: 9,190 orang
 - Terlayani: 9,190 orang (100%)
- Mutu Layanan Dasar (20%):
 - Pencapaian: 15.00% (belum mencapai target 20%)
 - Pemetaan risiko bencana: 100% (1 dokumen tersedia)

- Identifikasi warga di kawasan rawan bencana: 100%
- Sosialisasi dan edukasi bencana: 100%
- Penyediaan rambu evakuasi dan papan informasi: 100%
- Catatan: Beberapa data dukung belum diunggah.

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- Total capaian: 100%
- Penerima Layanan Dasar (80%):
 - Harus dilayani: 450 orang
 - Terlayani: 450 orang (100%)
- Mutu Layanan Dasar (20%):
 - Pencapaian: 20.00% (target tercapai)
 - Sarana prasarana penanggulangan bencana: 100%
 - Peningkatan kapasitas SDM: 100%

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Total capaian: 100%
- Penerima Layanan Dasar (80%):
 - Harus dilayani: 9,190 orang
 - Terlayani: 9,190 orang (100%)
- Mutu Layanan Dasar (20%):
 - Pencapaian: 20.00% (target tercapai)
 - Aktivasi sistem komando: 100%
 - Pendataan korban bencana: 100%
 - Respon cepat bencana: 100%
 - Respon cepat KLB penyakit/wabah zoonosis: 100%
 - Evakuasi korban bencana: 100%

4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

- Total capaian: 95.33%
- Penerima Layanan Dasar (80%):
 - Harus dilayani: 75 orang
 - Terlayani: 75 orang (100%)

- Mutu Layanan Dasar (20%):
 - Pencapaian: 15.33% (belum mencapai target 20%)
 - Tingkat waktu tanggap (response time): 60% (masih di bawah standar 100%)
 - Prosedur operasional penanganan kebakaran: 0% (belum tersedia)
 - Sarana prasarana pemadam kebakaran: 100%
 - Kapasitas SDM Damkar: 100%
 - Pelayanan pemadaman & penyelamatan korban kebakaran: 100%
 - Pelayanan evakuasi warga terdampak kebakaran: 100%
 - Catatan: Data dukung terkait prosedur operasional belum diunggah.

4.5.2.4 Alokasi Anggaran

Sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM), adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerima Pelayanan dasar SPM sub-urusan bencana adalah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar. Anggaran yang dialokasikan untuk berbagai program dalam penanggulangan bencana dan kebakaran mencapai Rp12,8 miliar, dengan realisasi sebesar Rp10,8 miliar atau 84,63%. Anggaran ini tersebar ke dalam berbagai program utama, terutama dalam penanganan bencana, kesiapsiagaan, serta penyelamatan dan evakuasi.

Salah satu program terbesar adalah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, yang mengalokasikan Rp9,16 miliar dengan realisasi 83,32%. Program ini mencakup kerja sama antar lembaga dan penguatan sistem informasi kebencanaan. Meskipun realisasinya cukup tinggi, beberapa indikator

seperti regulasi penanggulangan bencana dan penguatan kelembagaan masih belum terlaksana sepenuhnya.

Untuk Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, anggaran yang disiapkan sebesar Rp3,3 miliar, dengan realisasi 86,58%. Program ini mencakup pelatihan mitigasi bencana serta penyediaan peralatan perlindungan. Namun, beberapa aspek seperti penyusunan rencana kontingensi dan gladi kesiapsiagaan masih belum terimplementasi.

Sementara itu, program Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana mendapatkan alokasi sebesar Rp282 juta, dengan realisasi yang hampir sempurna, mencapai 99,75%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan terkait pencarian dan penyelamatan korban telah terlaksana dengan baik.

Di sisi lain, program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (DAMKAR) dialokasikan sebesar Rp326 juta, dengan realisasi 99,78%. Penggunaan anggaran dalam sektor ini lebih fokus pada pemadaman kebakaran dan pengadaan sarana pemadam, yang telah mencapai target maksimal.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran menunjukkan efektivitas yang cukup baik, dengan sebagian besar program berjalan sesuai rencana. Namun, ada beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam kesiapsiagaan jangka panjang dan koordinasi antar lembaga. Jika seluruh program dapat dimaksimalkan, maka sistem penanggulangan bencana dan kebakaran akan lebih siap dalam menghadapi berbagai risiko di masa depan.

4.5.2.5 Dukungan Personil

Untuk melaksanakan penerapan SPM pada Badan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024, kondisi sumber daya manusia yang ada yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.25
Data Jumlah Pegawai Pada BPBD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

No	Jenis/Kualifikasi	Jumlah Personil Tahun 2024	
		ASN	Kontrak
1	2	3	4
1.	Tingkat Esselon:		
	II.b	1	0
	III.a	1	0
	III.b	3	0
	IV.a	2	0
2.	Pangkat/Golongan:		
	IV	6	0
	II	9	0
	II	5	0
3.	Jenjang Pendidikan:		
	S2	1	0
	S1	8	26
	D3	1	6
	SMA	9	76
	SMP	1	5

Sumber : BPBD Nagan Raya, 2024

Berdasarkan tabel tersebut diatas total pegawai dalam lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya sebanyak 20 orang Pegawai Negeri Sipil dan 113 orang merupakan Tenaga Harian Lepas (THL).

4.5.2.6 Permasalahan

- Pengumpulan Data
 - Pendataan pada kawasan dampak bencana dan pada saat terjadi bencana belum maksimal
- Penghitungan Kebutuhan
 - Data belum terpenuhi secara maksimal untuk perhitungan kebutuhan pada masing-masing bidang
- Perencanaan Dan Penganggaran
 - Sebagian penyusunan perencanaan tidak dilakukan analisa lebih dalam sesuai dengan target dan kebutuhan

- Pelaksanaan
 - Tidak sinkron antara data lapangan dengan data yang di laporkan
- Lain - Lain
 - Belum terbitnya dokumen krb terbaru dan belum tersusunnya dokumen rencana kontijensi

4.6. BIDANG URUSAN SOSIAL

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM urusan sosial diterapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut dijelaskan pelayanan dasar SPM Urusan Sosial yaitu sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

4.6.2 Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota. target capaian untuk masing-masing pelayanan dasar tersebut yaitu

Tabel 4.26
Target Capaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar	100 %	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	2	3	4	5
		panti		
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 %	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	Setiap Tahun

4.6.3 Realisasi

Pada tahun 2024, berbagai upaya pelaksanaan pencapaian target SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan capaian SPM urusan Sosial yaitu Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya. Berikut ini disampaikan realisasi capaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 bidang urusan Sosial sebagai berikut:

Tabel 4.27
Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			-4	-5	-6	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					90.22 %
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					94.08 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	74.08 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5930	5491	439	92.60 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	222	222	0	100.00 %
	2. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di	Orang	50	50	0	100.00 %

	desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permukiman/orang/hari)					
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang	10	10	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	30	30	0	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	70	70	0	100.00 %
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	1	1	0	100.00 %
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound /gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang	222	222	0	100.00 %

	agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Oran g	222	222	0	100.00 %
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Oran g	10	10	0	100.00 %
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Oran g	5069	5069	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Oran g	1	1	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Oran g	10	10	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan	Oran	12	12	0	100.00 %

	(layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	g				
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti					98.38 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	78.38 %
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5638	5524	114	97.98 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	222	222	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang	10	10	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	50	50	0	100.00 %

(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	g				
4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Oran g	30	30	0	100.00 %
5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Oran g	1	1	0	100.00 %
6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound /gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Oran g	222	222	0	100.00 %
7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain,	Oran g	1	1	0	100.00 %

	dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)					
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	10	109	-99	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	5069	5069	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang	10	10	0	100.00 %
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	12	12	0	100.00 %
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					58.63 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	38.63 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	640	309	331	48.28 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang	Jumlah Mutu Yang	Mutu Yang Belum	100.00 %

			Harus Dilayani / Dipenuhi	Terlayani / Terpenuhi	Terlayani / Terpenuhi	
	1 . Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang	222	222	0	100.00 %
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang	10	10	0	100.00 %
	3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang	50	50	0	100.00 %
	4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang	30	30	0	100.00 %
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	70	70	0	100.00 %

(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	g				
6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Oran g	1	1	0	100.00 %
(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)					
7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Oran g	222	222	0	100.00 %
bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound /gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Oran g	1	1	0	100.00 %
(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)					
9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Oran g	10	10	0	100.00 %
10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Oran g	1	1	0	100.00 %

	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)					
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Oran g	1	1	0	100.00 %
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Oran g	10	10	0	100.00 %
	13 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Oran g	12	12	0	100.00 %
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Oran g	12	12	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Layanan data dan pengaduan	Oran	1	1	0	100.00 %

layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	g				
2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Oran g	1	1	0	100.00 %
layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis					
3 . Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Oran g	1	1	0	100.00 %
4 . Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Oran g	1	1	0	100.00 %
5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Oran g	1	1	0	100.00 %
6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Oran g	1	1	0	100.00 %

	bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound /gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Oran g	1	1	0	100.00 %
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Oran g	1	1	0	100.00 %
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Oran g	1	1	0	100.00 %
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Oran g	1	1	0	100.00 %
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Oran g	1	1	0	100.00 %

	(pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)					
	12 . Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Oran g	1	1	0	100.00 %
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Oran g	74	74	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 . Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Oran g	24	24	0	100.00 %
	2 . Penyediaan sandang	Oran	50	50	0	100.00 %

(pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	g					
3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit	1	1	0	100.00 %	
4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	Oran g	1	1	0	100.00 %	
5 . Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Oran g	1	1	0	100.00 %	

Dari tabel diatas realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pelayanan Rehabilitasi Sosial

- Anak Terlantar: Capaian sebesar 75% dari target yang ditetapkan menunjukkan bahwa sebagian besar anak terlantar telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial, tetapi masih ada kekurangan dalam cakupan layanan.
- Lansia Terlantar: Dengan capaian hanya 60%, masih terdapat kendala dalam memberikan pelayanan kepada lansia terlantar, terutama dalam aspek pendataan dan fasilitas layanan yang belum merata.
- Penyandang Disabilitas: Capaian sebesar 80% menunjukkan bahwa program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas cukup efektif, meskipun masih perlu peningkatan aksesibilitas layanan.

Pelayanan Perlindungan Sosial

- Korban Bencana Sosial: Capaian mencapai 90%, yang berarti bantuan sosial terhadap korban bencana telah dilaksanakan dengan baik dan respons cepat tanggap cukup efektif.
- Fakir Miskin: Dengan capaian 65%, masih terdapat kendala dalam distribusi bantuan sosial, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan kurangnya validasi data penerima manfaat.

Pelayanan Jaminan Sosial

- Bantuan Sosial Tunai: Realisasi mencapai 85% dari total anggaran yang dialokasikan, menunjukkan efektivitas distribusi bantuan tunai kepada masyarakat yang membutuhkan.
- BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran): Capaian sebesar 70% dari total kuota yang diberikan telah dimanfaatkan, tetapi masih ada sebagian masyarakat yang belum mendapatkan akses terhadap jaminan kesehatan.

Analisis dan Tantangan

- Beberapa layanan telah mencapai target yang tinggi, seperti bantuan bagi korban bencana dan penyandang disabilitas.
- Kendala utama masih terdapat pada layanan bagi fakir miskin dan lansia terlantar, terutama dalam aspek distribusi dan pendataan.

- Keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antarinstansi menjadi faktor penghambat utama dalam pencapaian SPM secara maksimal.

Rekomendasi

- Peningkatan Alokasi Anggaran: Agar layanan dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran.
- Perbaiki Sistem Pendataan: Untuk memastikan bantuan diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan.
- Optimalisasi Sumber Daya Manusia: Dengan pelatihan bagi tenaga sosial guna meningkatkan efektivitas pelayanan.
- Penguatan Kerja Sama Lintas Sektor: Agar program sosial lebih terintegrasi dan tepat sasaran.

4.6.4 Alokasi Anggaran

- 1 Secara garis besar, capaian anggaran Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya menunjukkan serapan sebesar 78,23% dari total anggaran Rp6,28 miliar. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk program rehabilitasi sosial, terutama bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti. Namun, serapan di program ini masih 76,87%, dengan kendala utama pada layanan pendidikan dan kesehatan dasar yang hanya terserap 72,64%.
- 2 Sementara itu, program perlindungan sosial bagi korban bencana memiliki serapan tinggi, mencapai 98,95%, menunjukkan efektivitas dalam penyediaan makanan, sandang, dan tempat penampungan bagi pengungsi.
- 3 Beberapa kegiatan tidak terlaksana sama sekali, seperti penelusuran keluarga, penanganan khusus bagi kelompok rentan, dan pelayanan dukungan psikososial. Hal ini menunjukkan adanya aspek yang perlu diperbaiki dalam perencanaan dan implementasi program.
- 4 Secara keseluruhan, meskipun serapan anggaran cukup baik, masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas program, terutama dalam memastikan semua kegiatan terlaksana dan optimalisasi layanan bagi kelompok rentan.

4.6.5 Dukungan Personil

Untuk melaksanakan penerapan SPM Bidang Sosial. Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.28
Data Personil Bidang Sosial Yang Terlibat Dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

NO	PERSONIL DINSOS	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	25 Orang
2	Tenaga Kontrak	11 Orang
3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	10 Orang
4	PKH	50 Orang
5	Sakti Peksos	1 Orang
6	Korda	1 Orang
7	Sakti Peksos	1 Orang
8	Tagana	27 Orang
9	Palopor Perdamaian	2 Orang
JUMLAH		128 Orang

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

4.6.6 Permasalahan

Capaian pelayanan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2024 masih belum sesuai dengan target SPM yang ditetapkan Pemerintah. Berbagai permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam upaya pencapaian target SPM tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data
 - o Respon masyarakat masih rendah, sehingga menghambat validitas dan kelengkapan data yang dibutuhkan untuk perencanaan program sosial.
2. Penghitungan Kebutuhan

- Perencanaan anggaran belum optimal, menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan layanan dan alokasi dana yang tersedia.
3. Perencanaan dan Penganggaran
- Anggaran yang tersedia masih kurang untuk memenuhi seluruh kegiatan yang direncanakan, sehingga beberapa program tidak dapat berjalan maksimal.
4. Pelaksanaan
- Sumber daya manusia (SDM) di Dinas Sosial masih terbatas, terutama dalam hal tenaga profesional yang sesuai dengan bidangnya. Kekurangan ini berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
5. Lain-lain
- Sarana dan prasarana yang tersedia masih terbatas, menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi anggaran, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung implementasi SPM secara efektif.

4.7 Program dan Kegiatan

Tabel 4.29

Program dan Kegiatan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan	OPD Pelaksana	Ket.
1	2	3	4
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
	PENDIDIKAN		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
	1 Penambahan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan	
	2 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU (OTSUS)	Dinas Pendidikan	
	3 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan	
	4 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan	
	5 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan	
6 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (OTSUS)	Dinas Pendidikan		
7 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan		
8 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (OTSUS)	Dinas Pendidikan		

9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Dinas Pendidikan
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
15	Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan
16	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
17	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
1	Penambahan Ruang Kelas Baru (OTSUS)	Dinas Pendidikan
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (OTSUS)	Dinas Pendidikan
3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
4	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan
5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (OTSUS)	Dinas Pendidikan
6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (OTSUS)	Dinas Pendidikan
8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (DAK non fisik-Bos Reguler-OTSUS)	Dinas Pendidikan
9	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan
10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan
11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan
12	Pembangunan Laboratorium	Dinas Pendidikan
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Dinas Pendidikan
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Dinas Pendidikan
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan
17	Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan
18	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Dinas Pendidikan
2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan
3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (OTSUS)	Dinas Pendidikan
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (OTSUS)	Dinas Pendidikan
5	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
2	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan
4	Apresiasi PAUD/DIKMAS	Dinas Pendidikan
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal	Dinas Pendidikan
6	Pengadaan Buku Kurikulum /Referensi	Dinas Pendidikan
7	Pengembangan pendidikan keaksaraan (OTSUS)	Dinas Pendidikan

8	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup (OTSUS) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
1	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	Dinas Pendidikan	
2	Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Dinas Pendidikan	
3	Diklat Pengetahuan Dasar Matematika Guru SD	Dinas Pendidikan	
4	Diklat Guru PAI SD	Dinas Pendidikan	
5	Diklat Guru PAI SMP	Dinas Pendidikan	
6	Diklat Guru PJOK SD	Dinas Pendidikan	
7	Diklat Guru PJOK SMP	Dinas Pendidikan	
8	Diklat Pengetahuan Pedagogik dan Tematik Guru SD	Dinas Pendidikan	
9	Seleksi Guru/kepala sekolah dan Pengawas Berprestasi	Dinas Pendidikan	
10	Seleksi Guru/kepala sekolah dan Pengawas Berprestasi	Dinas Pendidikan	
11	Olimpiade Guru SD/SMP Nasional (OGN)	Dinas Pendidikan	
12	Lomba Karya Inovasi Pembelajaran (INOBEL)Guru SD/SMP	Dinas Pendidikan	
13	Pelatihan kurikulum Keacehan SD dan SMP	Dinas Pendidikan	
14	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (OTSUS)	Dinas Pendidikan	
15	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi (OTSUS)	Dinas Pendidikan	
16	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (OTSUS)	Dinas Pendidikan	
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
1	Rapat Kerja Majelis Pendidikan Daerah.	Sekretariat MPD	
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kesekolah dari tingkat SD/MIN sampai SMP.	Sekretariat MPD	
3	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.	Sekretariat MPD	
4	Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik	Sekretariat MPD	
5	Rapat Kerja/Rapat Paripurna MPD.	Sekretariat MPD	
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Pendidikan	
2	Penyelenggaraan Ujian Nasional (UASBN) SD/MI, UN SMP/MTSN	Dinas Pendidikan	
3	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (Datadik)	Dinas Pendidikan	
4	Pengelolaan Beasiswa Miskin/Kurang Mampu	Dinas Pendidikan	
5	Patroli Keamanan Sekolah	Dinas Pendidikan	
6	Kerjasama Kelembagaan Bidang Pendidikan (Saweu Sikulah)	Dinas Pendidikan	
7	Monitoring, evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan BOS Tingkat SD/SMP	Dinas Pendidikan	
8	Pelatihan Teknis Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	
9	Pelatihan Profesi Kepengawasan	Dinas Pendidikan	
10	Pelatihan Website Sekolah Tingkat SD dan SMP	Dinas Pendidikan	
11	Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemetaan Sekolah Berbasis WEB	Dinas Pendidikan	
12	Bimtek Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kabupaten Nagan Raya	Dinas Pendidikan	

13	Pengelolaan BOS Tingkat SD/SMP	Dinas Pendidikan	
14	Peningkatan wawasan kebangsaan	Dinas Pendidikan	
15	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan (OTSUS)	Dinas Pendidikan	
16	Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Siswa	Dinas Pendidikan	
17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan	
II KESEHATAN			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota			
1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (OTSUS)	Dinas Kesehatan	
2	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	
3	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (OTSUS)	Dinas Kesehatan	
4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (OTSUS)	Dinas Kesehatan	
5	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan	
6	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (OTSUS)	Dinas Kesehatan	
7	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Dinas Kesehatan	
8	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan	
9	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	
10	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (OTSUS)	Dinas Kesehatan	
11	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinas Kesehatan	
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan	

15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (OTSUS)	Dinas Kesehatan
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinas Kesehatan
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan
23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dinas Kesehatan
24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinas Kesehatan
25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan
26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Dinas Kesehatan
28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan
29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan
30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dinas Kesehatan
32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan
34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan
37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan
38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (OTSUS)	Dinas Kesehatan
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
2	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
1	Bimbingan Teknis dan Super visi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan

1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		
1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	
1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Dinas Kesehatan	
2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	
	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan	
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dinas Kesehatan	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	
1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	
III	URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
3	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	

		Permukiman	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
1	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
1	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (OTSUS)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana (OTSUS)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (OTSUS)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

IV	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
2	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota		
3	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
4	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
	Pengelolaan Satuan Polisi Pamongpraja dan Wilayahul Hisbah Aceh		
	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	BPBD	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BPBD	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BPBD	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BPBD	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
	Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	BPBD	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	BPBD	
	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN		
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	BPBD	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		

	NONKEBAKARAN		
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (OTSUS)	BPBD	
V	SOSIAL		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
1	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial	
2	Penyediaan Sandang		
3	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial	
4	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Dinas Sosial	
5	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dinas Sosial	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial		
1	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial	
2	Penyediaan Alat Bantu	Dinas Sosial	
3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Dinas Sosial	
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial	
5	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial	
2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial	
3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Dinas Sosial	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial	
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial		

	Kabupaten/Kota		
1	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Dinas Sosial	
2	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Dinas Sosial	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		
1	Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Dinas Sosial	
2	Koordinasi,Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinas Sosial	

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 ini kami sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Aceh sebagai bentuk kewajiban kami untuk melaporkan Realisasi Pelaksanaan berbagai urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan.

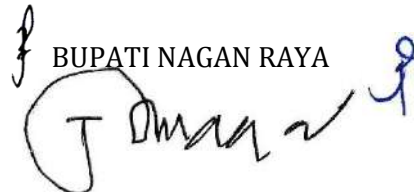
Secara umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2024 berlangsung dengan sangat baik. Program dan Kegiatan yang dicanangkan dalam perencanaan strategis untuk tahun 2024 ini yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran program pembangunan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya termasuk di dalamnya penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan terus berupaya untuk dapat melaksanakan berbagai program kegiatan dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian, disadari bahwa penyelenggaraannya masih saja belum sempurna, dimana masih terdapat tugas-tugas yang memerlukan penanganan lebih lanjut untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan.

Akhirnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa kita berserah diri, semoga segala upaya dan keikhlasan kita bersama membangun Nagan Raya tercinta ini bisa mewujudkan masyarakat Nagan Raya yang Meu Agama (Islami), damai, sehat, Carong (cerdas) dan bermartabat menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri, maju dan berdaya saing. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wabillahitaufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Suka Makmue, 27 Maret _____ 2025 M
27 Ramadhan 1446 H

BUPATI NAGAN RAYA


Dr. TR. KEUMANGAN, S.H., M.H